BUKU 2

PUSTAKA REFLEKSI

DUNIA MARITIM INDONESIA

Dalam Perspektif Sejarah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MAKASSAR

DUNIA MARITIM INDONESIA

Dalam Perspektif Sejarah

BUKU 2

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komerial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DUNIA MARITIM INDONESIA

Dalam Perspektif Sejarah

BUKU 2

PUSTAKA REFLEKSI

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Dunia Maritim Indonesia dalam Perspektif Sejarah (BUKU2)
-Makassar: 2018
xiv + 130 hal.; 14,8 x 21 cm

Hak Cipta © pada Penulis
Hak penerbitan pada Pustaka Refleksi. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apa pun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan Penerbit Pustaka Refleksi.

Penulis : Desy Polla Usmany
Nuraini
Hasbullah
Darto Harnoko
Seno

Tim Kreatif : Andi Wanua Tangke
Anwar Nasyaruddin

Tata Letak Isi : JanurJene

Desain Sampul : Narto Anjala

Penerbit:
PUSTAKA REFLEKSI
Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064.
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172 – 081342183116
Email: refleksibooks@yahoo.co.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All Right Reserved

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Daerah Sulawesi Selatan

Cetakan I, 2018
ISBN: 978-979-3570-96-9

PENGANTAR PENERBIT

SEJARAH kebudayaan masyarakat Indonesia tidak bisa dan tidak pernah lepas dari laut. Dalam catatan sejarah peradaban masa lalu selalu berkaitan dengan laut. Itu tidak lepas dari luas wilayah Indonesia 62 persen diantaranya adalah laut, sementara sisanya 38 persen merupakan daratan. Dengan demikian itu adalah alasan mengapa sejarah Indonesia tidak pernah lepas dengan laut.

Buku *Dunia Maritim Indonesia dalam Perspektif Sejarah* ini menarik untuk dibaca. Penerbit Pustaka Refleksi diberi kepercayaan untuk menerbitkannya. Suatu kepercayaan yang patut diapresiasi, mengingat perjalanan sejarah penerbit ini lebih fokus menerbitkan buku-buku muatan lokal baik yang bersifat sejarah maupun budaya. Kehadiran buku ini tentunya semakin memberi nuansa dan perbandingan beragamnya cara pandang dan cara sikap terhadap laut di masing-masing budaya.

Dari beragamnya cara pandang laut dari setiap budaya, namun ada kesamaannya, semuanya fokus bagaimana memanfaatkan laut untuk kepentingan mereka. Siapa menguasai laut, berarti menguasai segalanya. Kerajaan besar masa lalu berlomba menguasai laut. Laut akan selalu menjadi objek dan subjek pendekatan budaya dan sejarah dari masa ke masa seperti yang termuat dalam buku ini hasil penelitian dari para peneliti BPNB.

PUSTAKA REFLEKSI

KATA PENGANTAR

KONSEP yang digunakan untuk menggambarkan Indonesia, yakni *archipelagic state,* sering diterjemahkan dengan "negara kepulauan" sesungguhnya keliru. Tidak ada kata yang berarti pulau pada kata dasarnya, *archipelago*. Dari bahasa Latin, terdiri atas dua suku kata: *arch* (utama) dan *pelagos* (laut), *archipelago* berarti "laut utama". Jika ditambahkan *state* (negara), maka arti sesungguhnya adalah "negara laut utama" atau Negara Maritim.

Secara geografis luas wilayah Indonesia, dengan jalur laut 12 mil, adalah 5 juta km^2 yang terdiri atas: 62% laut dan 38% darat (Nontji 2002: 4). Jelas bahwa laut merupakan unsur utama, kemudian darat, yang membentuk wilayahnya. Itulah sebabnya disebut Negara Maritim. Ini mengindikasikan bahwa sejarah Indonesia sejak zaman bahari berhubungan dengan laut, terutama migrasi dan interaksi penduduk antarpulau. Adrian B. Lapian, dalam pidato pengukuhan guru besarnya pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1992, mengatakan bahwa Sejarah Nusantara [adalah] Sejarah Bahari.

Ada dua kata yang berarti laut, yakni maritim dan bahari. Kata pertama diadopasi dari bahasa Latin *mere* (laut) menjadi maritim. Kata itu, dalam KBBI (2011), punya dua arti: (1) berkenaan dengan laut dan (2) berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Di bawahnya terdapat kata kemaritiman, yang berkaitan sifat negara Indonesia. Sedangkan kata kedua diambil dari bahasa Arab *bahri* (laut), menjadi bahari yang dalam KBBI berarti: (1) dahulu kala atau kuno (2)

indah atau elok sekali, dan (3) mengenai laut atau bahari. Bila ditautkan dengan subyek, menjadi bahariawan yang berarti orang yang bekerja di laut atau pelayaran (pelaut). Jika kata maritim lekat dengan sifat negara (negara maritim), maka kata bahari bertautan dengan kegiatan penduduk di laut (bahariawan).

Dua makna kata tersebut, sesungguhnya jika dibuat secara metafor, adalah "dahulu kala negara kita jaya di laut". Kejayaan itu berkaitan dengan kemampuan mengelola potensi pelayaran dan perdagangan di laut. Ambil contoh Kedatuan Sriwijaya yang pernah bertahan lebih kurang tujuh abad (abad VII-XIII), Kerajaan Majapahit sekitar tiga abad (abad XIII-XV), dan Kerajaan Makassar sekitar dua abad (abad XVI-XVII). Kejayaan dua kerajaan pertama ditopang oleh kemakmuran maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Sedangkan kerajaan yang ketiga mampu memanfaatkan potensi kemakmuran di Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Itulah mungkin sebabnya unit bahari pertama yang menghubungkan Sulawesi dan Kalimantan disebut Selat Makassar, bukan selat Sulawesi atau selat Kalimantan seperti umumnya dalam penamaan selat di Indonesia diambil dari nama pulau yang dihubungkannya, seperti Selat Selayar, Selat Bali, Selat Lombok, dan Selat Manipa. Terus ke timur terdapat Kesultanan Ternate dimana seorang sultannya pernah dijuluki "Penguasa 72 Pulau". Pulau-pulau itu terdapat dalam kawasan Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda.

Kerajaan-kerajaan tersebut pernah menjadi kekuatan politik maritim yang besar pada zamannya. Kalau dibentangkan sejak masa awal Sriwijaya hingga akhir Makassar tercakup lebih kurang "seribu tahun", sebagai "abad kejayaan maritim" dalam sejarah Indonesia (Hamid 2013). Dengan demikian, mengkaji sejarah Indonesia, menurut Adrian B. Lapian, hendaknya menggunakan pendekatan sejarah maritim. Dalam pendekatan itu, laut ditempatkan sebagai unit bahari yang saling terhubung sehingga menyatukan satu pulau dengan pulau lainnya, juga penduduknya. Dari segi cakupan, unit-unit bahari di Indonesia terdiri atas: unit yang sempit berupa selat dan teluk serta unit bahari yang luas berupa laut.

Perkembangan empat kerajaan di atas sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan kemakmuran pada *unit bahari yang luas* (Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda) serta *unit bahari yang sempit dan strategis* (Selat Malaka dan Selat Sunda). Unit-unit itu merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang ramai di Nusantara, sehingga menguntungkan bagi setiap kekuatan politik yang mampu memanfaatkannya.

Menyadari pentingnya laut bagi rakyat dan kerajaannya, raja-raja Makassar (Gowa-Tallo) melaksanakan prinsip kebebasan di laut. Setiap pihak yang berupaya untuk menguasai laut ditantang keras oleh raja-raja Makassar dengan mengatakan kepada mereka bahwa "Tuhan memberikan laut secara umum. Tidak pernah terdengar seseorang dilarang berlayar di laut" (Poelinggomang 2002).

Prinsip tersebut menjadi pemicu kekuatan maritim asing (*Vereenigde Oost-indische Compagnie;VOC*) menempuh segala cara untuk meruntuhkannya, antara lain menjalin hubungan dengan Arung Palakka dan Sultan Buton. Hubungan dengan penguasa terakhir dianggap sangat penting, karena wilayahnya berada pada jalur pelayaran niaga rempah-rempah menuju dan kembali dari Maluku. Menurut J.C. Van Leur (1974), upaya menguasai Kerajaan Makassar jauh lebih penting daripada Malaka-Portugis. Pasalnya, rempah-rempah sebagai barang primadona dalam perdagangan maritim masa itu, mudah diperoleh di pelabuhan Makassar. Bahkan, harganya kadang lebih murah daripada di Maluku sendiri. Dengan demikian, para pedagang cukup singgah di Makassar, tanpa meneruskan pelayaran ke Maluku, untuk mendapatkan rempah.

Setelah merasa yakin, VOC dan sekutunya menantang Makassar dalam perang (1666-1667) yang berakhir dengan runtuhnya Kerajaan Makassar. Sejak saat itu, jalur rempah di Laut Flores dan Laut Banda dikuasai oleh VOC. Dalam dua diktum Perjanjian Bungayya (18 November 1667) disebutkan (1) hanya Kompeni (VOC) yang boleh bebas berdagang di Makassar, dan (2) pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar kemana pun, kecuali beberapa tempat yang ditentukan

dan harus mendapat surat izin dari Komandan Belanda. Ditegaskan pula bahwa "mereka yang berlayar tanpa surat izin [...] harus menebusnya dengan nyawa dan harta". Jelas bahwa motivasi Belanda adalah untuk menguasai perdagangan di Pelabuhan Makassar, serta pelayaran niaga di Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Banda. Penguasaan jalur pada unit-unit bahari tersebut, tidak hanya mempengaruhi sejarah Makassar, tetapi juga sejarah Indonesia, dengan apa yang disebut zaman kolonialisme.

Tampaknya sikap Belanda (VOC) tidak sejalan lagi dengan prinsip yang dianut dan berkembang di negerinya, yakni *mare liberum*. Tokoh utama di Belanda yang menentang kebijakan *mare clausum* (laut tertutup) adalah Hugo de Groot (Grotius) dalam bukunya, *Mare Liberum* (1608). Ia terkenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Menurutnya, laut adalah sesuatu yang tidak mempunyai batas. Karena itu tidak dapat dikuasai, sebab dia cair dan tidak terbatas (Djalal 1979).

Perubahan sikap Belanda terhadap laut, apa pun motivasinya, menunjukkan betapa besarnya pengaruh laut terhadap sejarah. Berbagai komoditas yang dihasilkan oleh penduduk di daratan (pulau) bertambah nilainya setelah diperdagangkan ke seberang lautan. Rempah-rempah Maluku (cengkih, pala, dan bunga pala) dan rempah Sumatera (lada) dicari banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia setelah komoditas itu dikenal dalam perdagangan maritim. Dengan kata lain, komoditas itu menghantar penduduknya dalam jaringan perdagangan global, sekaligus di antara perebutan kekuasaan yang ingin mendapatkan rempah, seperti ditulis oleh Mezak Wakim dan Iim Imamuddin. Serangan Amerika Serikat terhadap Aceh (Kuala Batu) dalam abad XIX, berdasarkan tulisan Hasbullah dalam buku ini, berlatar pada perdagangan lada. Akibatnya, sebanyak 300 penduduk tewas dan Kota Kuala Batu hancur.

Tulisan Hasanuddin, tentang pelayaran dan perdagangan Gorontalo abad XVIII-XIX, membawa kita pada satu unit bahari (teluk) yang terbesar di Indonesia, yakni Teluk Tomini. Para pelaku usaha maritim di kawasan ini cukup beragam meliputi pelaut-pedagang Bugis, Makassar,

Mandar, Tobelo, Mindanao, Inggris, dan Belanda. Kendatipun Pelabuhan Donggala di Teluk Tomini, tetapi pelakunya dari berbagai kawasan bahari seperti Laut Maluku, Laut Sulawesi, dan Selat Makassar. Bahkan, komoditas tertentu yang dihasilkan di kawasan ini (seperti emas) diperdagangkan sampai ke Singapura, hal mana memperlihatkan luasnya jaringan maritim Teluk Tomini.

Sepuluh artikel yang dimuat dalam buku ini adalah hasil karya peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya di Indonesia yang disampaikan dalam seminar di Makassar pada 25-28 April 2016. Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut, melampaui apa yang telah dilakukan peneliti ini, guna menambah khasanah pengetahuan kita mengenai dunia maritim Indonesia.

Makassar, 13 November 2017

ABD. RAHMAN HAMID

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v
KATA PENGANTAR — vii
DAFTAR ISI — xiii

LAUT DAN INTEGRASI BANGSA: Suatu Tinjauan Historis Tentang Migrasi Orang Lani Dari Pegunungan Tengah Papua
Desy Polla Usmany — 1

PULAU SEKATUNG: Potensi Kemaritiman dan Problematikanya
Nuraini — 19

SERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUALA BATU DI ACEH BARAT DAYA (6 FEBRUARI 1832)
Hasbullah — 31

TAMBAK IKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DI KARESIDENAN SURABAYA PADA AWAL ABAD XX: SUATU KAJIAN AWAL
Darto Harnoko — 77

GEMPA BENGKULU 12-13 SEPTEMBER 2007 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKAMPUNGAN NELAYAN DI BENGKULU UTARA DAN MUKO-MUKO
Seno — 103

LAUT DAN INTEGRASI BANGSA; Suatu Tinjauan Historis Tentang Migrasi Orang Lani dari Pegunungan Tengah Papua[1]

Desy Polla Usmany[2]

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau. Kondisi demikian menyebabkan sarana transportasi laut telah menjadi transportasi utama untuk menjangkau dari satu pulau ke pulau lainnya. Itu sebabnya sejarah yang berhubungan dengan laut atau maritim oleh, A.B.Lapian dipandang tidak saja sebagai salah satu sumber daya alam bagi kebutuhan hidup manusia, tetapi laut lebih dipandang sebagai media pemersatu bangsa (A.B.Lapian, 1992). Dengan demikian Laut tidak hanya dipandang sebagai media penghubung antar pulau dan media sumber pangan dan mata pencaharian saja, namun juga sebagai media integrasi yang mempersatukan ribuan pulau di Indonesia.

Pulau Papua adalah salah satu pulau dalam wilayah Republik Indonesia yang juga terintegrasi dalam bingkai NKRI. Integrasi ini bukan saja karena Papua adalah bagian dari Republik Indonesia, tetapi juga karena lautnya mengintegrasikan Pulau Papua dalam teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayangnya, tidak semua penduduk Papua berdiam di pesisir pantai. Ada juga yang tinggal di pegunungan dan tidak mengenal laut, seperti suku Lani (Dani Barat) yang dikenal sebagai

[1] Disampaikan dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian BPNB se-Indonesia, Makassar pada 25-28 April 2016.

[2] Staf Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua

orang Lani, namun dalam beberapa tradisi hidupnya memiliki hubungan dengan benda laut.

Orang Lani lebih dikenal sebagai orang Dani Barat. Kata Dani atau Ndani muncul pertama kali di dalam literature maupun laporan etnografi setelah ekspedisi N.W Stirling pada 1926 yang mengunjungi daerah Dani Barat dimana tinggal orang Lani (Mientje D.E.Rumbiak,dalam Etnografi Irian Jaya, 1993:212). Orang Lani adalah salah satu suku terbesar asli Papua yang tinggal di daerah pegunungan tengah bagian timur dari Gunung Pyramid di ujung bagian Utara Lembah Agung Baliem yaitu di sebelah barat laut kota Wamena.

Letak wilayah perkampungan orang Lani sangat jauh dari pesisir dan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi udara. Uniknya mereka memiliki kerang Cowrie, salah satu kerang laut yang digunakan sebagai alat tukar, juga sebagai mas kawin dan aksesoris dalam berbusana. Barang-barang berharga ini mengindikasikan adanya hubungan antara penduduk pesisir dan orang Lani yang berada di gunung. Sayangnya sampai pertengahan abad-20, daerah ini masih menjadi daerah yang misterius dan belum diketemukan.

Gambar Peta Papua tahun 1969 (Koentjaraningrat, 1993) Warna merah hijau adalah daerah persebaran orang Lani di Pegunungan Tengah Papua

Richard Arbord adalah orang pertama yang menemukan lembah ini dan menamainya lembah Agung Baliem. Pada artikel yang dibuatnya dan terbit dalam majalah National Geografi 1941, telah menarik perhatian dunia, terutama pihak gereja-gereja. Sejak 1954, para Zending mulai berdatangan memasuki lembah Baliem dan menjadi awal dimulainya peradaban baru. Perubahan dalam hidup orang Lani terus berkembang dan bergulir sampai sekarang, dimana orang Lani sudah dapat di jumpai di berbagai tempat, baik yang hidup di pesisir Papua, di kota-kota yang ada di Papua, bahkan sampai ke daerah-daerah lain di luar Papua. Tidak sedikit orang Lani yang kemudian menikah dengan orang Papua pesisir dan suku non Papua dari berbagai etnis Nusantara.

Keluar dan tersebarnya orang Lani di berbagai daerah dapat diartikan sebagai migrasi. Secara sederhana, kata migrasi mengandung pengertian perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam penulisan ini, defenisi migrasi yang digunakan adalah defenisi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statisti (BPS). Menurut BPS, migrasi adalah perpindahan seseorang melewati batas administrasi provinsi menuju provinsi lain dalam jangka waktu enam bulan atau lebih. Lebih jauh lagi, BPS menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis migran antar provinsi. Migran semasa hidup (*life time migrant*) adalah mereka yang pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah provinsi tempat kelahirannya. Migran risen (*recent migrant*) adalah mereka yang pindah melewati batas provinsi dalan kurun waktu lima tahun terakhir sebelum pencacahan. *Migran total* adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data (*Budi Asyhari-Afwan*,2015:14-15,dikutip dari Safrida 2014; Munir 2011: 133-153).

Berdasarkan uraian diatas, muncul pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut: bagaimana sejarah migrasi orang Lani dari Pegunungan Tengah Papua dan hubungannya dengan laut dan integrasi bangsa Indonesia sejak 1956. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi dan latar belakang terjadinya migrasi orang Lani dari Pegunungan Tengah

Papua dan hubungan migrasi tersebut dengan sejarah maritime Indonesia, dimana laut menjadi media pemersatu yang mengintegrasikan Papua dalam bingkai NKRI. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Asal-Usul Orang Lani

Terdapat beberapa versi ceritera mengenai asal usul orang Lani. Orang Lani percaya berasal-usul sama dengan orang Baliem, nenek-moyangnya dari kampung Ferawe, pindah mengikuti Sungai Baliem di Wamena hingga tiba di kampung Wim Alome di Tiom, mulai bertempat tinggal di situ. Selama di Wim Alome orang Lani beranak cucu, sehingga keturunannya menjadi besar. Sebagian lalu pindah ke Mulia, tetapi ada juga yang kembali ke Lembah Baliem dan ada yang berjalan terus ke Enarotali menjadi orang Mee, ke Kemandoga dan Dugindoga menjadi orang Moni. menurut Mampioper. Orang Lani di Wim Alome terdiri dari klen-klen Tabuni, Kogoya, Wenda, Morip, Enumbi, Elabi, Kiwo, Winimbo, Gombo, Telenggen, Yikwa, Alom, Magai, Wonerengga. Versi lain asal-usul penyebaran orang Lani itu mengisahkan kepergian orang Lani dari arah timur, leluhurnya dari Seinma, sebuah kampung di Kurima di sekitar Lembah Baliem, kemudian pindah ke arah barat, dan mulai mendiami Asologaima, Magi, Purime, Tiom, Koyawage, Kurulu, Bulakme, Kelila, Bokondini, Karubaga, Mulia, Sinak, Ilaga, Ilu, dan Mapenduma. Versi lain lagi mengisahkan asal-usul orang Lani dari kampung Pugima di Lembah Baliem dengan sebutan lain Pirame, menemukan duneks api *(ji ge wakwi manu negwarak)*, bibit ubi jalar *(bi awi kin eregwarak)*, bangun *honai*, banyak babi hutan di lembah itu, pindah menyusuri Sungai Baliem ke kampung Wim Alome, sekarang Pos Pirime Tiom, buka kebun di tempat baru itu, bangun *honai*, ada juga untuk sementara tinggal dalam gua batu, selain berkebun, juga berburu, dan berpisah lagi dari situ ada yang ke Bokondini, Makki, Kelila, Karubaga, Ilu, Mulia, Ilaga, Sinak dan Beoga. Ada yang kembali ke Lembah Baliem Tengah pulang lewat jalan yang sama, berkembang menjadi orang Baliem sekarang yang meliputi

sejumlah klen seperti Hubi, Hilapok, Holepere, Surabut, Aluwa, Iltay, Yelipelo, dll. Sebagian lagi pindah dari Lembah Baliem Tengah ke kepala air lewat Kwiyawagi masuk ke Ilaga, terus ke Beoga sampai Kugapa, Homeyo, dan Enarotali, berkembang hingga ke Moenamani, Wagethe, Obano, Komopa, hingga Mapia yang meliputi sejumlah klen orang Mee seperti Gobai, Tebai, Jeimo, Tekege, Giai, Koutoki, Agapa, Addi, Jogi, Tenoye, Kogopa, dll, dan ada juga lanjut ke Mimika (Obe,tulisan tidak diterbitkan,2008, non halaman). Versi lain lagi menyatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Wegasaput (daerah wamena sekarang), yang karena perselisihan mengakibatkan perang diantara mereka. Salah satu kelompok yang berperang tersebut kemudian di haruskan pergi dari tempat itu. Mereka yang pergi inilah yang kemudian menjadi orang Lani. Lani artinya pergi. Mereka lalu pergi ke arah Barat dan kemudian menetap di daerah Pyramid, Kimbim, Makki, Tiom, Pirime, Karubaga, Bokondini, Kelila, Ilaga, Mulia, Tolikara dan daerah lainnya (Wawancara: Abisay Kogoya, Tiom Lanijaya,3/11/2015).

Dalam relasi moety/paruhan, kelompok orang Lani (Dani Barat) terdiri atas dua klen besar yaitu Wenda dan Kogoya. Kedua klen ini sering juga disebut Weya-Wenda (Kogoya). Masing-masing klen terdiri atas beberapa marga sebagai berikut:

No	Weya	No	Wenda
1	Telenggen	1	Enumbi
2	Tabum'	2	Wanena
3	Kogoya	3	Morip
4	Wani'mbo	4	Nggena
5	Nggoma	5	Yikwa
6	Weya	6	Wonda
7	Nggire	7	Nggumbo
8	Towolam	8	Wonerengga
9	Yoman	9	Kiwo
10	Wogobera	10	Yanuno
		11	Murip
		12	Wakereka

Pada masyarakat Lani terdapat aturan adat bahwa Wenda tidak boleh menikah dengan Wenda, demikian juga Kogoya tidak boleh menikah dengan Kogoya. Perkawinan yang diperbolehkan adalah perkawinan Wenda dan Kogoya.

Kontak Orang Lani Dengan Orang Luar

Jauh sebelum Belanda berkuasa atas Papua, orang Lani (Dani Barat) sudah memiliki hubungan dengan masyarakat pesisir. Komoditi yang diperdagangkan secara barter adalah kepingan kulit kerang yang datang dari pantai, ditukar dengan tembakau, bulu-bulu burung, garam, perkakas batu dan babi hidup. Kerang Cowrie (Cypraea) merupakan barang yang sangat berharga karena menjadi alat tukar (uang) dalam perdagangan antara orang pesisir dan orang gunung atau diantara orang gunung sendiri (Kal Muller, 2009:129-131). Pada masyarakat pesisir, kerang Couwre berfungsi sebagai mas kawin. Budaya material ini kemudian diadopsi juga oleh penduduk pegunungan tengah Papua, antara lain oleh orang Dani Barat (Lani), dimana kerang Cowrie menjadi salah satu mas kawin yang bernilai tinggi selain babi hidup.

Disamping kerang Couwrie, terdapat jenis kerang lain yaitu jenis kerang kecil dari genus Nassa. Kerang ini digunakan sebagai aksesoris yang dijahitkan pada sejenis kulit kayu atau kain yang dapat digunakan seperti dasi atau kalung. Orang Lani sangat senang dengan kerang ini karena dapat menghias leher mereka. Karena itu tujuan perdagangan yang dilakukan antara penduduk pegunungan dan penduduk di pesisir salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan uang kerang dan kerang-kerang lainnya.

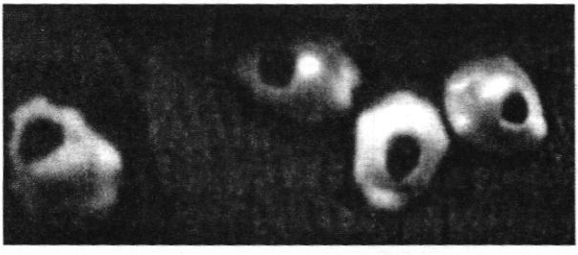

Kerang Cowrie sebagai alat pembayaran (uang) pada penduduk di Pegunungan Tengah Papua (sumber: Kal Muller,2009:129)

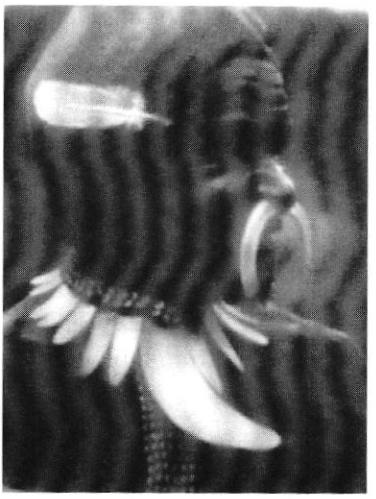

Kerang kecil dari genus Nassa, digunakan oleh penduduk Pegunungan Tengah Papua sebagai aksesoris yang bernilai tinggi menghiasi leher dan dada.
(sumber, Kal Muller,2009:136)

Seorang perempuan Lani menggunakan perhiasan kerang sebagai kalung
(sumber: dokumentasi pribadi)

Ada empat jalur utama perjalanan mata uang kerang di dataran Papua sampai dengan Papua New Guinea yang menghubungkan pesisir papua dengan daerah pedalaman yaitu:

1. Jalur utara –barat Papua, yaitu oleh suku Grimora di Hamuku, pantai barat Nabire. Pusat suku ini terletak di Gilimancaro Erega, danau Manami dan Jamor. Orang Grimora menjual kerang ini kepada suku Jabi yang adalah orang Mee Barat yang tinggal di hulu Sungai Wanggar, Gunung Menow/Wijland, Gunung Cijo/ Charles Louis, Titinama Korouw, Odiburay, Moanemani dan masuk ke penduduk Mee yang bermukim di sekitar danau-danau di Paniai. Selanjutnya kulit kerang ini berpindah tangan sampai ke Suku Moni, Amungme, Nduga dan Dani di Lembah Baliem.
2. Jalur masuk kerang melalui sebelah Utara Pulau Nieuw Guinea di bagian Timur (Papua New Guinea/PNG) yaitu melewati Wewak dan Madang mengikuti Sungai Sepik ke Ubrub, Kiwirok, Oksibil, Okbibab(wilayah suku Ngalum), Batom, Eipomek, Nalca, Ninia,

Anggruk, Apalapsili/Kurima dan akhirnya sampai ke orang Dani di Lembah Baliem.

3. Jalur Lae, Goroka, Mount Hagen wilayah Papua New Guinea ke arah Barat sampai ke Kiwirok wilayah suku Ngalum, Batom- Eipomek, Anggruk, Apalapsili dan Lembah Baliem.
4. Jalur Timur Selatan Papua masuk lewat Sungai Fly menuju Inggenbit, Nimatika, Mandobo, dan Ngalum di Oksibil, seterusnya ke Barat dan mengikuti jalan yang sama ke Lembah Baliem (Dominggus Mampioper,Rubrik Seni, Ekonomi Barter Kerang,http://Tabloid Jubi.com, 17 Januari 2015, diakses pada 7 April 2016).

Sekalipun sudah ada perdagangan barter antara pesisir dan pedalaman Papua, namun Papua masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Demikianlah dalam upaya menegakkan kekuasaannya di Papua, pemerintah Belanda kemudian membuka sarana dan prasarana transportasi dari dan ke Papua, dengan mengatur pelayaran kapal KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) dari Ternate ke Papua bergantian melalui jalur Utara dan Selatan. Adapun jalur pelayaran KPM pada jalur Utara sebagai berikut:

a. Perjalanan pergi: Ternate,Gane,Patani, Salawati, Sorong, Dorei, Room,Teluk Umar, Ansus (Yapen) Taronta (Teluk Walckenaar),Teluk Humboldt (Perbatasan dengan Jerman).
b. Perjalanan pulang: Teluk Tanah Merah, Jamma, Awek (pantai Utara Yapen, Saba (di Biak), Korido,Dorei, Sankoren (Amberbaken, namun pada saat musim angin barat laut, kapal KPM tidak menyinggahi Amberbaken, sebagai gantinya adalah pelabuhan Koor di pulau Amsterdam dan Middelburg), selanjutnya kapal ke Saonek (Waigeo) Patani dan Ternate

Pelayaran KPM pada jalur Selatan sebagai berikut:

a. Perjalanan pergi: Ternate, Bacan,Misol,Sekar,Skroe,Karas (Teluk Rijcklof van Goens), Geser, Banda, Teluk Kaimana, Utanata (Wakara), Selerika (Perbatasan dengan Inggris).
b. Perjalanan Pulang: Pulau Hermuis, Teluk Kayu Merah, Teluk

Triton,Namatote, Banda, Geser, Skroe, Sekar, Bacan dan Ternate (Rosmaida Sinaga,2013:39)

Setelah berbagai persiapan dilakukan maka pada tahun 1989, pemerintah Belanda mulai menanamkan kekuasaannya atas Papua. Sejak itu beberapa ekspedisi ke pedalaman Papua dilakukan oleh para ilmuwan asing untuk mengetahui kondisi alam dan ekosisitim di Papua. H.A.Lorentz pada 1909, mengadakan ekspedisi ke pedalaman untuk mendaki puncak Gunung Wilhelmina (sekarang Trikora). Dalam ekspedisi ini mereka bertemu dengan orang Dani yang datang ke kamp mereka. Tahun 1920, ekspedisi Van Overeem memasuki lembah Swart dan setahun kemudian ekspedisi Kremer memasuki lembah ini kembali dan bertemu dengan penduduk Dani Barat (orang Lani). Tahun 1926, ekspedisi N.W. Stirling dilakukan dengan mengunjungi daerah Dani Barat (daerah orang Lani), melalui Sungai Rouffaer dan bertemu dengan orang Dani yang berdiam di daerah Moni.

Lembah besar Baliem benar-benar terlihat pada 1938 oleh Richard Archbold, yang secara kebetulan memandang keluar kaca jendela pesawatnya dan melihat adanya lembah hijau luas yang begitu indah. Ketika itu Ricard Arbord memimpin tim ekspedisi yang disponsori oleh American Museum of Natural History bekerjasama dengan pemerintah Belanda untuk melakukan penelitian di Pegunungan Tengah Papua. Lembah tersebut kemudian mereka namakan Lembah Agung atau Grote Vallei. Selanjutnya Tim ekspedisi yang sama di bawah pimpinan Kapten Teerink dan Letnan Van Areken berhasil pula sampai di lembah ini yaitu di Danau Habema dan dari sana mereka berjalan menuju arah Lembah Baliem melalui Lembah Ibele, dan mendirikan basecampnya di Lembah Baliem (Frans Lieshout,2009: 11-12).

Richard Arbord lalu mempublikasikan penemuannya dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh National Geographic Magazine, pada tahun 1941. Artikel itu menarik perhatian dunia terutama gereja-gereja, karena Archbold menampilkan foto-foto Lembah Baliem; namun akibat Perang Dunia II pada tahun 1942-1945, untuk sesaat daerah ini terlupakan.

Demikianlah orang Lani sudah bertemu orang asing, tetapi hanya sepintas saja. Orang asing baru benar-benar masuk dan tinggal dengan orang Lani setelah Perang Dunia II usai.

Masuknya Injil

Dengan ditemukannya Lembah Baliem, maka pada 20 April 1954, sejumlah missionaris asal Amerika Serikat dari C&MA , tiba di Lembah Baliem. Tim misionaris ini menggunakan pesawat kecil yang mendarat di Sungai Baliem, tepatnya di Desa Minimo. Selanjutnya mereka mendirikan Stasiun Misionaris Pertama di Hitigima dan selama 7 (tujuh) bulan mereka mendirikan landasan pesawat terbang pertama. Beberapa waktu kemudian misionaris menemukan sebuah areal yang ideal untuk dijadikan landasan pendaratan pesawat udara. Areal landasan pesawat terbang itu terletak berbatasan dengan daerah Suku Mukoko di Wesakaput (lapangan terbang Wamena sekarang).

Langkah C&MA yang memulai pelayanan penginjilan pertama mereka di Grand Valey Pegunungan Tengah Papua, pada tahun 1954, diikuti oleh organisasi gereja lainnya. Berturut-turut para penginjil mulai memasuki Lembah Baliem antara lain APCM pada 1955, ABMS pada 1956, RBMU pada 1957 dan UFM pada 1958. Masing-masing organisasi gereja memiliki daerah pelayanannya masing-masing. C&MA, membangun daerah penginjilannya di Hitigima, Ilaga Pyramid, Tulem, Seinma, Pugimi, Ibele, Sinak, Sinatma. APCM, membangun daerah penginjilannya di Archbold Lake (Danau Arbold),Bokondini, Wolo dan Kelila. ABMS, membangun daerah pelayanannya di Tiom, Makki dan Jugwa. RBMU, membangun pelayanannya di daerah Karubaga, Kanggime, Mamit. UFM, membangun daerah pelayanannya di Mulia dan Ilu (Hayward, 1980:122-124). Disamping itu masuk pula Missi Gereja Katolik dan GKI di (Gereja Injili di Tanah Papua). Melalui organisasi gereja-gereja inilah masyarakat Pegunungan Tengah Papua, mengenal pendidikan formal dan awal peradaban baru bagi mereka.

Orang Lani hampir sebagian besar termasuk dalam pelayanan organisasi gereja ABMS (Association Baptist Mission Society) asal Australia. ABMS dibawa oleh Pdt Norman Draper,Hein Nordyk dan Ian Gruber bersama dengan Myron Bromley, seorang ahli bahasa dari misi C&MA, yang tiba di Tiom pada 25 Oktober 1956. Kedatangan mereka diterima oleh tokoh-tokoh masyarakat Lani di Tiom antara lain Nick Yigibalom, Yambonek Kogoya (Yahya Kogoya), Pigirik Yoman, Miyawarak Yigibalom, Pinomban Kogoya, Nawimban Kogoya, Lawutaganir Kogoya, Ariel Wenda dan lain sebagainya.

Awal pekerjaannya, ABMS lebih memfokuskan kegiatan pada pendidikan Alkitab. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan orang Lani yang nantinya akan menjadi penyiar Injil di Pegunungan Tengah Papua. Pada 1957 dibuka sekolah Injil di Tiom. Kelas 1 berjumlah 15 orang dan tamat pendidikan pada 1961. Empat orang memulai penugasan pekerjaannya,di daerah orang Lani.

Perkembangan agama Kristen pada orang Lani, menyebabkan sejumlah kepala suku di Maki yang merasa legitimasinya berkurang, mulai menghimpun rakyatnya untuk melakukan gerakan melawan agama Kristen. Serangan terhadap umat Kristen terjadi pada September 1961. Setelah kondisi sudah kondusif, pekerjaan penginjilan justru lebih mempersatukan rakyat yang sudah menjadi Kristen. Jumlah orang yang lebih besar pergi ke sekolah. Beberapa proyek pembangunan dilakukan antara lain sebuah proyek penggergajian yang baru dan pembangunan jalan (Dr.E.C.Smith, 2009:214-216). Gereja sudah meletakkan dasar perubahan pola pikir, sehingga lambat laun para orang tua mulai membiarkan anak mereka ikut bersekolah guna belajar Alkitab dan pengetahuan umum lainnya.

Masuknya Pemerintah Belanda

Berkembangnya organisasi gereja di Pegunungan Tengah Papua, ditindak lanjuti dengan membuka pos pemerintah Belanda di Wamena pada 14 Desember 1956. Kehadiran pemerintah Belanda di daerah

Pegunungan Tengah Papua, telah meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah itu dari aktivitas perang suku, sehingga memberi rasa aman kepada penduduknya. Pemerintah Belanda juga menugaskan pos pemerintahan di Lembah Baliem untuk membuka akses Lembah Baliem ke luar lembah dengan membangun sarana transportasi dan komunikasi antara lain landasan pesawat terbang dan jalan, sehingga membuka keterisolasian penduduk Pegunungan Tengah Papua, antar desa, dan desa dengan kota. Selain itu pemerintah Belanda juga memberi pelayanan kesehatan melalui pemberian penisilin,obat untuk frambusia (patek) kepada penduduk lokal (Pim Schoorl, 2001:91).

Pembukaan isolasi pada daerah orang Lani, dilakukan pula oleh Gereja Baptis, dengan membuka lapangan udara di setiap wilayah pelayanan gereja misalnya lapangan terbang Danime, Magi, Pirime, Tiom, Kwiyawagi, dan daerah lain. Upaya pembukaan lapangan terbang ini merupakan kerjasama misionaris Baptis dan pihak MAF yang melayani penerbangan Zending ke daerah pelayanan penginjilan. Sejak itu pelayanan ke daerah-daerah terpencil sekalipun dapat dilakukan dan telah membuka keterisolasian orang Lani dari dunia luar.

Pada akhir 1961, pemerintah Belanda membuka pos pemerintahannya di Tiom,namun pemerintah Belanda belum dapat melakukan banyak hal karena pada tahun 1962 terjadi konfrontasi dengan Indonesia dan mulai 1 Oktober 1962, secara resmi kekuasaan Belanda di Irian Barat diserahkan kepada UNTEA. UNTEA lalu menyerahkan tanggung jawab Papua (pada waktu itu Irian Barat) kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dengan kesepakatan bahwa pada tahun 1969 nanti, masyarakat Papua boleh memilih untuk tetap tinggal di bawah Pemerintah Indonesia atau untuk menjadi negara independen.

Papua Dalam Bingkai NKRI

Sejak penyerahan tanggung jawab Papua dari UNTEA kepada Indonesia, maka pemerintah Indonesia mulai melakukan kebijakan pembangunan pada berbagai sektor di Papua, terutama pendidikan.

Pemerintah menaruh seorang KPS di Tiom. Peran organisasi gereja turut membantu kelancaran program pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan buta huruf. Pada 1963 didirikan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Gereja-Gereja Injili (YPPGI). Yayasan ini merupakan gabungan dari 7 organisasi gereja di Papua yaitu ABMS, C&M.A, GKI, Gereja Katolik, UFM, APCM dan RBMU. Usaha pertama yang dilakukan oleh YPPGI adalah mendirikan sekolah buta huruf di berbagai daerah pelayanan gereja dan mendorong laki-laki dan perempuan Lani untuk bersekolah. Selanjutnya mengikuti pendidikan sekolah Dasar di Tiom. Para murid SD tersebut berasal dari kampung-kampung orang Lani, baik yang dekat maupun yang jauh.

Tahun 1967, tiba di Tiom keluarga Pdt.Yoseph Kaya Karechy beserta istrinya Lydia Karechy. Mereka dipercaya oleh gereja Baptis untuk membuka sebuah SMP berasrama di Tiom. Bersama mereka turut serta 25 anak Paniai yang akan bersekolah di SMP tersebut. Ketika tiba di Tiom, sudah ada Sekolah Dasar yang siswanya telah berada di kelas 5. Dalam tahun 1967, yayasan YPPGI membuka SMP di Tiom.SMP ini merupakan SMP pertama di daerah orang Lani. Murid sekolah tersebut diasramakan, karena ada yang berasal dari kampung –kampung yang jauh. Angkatan pertama SMP YPPGI Tiom berhasil menamatkan pendidikannya pada tahun 1970, Bersamaan dengan itu dibuka Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Tiom. Pdt.Yoseph Kaya Karachy diangkat sebagai kepala sekolah tersebut. Murid SPG datang dari berbagai daerah, terutama dari daerah pesisir Papua. Setelah tamat pendidikan guru, ada yang langsung bekerja sebagai guru, tetapi ada juga yang melanjutkan pendidikannya di Universitas Cenderawasih (Lydia Karachi, hasil wawancara 11/4/2016).

Migrasi Orang Lani

Setelah masuknya pemerintah Indonesia di daerah Pegunungan Jayawijaya, sekolah lanjutan mulai dibangun di Wamena, baik SMP maupun SMA. Anak-anak Lani satu demi satu mulai datang bersekolah di Wamena. Banyak dari mereka hanya mampu menamatkan pendidikan

sampai SD saja, karena ketiadaan biaya untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Tahun 1980-an, sekitar 20 orang Lani dari Gereja Baptis daerah Pegunungan Tengah Papua, dibawah pimpinan Pdt Huwae, turun ke Jayapura dengan menggunakan pesawat MAF. Selanjutnya mereka bergabung dengan peserta dari Gereja Baptis lainnya yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seminar pertumbuhan gereja. Rombongan yang berjumlah 150 orang tersebut kemudian berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kapal Pelni Umsini. Kapal berangkat dari Jayapura menuju Biak-Manokwari-Sorong-Manado-Ternate-Makassar-Surabaya dan Jakarta. Menurut kesaksian Pdt.Huwae, Nick Yigibalom terus memandang lautan. Tidak ada rasa takut walau baru pertamakali naik kapal laut. Raut wajahnya hanya menampakkan kekaguman dan keheranan. Pdt. Huwae lalu bertanya kepadanya bagaimana kapal ini bisa sampai tujuan tanpa tahu arah mana yang dilewati, Nick Yigibalom berpikir sejenak dan menjawab, yo bagaimana ya. Itulah sebenarnya pertanyaan yang dari tadi dipikirkannya. Pdt, Huwae lalu menjawab pertanyaannya sendiri, bahwa kapal memiliki kompas yang dapat membawa kita sampai ke tujuan. Lebih lanjut Pdt Huwae mengatakan bahwa pada 1990-an ketika ia menjabat sebagai Ketua STT Babtis Kota Raja, Gereja Baptis telah mengirim dua orang mahasiswanya untuk melanjutkan pendidikannya di Manado. Mereka berangkat dengan menggunakan kapal. Kapal menjadi alat transportasi utama yang umum digunakan orang Papua diera-1960-an hingga akhir 1990-an. Jalur pelayaran yang sudah dirintis oleh Belanda sebelumnya, menjadi rute pelayaran kapal-kapal di Papua (Pdt.Huwae, hasil wawancara pada 7-4-2016).

Melkianus Manggaprow adalah salah satu guru-guru negeri yang dikirim ke Pegununan Tengah Papua pada 1980-an untuk mengajar di SMP negeri Tiom. Menurutnya tidak banyak anak Lani yang melanjutkan pendidikan ke SMU di Wamena karena tidak ada biaya. Anak-anak yang bersekolah keluar dari Lani seperti dari Tiom, Magi dan daerah lainnya biasanya adalah anak yang orang tuanya pegawai negeri atau anak

kepala suku dan anak orang kaya di kampungnya. Kondisi geografis juga mempengaruhi jumlah anak-anak yang bersekolah di Wamena. Jarak tempuh cukup jauh dan hanya dapat dilakukan dengan berjalan kaki. Pada waktu itu belum ada jalan tembus yang menghubungkan Wamena ibukota Kabupaten Jayawijaya dengan distrik-distrik di daerah bagian barat. Praktis anak-anak maupun pegawai yang akan mengurus sesuatu ke Wamena harus berjalan dari pagi hingga tiba di Wamena menjelang malam. Kondisi ini yang menyebabkan anak-anak Lani yang melanjutkan pendidikan ke Jayapura atau disekolahkan pihak gereja ke luar Papua seperti ke Pulau Jawa, dapat dihitung.

Sejak 1980-an beberapa anak Lani yang bersekolah di luar Papua turut tergabung dalam ikatan mahasiswa Papua; dan untuk mendukun kelancaran studi mereka, pemerintah Provinsi Papua membangun asrama-asrama mahasiswa Papua di beberapa kota studi tempat anak-anak Papua menuntut ilmu. Diera 1980-1990-an umumnya anak-anak Lani yang bermigrasi akibat pendidikan memilih Menado sebagai tujuan studi. Kondisi ini dilatar belakangi jarak yang dekat dan mudah ditempuh dengan kapal serta banyaknya anak Papua dari suku lain yang berstudi di Manado. Disamping alasan tersebut, ternyata sejak 1980-an banyak anak-anak Papua dari Pegunungan Tengah (termasuk orang Lani) yang menjadi anak angkat orang Menado di Wamena. Banyak pendatang Menado yang membawa mereka ke Menado untuk tinggal disana. Terlebih pada 1990-an, ketika JB.Wenas menjadi Bupati Kabupaten Jayawijaya, migrasi akibat pendidikan pada orang Lani semakin terbuka,. Program peningkatan Sumber Daya Manusia Pegunungan Tengah Papua, menjadi prioritas utama disamping pembangunan infrastruktur dan ekonomi. JB.Wenas, memberikan beasiswa kepada anak-anak Papua dari Pegunungan Tengah yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke luar Papua atau untuk mengikuti pelatihan keterampilan tertentu seperti pertukangan (Abisay Kogoya,Wawancara pada 3 November 2016)

Adanya anak-anak Papua yang melanjutkan studi ke kota-kota besar di Indonesia, menjadi magnet meningkatnya arus migrasi anak

Papua untuk bersekolah di luar Papua. Disamping karena dianggap bergengsi, juga karena banyaknya pilihan jurusan yang dapat diambil. Arus migrasi ini berkembang pesat sejak Papua ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang RI No, 21 tahun 2001. Dana otsus yang melimpah serta pemekaran dimana-mana, termasuk pemekaran Kabupaten Jayawijaya, menyebabkan masing-masing daerah pemekaran memprioritaskan SDM putra daerahnya sebagai pegawai pemerintah kabupaten dan pejabat di daerah baru tersebut. Kondisi ini berdampak pada peningkatan ekonomi pegawai asli Papua . Banyak dari para pegawai di kabupaten pemekaran yang kemudian menyekolahkan anak-anak mereka ke luar Papua. Anak-anak Pegunungan Tengah Papua kemudian tergabung dalam ikatan Mahasiswa Pegununan Tengah Papua, termasuk di dalamnya mahasiswa dari suku Lani atau orang Lani. Ada juga anak-anak Lani yang bersekolah di provinsi lain bukan karena biaya pemerintah atau karena orang tuanya pegawai. Namun tergerak karena arus modernisasi dan dampak pemekaran. Salah satunya adalah Tatien Kogoya. Ia berangkat ke Jawa dengan menggunakan kapal laut. Biaya kuliahnya ditanggung oleh orang tua yang bukan pegawai, tetapi termasuk orang kaya di daerahnya. Setelah menuntut ilmu beberapa tahun di Jawa, ia kembali ke Papua dan sekarang bekerja di salah satu bank di Jayapura. Menurutnya bila tiba masa liburan terutama liburan Natal, anak-anak Lani yang tidak memiliki cukup uang untuk pulang ke Papua, terpaksa merayakan natal bersama teman-teman senasib di tempat kos. Ada juga yang kemudian mencari tambahan uang kuliah dengan menjadi satpam (T.Kogoya, Wawancara, 25-3-2016). Buah dari hasil studi di provinsi lain atau hanya sekedar berlibur di daerah lain antara lain peningkatan SDM dan perkawinan dengan suku bangsa lain seperti dengan perempuan Jawa, Ambon, Manado dan lain sebagainya (Beni Wenda,Salah satu kerabat Bupati Tolikara, wawancara, 2-2-2016)

Penutup

Migrasi orang Lani dari Pegunungan Tengah Papua ke luar Papua, sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Umumnya karena faktor pendidikan, yang menyebabkan mereka harus tinggal di provinsi lain di Indonesia selama beberapa tahun. Pada era 1980-1990-an, transportasi utama yang digunakan untuk menghubungkan Papua dengan provinsi lainnya adalah dengan kapal laut. Jalur kapal ini sudah terlebih dahulu dirintis oleh Belanda ketika berkuasa atas Papua. Setelah adanya otsus dan pemekaran daerah, sejak tahun 2001, gelombang-gelombang migrasi orang Lani ke luar Papua untuk studi semakin meningkat. Mereka tidak saja menggunakan kapal, tetapi juga pesawat udara.

Luasnya lautan tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menuntut ilmu atau bekerja di provinsi lain. Transportasi laut dapat menghubungkan Pulau Papua dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Dengan demikian, laut menjadi penghubung yang mengintegrasikan orang Lani yang tinggal di Pegunungan Tengah Papua dengan suku bangsa lainnya sebagai bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hayward.1980. The Dani of Irian Jaya Before and After Conversion, Regions Press.

Koentjaraningrat, dkk. 1993. Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk.

Lapian A.B. 1992. Sejarah Nusantara Sejarah Bahari, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa, Jakarta, Fak.Sastra UI.

Lieshout Frans OFM Pastor. 2009. Sejarah Gereja Katolik Di Lembah Baliem Papua, Kebudayaan Baliem Tanah Subur Bagi Benih Injil, Sekretariat Keuskupan Jayapura

Muller Kal. 2009. Dataran Tinggi Papua, DW. Books

Rumbiak Mientje D.E. 1993. Kebudayaan Dani Barat, Etnografi Irian Jaya.

Schoorl Pim, 2001. Belanda Dl Irian Jaya, Amtenar Di Masa Penuh Gejolak 1945-1962, Perwakilan Kitlv Jakarta, Penerbit Garba Budaya.

Smith, E.C.Dr. 2009. Perkembangan Gereja-Gereja Baptis, Seminari Theologia Baptis Di Indonesia, Jogyakarta, Pustaka Therasia.

Website:

Dominggus Mampioper,Rubrik Seni, Ekonomi Barter Kerang,http:// Tabloid Jubi.com, 17 Januari 2015, diakses tangal 7 April 2016.

PULAU SEKATUNG: POTENSI KEMARITIMAN DAN PROBLEMATIKANYA[1]

Nuraini[2]

Pendahuluan

Indonesia yang wilayahnya sangat luas terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Dari hasil penelitian Dinas Hydro-Oceanografi TNI-AL menyebutkan hingga tahun 2002 Kepulauan Indonesia terdiri enam buah pulau besar dan 17.508 pulau kecil.[3] Dari sejumlah pulau tersebut, sebanyak 5.707 pulau telah memiliki nama dan 11.801 pulau belum bernama (Muhjiddin, 1993:18).

Sedangkan, menurut Departemen Dalam Negeri pada 2005, menyebutkan bahwa baru 7.870 pulau saja yang sudah mempunyai nama, sisanya sebanyak 9.634 pulau belum mempunyai nama. Sedangkan, menurut data terbaru yang dimiliki Departemen Kelautan dan Perikanan pada 2005, sekitar 8000-an pulau-pulau di Indonesia yang telah bernama, dan sisanya 9.504 pulau belum memiliki nama (Kompas, 17 November 2005).

---

[1] Disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian Peneliti BPNB Se-Indonesia di Makassar pada 25-28 April 2016

[2] Staf Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau

[3] Untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mencegah lepasnya pulau kecil dari wilayah NKRI yang merujuk kepada kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia akhir tahun 2002. Departemen Dalam Negeri telah mempersiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang batas wilayah negara.

Keberadaan Indonesia dengan seluruh perairan yang dimilikinya dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisahkan serta dihayati sebagai suatu tanah air (Daldjoeni, 1991: 200). Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia bertetangga dengan beberapa negara. Di sebelah selatan Indonesia bertetangga dengan Australia, di sebelah timur bertetangga dengan Papua Nugini, dan di sebelah utara dengan Singapura, Malaysia, Thailan, Philipina dan Indocina. Hampir seluruh negara tersebut di atas merupakan negara pantai yang memiliki wilayah perairannya sendiri.

Tentang batas-batas wilayah laut, pada 1957 Deklarasi Juanda menetukan 12 mil. Kemudian pada 1980 Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) selebar 200 mil diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia (Daldjoeni, 1991:207). Pada zone tersebut segala sumber daya hayati maupun alami lain yang ada di bawah permukaan laut, di dasar laut dan di bawah laut menjadi hak eklusif negara Republik Indonesia. Letak Indonesia yang strategis karena terletak pada posisi persilangan dan dikaitkan dengan sumber daya alamnya, akan berpengaruh terhadap kehidupan bangsa kita dari masa ke masa, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Keadaan seperti itu mudah mendatangkan ancaman yang datang dari luar[4].

Pulau Sekatung merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Pulau yang berbatasan langsung dengan negara Vietnam ini sesungguhnya merupakan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat mencuat ke permukaan, apabila sejak awal masalah keberadaan pulau tersebut tidak ditangani dengan baik dan terencana. Oleh karena itu, Pulau Sekatung dan potensi kemaritimannya perlu mendapat perhatian, dan harus dijaga serta

[4] Menurut data terbaru Departemen Kelautan dan Perikanan, terdapat 92 pulau terluar di Indonesia yang berbatasan paling kurang sepuluh negara tetangga (Singapura, Malaysia,Philipina, Thailand, Vietnam, India, Timor Leste, Republik Palau dan Australia). 67 pulau (28 pulau berpendudk dan 39 pulau belum berpenduduk) berbatasan langsung dengan negara tetangga dan 12 diantaranya sangat rawan dengan penguasaan efektif negara lain, dan dua diantaranya berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pulau Nipah, dan Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna.

dipelihara keamanannya agar terhindar dari intervesi dan aneksasi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEE) yang telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 1980.

Demensi temporal dalam penulisan ini adalah mulai pada 1975 hingga masa sekarang. Tahun 1975 merupakan tonggak sejarah dengan kedatangan pengungsi Vietnam di Pulau Sekatung setelah jatuhnya Saigon, dan sejak itu pula Pulau Sekatung mulai disebut-sebut. Sedangkan dimensi spasialnya meliputi wilayah Kepulauan Riau .

Metode yang digunakan dalam penulisan sejarah Pulau Sekatung ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa pada masa lampau melalui empat tahapan kerja, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran) dan historigrafi (penulisan kisah sejarah).

Sejarah Pulau Sekatung

Pulau Sekatung adalah sebuah pulau kecil, terletak di bagian utara Kepulauan Natuna, dan termasuk dalam gugusan paling utara dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di laut Cina Selatan, dan merupakan bagian dari gugusan pulau yang berada di bagian terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pulau yang luasnya 20 Km^2 ini, secara adminstratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Sekatung yang sudah berpenghuni ini terpisah dari Pulau Laut, berada di sebelah utara Pulau Laut dan berbatasan langsung dengan negara Vietnam. Jarak dari Desa Tanjung Pala Pulau Laut ke Pulau Sekatung sekitar 65 mil, sedangkan jarah dengan negara Vietnam di ukur dari pinggir pantai adalah 333,24 mil. Pulau Sekatung mempunyai dua titik dasar yaitu TD.030 B dan TD.030 D, dan dua titik refrensi yaitu TR. 030 A dan TR..030.

Peta Pulau Sekatung

Pulau Sekatung terlihat dari Pantai Desa Tanjug Pala Pulau Laut

Pulau Sekatung

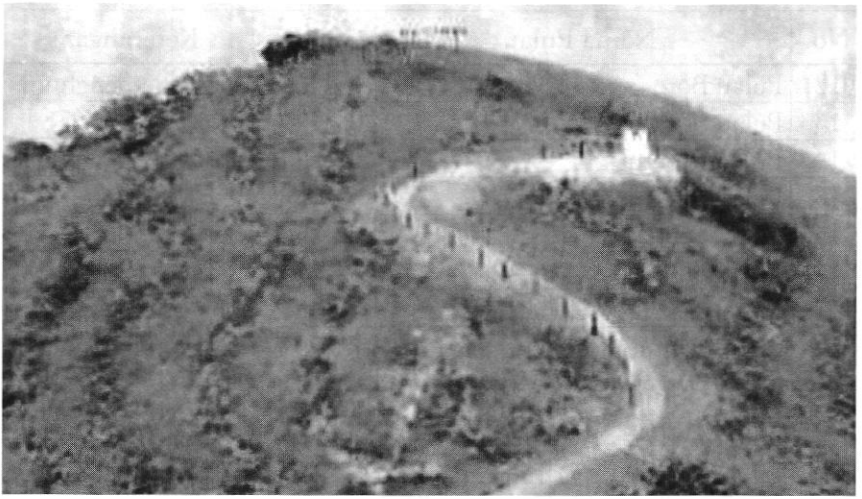

Jalan yang dibangun menuju bukit Pulau Sekatung

Berdasarkan kondisi fisik, Pulau Sekatung berbentuk bukit kecil dengan ketinggian sekitar 5-6 meter di atas permukaan laut. Pantainya berbatu dengan patahan karang pada sekitar pulau tersebut.

Pulau Sekatung adalah salah satu dari 19 pulau terluar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 19 pulau tersebut adalah:

Nama-nama pulau terluar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nama Pulau	Luas	Keterangan
1.	Pulau Hiu Kecil atau Tekong Hiu	0,5 ha	Tidak berpenghuni
2.	Pulau Karimun Kecil	8,10 ha	Berpenghuni
3.	Pulau Nipah	10 ha	Tidak berpenghuni
4.	Palempong	1 ha	Tidak berpunghuni
5.	Pulau Batu Berhenti	90 M^2	Tidak berpenghuni
6.	Pulau Nongsa	1 ha	Tidak berpenghuni
7.	Pulau Tokong Malang Biru	1 ha	Tidak berpenghuni
8.	Pulau Damar	0,25 ha	Tidak berpenghuni
9.	Pulau Mangkai	30 ha	Tidak berpenghuni
10.	Pulau Tokong Nenas	1 ha	Tidak berpenghuni
11.	Pulau Tokong Berlayar	1 ha	Tidak berpenghuni

No.	Nama Pulau	Luas	Keterangan
12.	Pulau Boro	1 ha	Tidak berpenghuni
13.	Pulau Semiun	8 ha	Berpenghuni
14.	Pulau Sebetul	30 ha	Tidak berpenghuni
15.	Pulau Sekatung	20 Km^2	Berpenghuni
16.	Pulau Senoa	50 ha	Berpenghuni
17.	Pulau Subi	200 Km^2	Berpenghuni
18.	Pulau Kepala	3 ha	Tidak berpenghuni
19.	Pulau Sentut	3 ha	Tidak berpenghuni

Sumber Data: Pemprov. Kepulauan Riau 2014

Pulau sekatung sebelum di kenal oleh masyarakat luas, masyarakat Pulau Laut menyebutnya dengan sebutan Pulau Setakong. "Se" artinya "satu" dan "Kong" artinya "Datuk", yang berarti satu datuk. Menurut masyarakat Pulau Laut, orang pertama datang dan mendiami pulau ini adalah orang dari negara Cina. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan sebuah batu bertulisan Cina. Kemudian, setelah jatuhnya Saigon, beberapa pengungsi Vietnam mendarat di Pulau Sekatung dan Pulau Laut karena jaraknya sangat dekat dengan negara Vietnam. Sejak itulah masyarakat luas mulai mengenalnya, dan menyebut pulau kecil itu dengan sebutan "Pulau Sekatung" . Tetapi, masyarakat Pulau Laut hingga kini tetap menyebutnya pulau "Setakong".

Sejak kedatangan pengungsi Vietnam di pulau ini, membuat berbagai kalangan warga masyarakat maupun Pemerintah Pusat mulai menaruh perhatian terhadap pulau tersebut. Untuk menjaga keamanan di wilayahnya kemungkinan diduduki oleh pihak lain, maka oleh pemerintah ditempatkan pasukan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Mereka memiliki pos penjagaan di area puncak bukit Pulau Sekatung. Kemudian pada 2007, oleh Pemerintah Kabupaten Natuna membangun lima rumah untuk ditempatkan lima keluarga.

Pemerintah Daerah, merencanakankan di Pulau Sekatung akan dibangun berbagai sarana penunjang yang membawa berbagai keuntungan dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi dan sosial, pertahanan dan

keamanan. Selain itu, pemerintah melalui Departemen Perhubungan telah membangun Sarana Bantu Navigasi Pelayan (SBNP) di pulau ini.

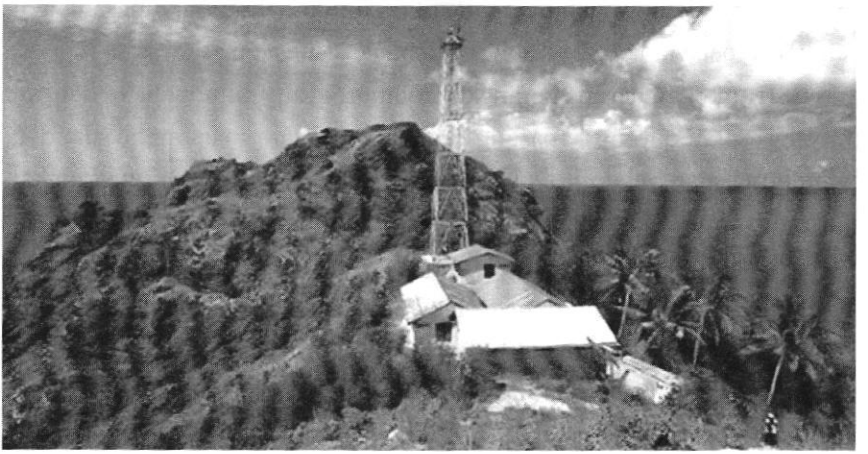

Pos Penjagaan Personil TNI

Potensi Kemaritiman dan Problematikanya

Pulau Sekatung yang berada di wilayah Kepulauan Riau, termasuk kawasan yang ramai dilalui kapal asing, seperti tanker, kapal cargo, kapal niaga dan kapal tongkang. Kapal yang beroperasi di perairan Pulau Sekatung sekitar 20 unit perhari. Untuk itu, kedepan ketersedian air bersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu disediakan di pulau ini.

Sebagai pulau yang dikelilingi oleh lautan, Pulau Sekatung memiliki sumber daya laut yang luar biasa. Akan tetapi, potensi ini hingga sekarang belum dikembangkan secara optimal. Pengolahan sumber daya laut belum dikelola secara profesional. Para nelayan masih banyak yang menggunakan teknologi tradisional dengan kapal-kapal kecil dan sedang.

Melihat letaknya yang demikian, pulau ini layak dikembangkan menjadi wisata bahari, pelabuhan transit kapal Internasional, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat memberikan devisa yang besar bagi negara dan meningkatkan pendapat masyarakat setempat.

Agar pulau ini tidak di kliem oleh negara lain, maka Pemerintah Daerah membangun mercusuar, karena fungsi mercusuar sangat penting

keberadaanya dalam dunia pelayaran. Selain sebagai alat bantu pelayaran, juga menjadi penanda yang menegaskan bahwa pulau itu sah milik Indonesia. Dalam rangka mengamankan Pulau Sekatung, dipasang alat pembantu pelayaran yang disebut *automatic idenfication system*.

Instrumen itu berupa perangkat komputer yang dihubungkan dengan transmitter radio, yang terpasang di menara-menara suar, rambu suar dan pelampung suar. Selain itu, alat tersebut dilengkapi dengan seperangkat alat radio pantai. Pada layar komputer utama, terpampang gambar peta perairan sekitar Laut Cina Selatan dan tempat-tempat yang dipasangi rambu napigasi ditandai dengan lambang-lambang tertentu yang terus berkedip. Dengan alat ini diharapkan pelanggaran wilayah teritorial Indonesia oleh kapal asing dapat diketahui, dan tindak kejahatan seputar Laut Cina Selatan dapat di deteksi oleh aparat keamanan terkait.

Posisi Pulau Sekatung yang merupakan pulau terluar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan berhadapan langsung dengan negara Vietnam, menjadikan pulau ini cukup penting, terutama dalam kaitannya dengan perbatasan negara Republik Indonesia dan Vietnam. Di Pulau Sekatung ini terdapat titik refrensi dan titik dasar yang dipergunakan dalam penarikan batas Indonesia-Vietnam. Namun disinyalir, titik referensi dan titik dasar di Pulau Sekatung yang menjadi basis pengukuran dan penetapan garis basis Indonesia-Vietnam telah hilang. Isu hilangnya titik tersebut telah menimbulkan kekhawatiran akan berubahnya posisi median line antara Indonesia dengan Vietnam. Jika Vietnam tetap menarik garis pangkal dari garis batas berdasarkan titik terluarnya yang baru, maka dapat diduga konflik terbuka menyangkut perbatasan kedua negara akan timbul ke permukaan, sehingga bukan tidak mungkin sengketa kepemilikan Pulau Simpadan dan Pulau Ligitan dengan Malaysia akan terulang.

Saat ini landas kontinen Indonesia masih tumpang tidih dengan landas kontinen Vietnam di Laut Cina Selatan, tetapnya di sebelah utara Pulau Natuna. Pada tahun 1978, Indonesia dan Vietnam telah melakukan perundingan tentang penetapan garis batas landas kontinen, dalam

bentuk pertemuan tidak resmi untuk merundingkan segi teknis penetapan garis batas tersebut. Tetapi perundingan masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam hingga sekarang belum seutuhnya jelas, dan belum mencapai kesepakatan. Vietnam telah beberapa kali menyampaikan usul, namun dasar pengukurannya berubah-ubah. Dalam masalah ini, Indonesia tidak banyak berubah dengan memakai pedoman median line seperti ketentuan yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut 1982.

Tantangan dan Harapan

Pulau Sekatung yang memiliki kekayaan alam seperti minyak, gas, dan perikanan yang cukup besar, memberikan berbagai peluang maupun ancaman dari luar. Salah satu ancaman yang serius adalah ilegal fishing oleh nelayan asing, terutama dari Thailand. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan oleh aparat dan kondisi alat tangkap nelayan yang belum mampu menjangkau perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang menyebabkan perairan tersebut dikuasai oleh nelayan asing.

Menurut Andiyanto dkk, (2007) permasalahan yang dihadapi pulau-pulau kecil terluar sebagai wilayah perbatasan, antara lain;

- Belum adanya kepastian sebagian garis batas laut dengan negara tetangga
- Maraknya pelangaran hukum yang terjadi di wilayah perbatasan seperti penyeludupan, pencurian ikan, perampokan.
- Terbatasnya prasarana dan saran untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan khususnya terhadap pulau-pulau yang terpencil, sulit dijangkau dan tidak berpenghuni.
- Ukuran pulau di perbatasan umumnya pulau-pulau yang sangat kecil sehingga sangat rentan terhadap kerusakan baik oleh alam maupun manusia.
- Belum singkronya pengolahan perbatasan, baik mencakup kelembagaan, program maupun kejelasan kewenangaan.
- Belum ada peraturan perundangan yang jelas dan menyeluruh dalam pengelolaan pulau-pulau terluar.

Kedekatan Pulau Sekatung dengan negara tetangga seperti; Vietnam, dan Thailand harus mendapat perhatian dan pengawasan serius oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah, diantaranya; hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia, hilangnya pulau secara kepemilikan akibat berubah status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia serta hilangnya secara sosial dan ekonomi akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut.

Berkaca pada peristiwa tersebut, maka setidaknya ada dua permasalahan utama yang harus segera diatasi. Pertama, belum selesainya penetapan dan peraturan yang jelas mengenai batas wilayah pulau-pulau terluar di Indonesia. Kita harus ingat bahwa negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat tidak tunduk pada Konvensi UNCLOS (*United Nation Convention on Law of The Sea*) 1982, sehingga batas perairan yang kita tentukan pun masih bisa berpotensi untuk dilanggar oleh negara lain kalau itu tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kedua, belum adanya wewenangan yang jelas dalam pengolahan wilayah perbatasan. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya keterlibatan publik terkait dengan isu-isu di perbatasan.

Penutup

Dengan hilangnya beberapa pulau di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut, beralihnya kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia hendaknya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia yang menamakan dirinya negara maritim, bahwa sekecil maupun sejauh apapun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan.

Keberadaan Pulau Sekatung yang berbatasan langsung dengan negara Vietnam, harus benar-benar dicermati sebagai hilangnya eksistensi negara atas wilayah kedaulatannya diperbatasan, mengingat pentingnya dan strategisnya wilayah perbatasan bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karenanya, apapun cara yang ditempuh oleh berbagai pihak terutama otoritas keamanan di wilayah perbatasan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan keberadaan Pulau Sekatung harus diperbaiki dan dipelihara agar eksestensi negara tetap bertahan di daerah tersebut. Bukan hanya itu, keberadaan Pulau Sekatung sebagai salah satu pulau terluar negara Republik Indonesia di perairan Laut Cina Selatan yang ramai oleh lalu lintas kapal-kapal niaga yang keluar masuk, atau hanya sekedar lewat, sebaiknya dimanfaatkan untuk memperoleh nilai lebih dimasa-masa yang akan datang, dan bukan hanya sebatas pulau kecil terluar di wilayah Indonesia.

Posisi Pulau Sekatung yang berada di Laut Cina Selatan harus dicermati, apabila ada niat buruk dari negara-negara yang berhampiran dengan pulau ini. Apalagi hingga kini, Vietnam belum juga mau menerima formula yang ditawarkan RI menyangkut pembicaraan perbatasan antar kedua negara.

Walaupun perhatian lebih harus diberikan kepada pulau Sekatung, namun kita jangan melupakan pulau-pulau kecil sepanjang perbatasan yang jumlahnya ratusan di perairan Kepulauan Riau, khususnya di wilayah teritorial Kota Batam. Pulau Takong, Pulau Kepala Jernih, Pulau Moi-Moi, Pulau Tolop dan lain-lain bagaimanapun harus mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pemerintah memberdayakan masyarakat pesisir yang ada di sepanjang wilayah perbatasan yang dimaksud. Sebab bukan rahasia lagi jika selama ini terjadi "jurang perbedaan" antara masyarakat "hinterland" dengan saudaranya di Kota Batam yang serba berlebihan, apalagi jika dibandingkan dengan negara Singapura.

Penamaan pulau-pulau diperbatasan harus segera dilakukan oleh pemerintah setempat bekerjasama dengan instansi terkait seperti

Navigasi, TNI-Al, Bakosurtanal, bahkan Perguruan Tinggi dan tentu saja dengan tidak melupakan keterlibatan penduduk setempat, karena merekalah yang taahu tentang daerahnya. Dan, dari mereka pulalah segala informasi menyangkut sejarah pulau, latar belakang penduduknya sebagainya dapat diperoleh.

Mendapat predikat sebagai negara maritim memang sangat membanggakan, namun jauh lebih berarti lagi jika keberadaan pulau-pulau dan perairan di seluruh wilayah nusantara dijaga dan dijamin keamanannya oleh segenap komponen, karena hanya dengan cara itulah kebanggaan tersebut dapat tetap dipelihara oleh seluruh rakyat Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.508 buah pulau, sehingga kita layak disebut negara kepulauan terbesar di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Atje Misbach Muhjiddin. 1993. *Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia hak Lintas Kapal Asing*. Penerbit Alumni. Bandung.

Gafnesia, Dahsyat. 2005. *Selat Philip: Perairan "Bergejolak" di Kepulauan Riau*. Naskah BKSNT Tanjungpinang.

Hall. D.G.E. 1997. *Sejarah Asia Tenggara*. Terjemahan Dewan Bhasa dan Pustaka, Kementerian Pengajaran Malaysia, Kuala Lumpur.

Lutfi, Muchtar. 1977. *Sejarah Riau*. Pemda Riau. Pekanbaru

Mubyarto, dkk. 1993. *Riau Menatap Masa Depan*. Adytya Media. P3PK. UGM. Yogyakarta.

Muliono, Heri. 2001. *Merajut Batam Masa Depan*. Batam.

N. Daldjoeni. 1991. *Dasar-dasar Geografi Politik*. Pt. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Kartodirjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Depdikbud. Jakarta.

Kompas, 28 Desember 2005.

Batam Pos. 16 Juli 2003.

Tribum Batam. 20 Desember 2005.

Suwardi, MS. 1991. *Budaya Melayu dan Perjalanan Menuju Masa Depan*. Yayasan Penerbit. MSI Riau. Pekanbaru.

SERANGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP KUALA BATU DI ACEH BARAT DAYA (6 FEBRUARI 1832)[1]

Hasbullah[2]

Abstrak

Kuala Batu secara administrasi berada di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Letaknya di bagian barat Pulau Sumatera atau pesisir barat selatan Aceh, sekitar 360 km sebelah tenggara ibukota Provinsi Aceh, Banda Aceh. Daerah ini dulunya salah satu pusat produksi dan perdagangan lada yang ramai didatangi kapal pedagang internasional dari Eropa dan Amerika. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengapa Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang Kuala Batu pada 6 Februari 1832. Penelitian sejarah lokal ini disusun secara deskriptif analisis melalui observasi (sumber primer dan sekunder) untuk memperoleh data dan fakta yang relevan, kemudian historiografinya disusun secara kronologis dengan interpretatif. Hasil penelitian menjelaskan beberapa faktor penyebab serangan Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Kuala Batu yang dipicu oleh penyerangan oleh 'bajak laut' Kuala Batu terhadap kapal dagang "Friendship" milik pengusaha sekaligus senator. Serangan ini dilawan oleh orang-orang Kuala Batu yang dipimpin Sidi Muhammad, Teuku Di Lama, Keuchik Dorahman, dan Cek Abdullah dari empat buah benteng di Kuala Batu. Dampak serangan, 300 penduduk Kuala Batu tewas dan kota ini hancur.

Kata Kunci: Serangan, Amerika Serikat, Kuala Batu, Aceh Barat Daya.

[1] Disampaikan dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian BPNB se- Indonesia di Makassar pada 25-28 April 2016.

[2] Staf Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Jl.Twk. Hasyim Banta Muda No.17 Banda Aceh 23123, Email:bulahbpsnt@yahoo.com

Pendahuluan

Lada adalah komoditas perdagangan dari Sumatera yang menurut beberapa sumber sangat digemari di Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok (Cina) pada masa lalu. Meskipun harganya separuh dari rempah-rempah, namun tetap menjadi ekspor yang sangat penting dari Nusantara bahkan Asia Tenggara. Tanaman ini pada mulanya sudah ditemukan sebagai barang dagangan di Kerala, pantai Malabar di India Barat Daya, yang pada saat itu dikenal oleh orang Arab dan Eropa sebagai "negeri lada" (Reid,1992:9). Kapan dimulainya pembudidayaan lada di Sumatera sampai saat ini belum jelas. Laporan Marcopolo (1292), dan Ibnu Batutah (1355) sewaktu mengunjungi Sriwijaya tidak menyebutkan adanya komoditas lada sebagai barang dagangan dari kerajaan tersebut. Sumber dari Cina juga menyebutkan, "bahwa ada orang yang mengatakan lada kebanyakan dari Malabar dan komoditas lada yang dibeli oleh pedagang asing dari Jawa berasal dari sana" (Reid,2005:180). Dari ketiga sumber tersebut tidak menunjukkan Sriwijaya sebagai produsen lada. Namun tidak berarti Sumatera tidak menghasilkan lada, karena pada abad ke-13, Pasai dan Pidie telah berkembang menjadi kota perdagangan internasional dan salah satu komoditas ekspor utamanya adalah lada (Reid,2005:180).

Abad ke-16, posisi Malaka telah menggeser kedudukan Pasai dalam perdagangan internasional karena letaknya yang cukup strategis dan lebih menguntungkan dibandingkan Pasai. Posisi inilah yang membuat Portugis tertarik menguasai Malaka, dan kemudian berhasil diduduki oleh Alfonso d'Albuquerque pada 1511. Dengan merebut Malaka, Portugis menguasai Ormuz di Laut Merah, dan Goa di India. Namun hal ini yang kemudian membuat Malaka menjadi dihindari oleh pedagang muslim untuk berdagang. Akibatnya Malaka kemudian semakin merosot, dan tidak pernah meraih lagi kejayaannya (Reid,2005:180; Rulofsz,1962:172). Abad ke-17, perdagangan di Malaka dikuasai oleh tiga kekuatan, yaitu; Aceh, Johor, dan Portugis. Johor kemudian bekerjasama dengan Belanda, dan Malaka kemudian dikuasai Portugis. Hal ini membuat

Aceh menyerang Johor, dan sebagian keluarga Sultan Johor ditawan. Selain itu, Aceh juga menghancurkan benteng *Vereenigde Oost-Indische Compagne* (VOC) di Johor pada 1613. Johor sudah berkali-kali diserang Aceh, namun Johor dan Portugis tidak pernah menyerang balik ke Aceh. Tekanan militer Aceh baru berhenti, setelah mengalami kekalahan telak di depan pelabuhan Malaka (Iskandar,2005:183).

Setelah Malaka dikuasai Portugis, pantai barat Sumatera mulai beralih menjadi jalur perdagangan yang ramai dari perdagangan internasional pada abad ke-16. Di pantai barat Sumatera saat itu hegemoni kerajaan Aceh masih sangat kuat secara *de facto* sehingga menguasai perdagangan lada di Sumatera Barat dan produksi emas di Salida (Said,tt:337). Dominasi Kerajaan Aceh di pantai barat Sumatera sampai ke Bengkulu.

Pada abad ke-18, setelah Sultan Iskandar Muda dan Sultan Iskandar Tsani mangkat, hegemoni Aceh diperkirakan mulai memudar, terlebih pada masa Kesultanahan Tajul Alam Safiatuddin Syah. Hal ini terjadi karena persekutuan antara Belanda dan Melayu berusaha menghapus pengaruh Aceh pada 1663 di sana. Akibatnya, Aceh mengalami banyak kerugian karena vasal-vasal (daerah-daerah *ranto*) yang sebelumnya setia menyetor upetinya kepada perwakilan-perwakilan Kesultanan Aceh di pesisir barat Sumatera telah banyak yang mengadakan hubungan perdagangan sendiri-sendiri dengan para pedagang asing secara ilegal (Said,tt:337).

Belanda mengambil kesempatan tersebut untuk menguasai pantai barat Sumatera, namun posisinya tetap saja tidak kondusif karena Kerajaan Aceh 'meskipun hanya di bawah tanah' pengaruhnya masih sangat kuat bersemai di sana. Kerajaan Aceh terus menyerang posisi Belanda untuk mempertahankan statusnya di sana hingga tahun 1670, namun karena saat itu Aceh juga harus mempertahankan dua *front*, yaitu di pantai barat dan juga pantai timur Sumatera. Sedangkan pada saat yang bersamaan, Aceh juga masih berusaha mempertahankan eksistensi hingga ke negeri-negeri seberang di Malaka. Kesempatan tersebut

dipergunakan oleh Belanda untuk terus menanamkan pengaruhnya di pantai barat Sumatera hingga kemudian dapat menguasai pertambangan emas di Salida (said,tt:337).

Akhir abad ke-19 dan menjelang awal abad ke-20, badan usaha perdagangan milik Belanda*VOC* yang mempunyai kekuasaan politik dan militer mengalami keruntuhan akibat korupsi yang merajalela. Pada saat yang hampir bersamaan, kerajaan Aceh juga sedang kritis karena mengalami masa-masa perang bersaudara dan berbagai konflik internal lainnya di kesultanan. Hal ini membuka kesempatan bagi Belanda untuk terus menanamkan pengaruhnya dan menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari hegemoni Aceh di pantai barat Sumatera.

Pada masa ini pantai barat selatan Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia telah berkembang dalam berbagai aktivitas perdagangan internasional. Teluk Susoh sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-19 merupakan salah satu pusat perdagangan yang ramai (Ahmad,2007:3). Kuala Batu dikenal sebagai pusat perdagangan lada internasional pada masa lalu, namun kemudian kota ini hancur-lebur usai diserang oleh Armada Angkatan Laut Amerika Serikat dengan kapal perang *Potomac* pada 1832. Banyak spekulasi dan argumentasi yang melingkupi peristiwa ini, sehingga perlu ditelusur fakta dan data yang sebenarnya di lapangan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui penyebab peristiwa penyerangan Amerika Serikat terhadap kota pelabuhan yang berada di pesisir barat selatan di Kabupaten Aceh Barat Daya ini dengan segala aspeknya.

Kuala Batu saat ini hanyalah kawasan yang sepi dari segala aktivitas pelabuhan maritim. Lokasinya terisolasi dari segala aktivitas perdagangan maritim dan hanya tersisa sebagai permukiman kecil yang berbentuk desa/*gampong*dan ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Daerah ini hanyalah menyisakan perkampungan kecil nelayan tradisional dan sebagian menyambil sebagai peternak kerbau. Sedangkan di sebagian besar wilayah pedalamannya telah berubah menjadi kawasan

pengembangan sawit rakyat yang difasilitasi secara besar-besaran oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sejak beberapa tahun terakhir (sekitar 2006). Perubahan tata ruang lokasi ini berpengaruh dalam penelusuran sumber, mengingat sulitnya pengumpulan data-data dari struktur dan tinggalan yang tersisa untuk kepentingan interpretasi dalam menghubungkan variabel-variabel tentang peristiwa tersebut dalam historiografi.

Penelitian serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu di Aceh Barat Daya pada 6 Februari 1832dilakukan untukmenginterpretasi variabel-variabel peristiwa dalam rangka penggalian sumber sejarah untuk mengungkap akar permasalahan tersebut. Penelitian ini berusaha menelusuri dinamika perkembangan Kuala Batu sebagai pelabuhan lada yang tercatat dalam lembaran peristiwa sejarah di pesisir barat selatan Aceh pada masa lalu. Faktor-faktor yang menjadi penyebab serangan Amerika Serikat dikaji untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: mengapa Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang Kuala Batu?

Tujuan penelitian berusaha menjelaskan serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu di Aceh Barat Daya pada 6 Februari 1832 dengan segala dinamika yang terkait daripadanya. Deskripsi seperti ini diperlukan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan memori kolektif bangsa sebagai pengalaman masa lampau yang berguna kepada generasimasa kinidan masa yang akan datang sehingga dapat mengambil nilai-nilai positif dari peristiwa masa lalu sebagai pedoman di masa kini dan mendatang.

Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber pengetahuan sekaligus sumbangsaran bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membuat kebijakan terhadap situs sejarah, khususnya untuk menata kembali kawasan bersejarah ini menjadi suatu zona edukasi dan rekreasi yang bernuansa historis, khususnya penelitian, pengembangan dan pemanfaatannya sebagai wisata sejarah dan ziarah ke makam-makam para pemimpin Kuala Batu dan '*graveshewbuntar*' dan makam orang Amerika yang gugur dalam peristiwa tersebut di sana.

Manfaat penelitian adalah menghasilkan satu naskah sejarah lokal berkaitan dengan objek kajian yang diteliti. Secara praktis, peristiwa masa lalu dapat dijadikan pedoman dalam menentukan langkah ke masa depan yang lebih baik, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan bangsa. Manfaat lain penelitian adalah menambah wawasan dan cakrawala historis terhadap perjalanan sejarah bangsa dan negaranya pada masa lampau sebagai spirit dalam pembangunan bangsa sebagai pembentuk jati diri pada saat ini dan masa mendatang.

Secara konseptual Kuala Batu terletak di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini sudah pernah disebut di dalam beberapa referensi,baik lokal maupun asing seperti John Anderson dan Muhammad Said. Namun penelusuran tentang peristiwa serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu perlu dilakukan pengkajian sumber, analisa sumber, dan pengintepretasian sumber ke dalam kajian sejarah yang objektif melalui observasi sehingga akarpermasalahan tersebut bisa diungkap secara *sense of belonging* atau objektivitas sejarah tentang mengapa terjadinya peristiwa serangan tersebut di dalam kerangka dan kurun waktu historis. Peristiwa penyerangan tersebut tentu saja tidak berdiri sendiri-sendiri, namun terkait dengan rangkaian kronologis yang kompleks, maka untuk menguraikannya diperlukanpenelitian mendalam dan komprehensif mengenai fakta dan proses serta dinamika perkembangannya yang diinterpretasikan ke dalam historiografi.

Penelitian dibatasi mengenai serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu di Aceh Barat Daya pada 1832. Peneliti memposisikan peristiwa ini sebagai pokok pembahasan. Ruang lingkup materinya mengurai seputar serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu pada kurun waktu tersebut. Spasial atau kajian lokasi dilakukan di Kuala Batu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Konsepsi "Kuala Batu" merujuk kepada referensi wilayah pada masa lalu, paling tidak saat ini telah melingkupi "kawasan" di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya sekarang, yaitu; Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Babah

Rot, dan Kecamatan Jeumpa.

Temporal atau kajian waktu penelitian adalah 1832, di mana tahun ini telah terjadi peristiwa penyerangan oleh Amerika Serikat terhadap Kuala Batu yang dimulai sejak 5-17 Februari 1832. Disebutkan pada 5 Februari 1832 kapal perang *Potomac* milik Angkatan Laut Amerika Serikat tiba di perairan Kuala Batu dan penyerangan serta penghancurannya mulai dilakukan sejak dini hari pada 6 Februari 1832. Penyerangan tersebut dinyatakan berakhir pada 17 Februari 1832.

Penelitian serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu di Aceh Barat Daya merupakan aspek kajian sejarah lokal. Sejarah lokal adalah sejarah suatu tempat atau lokalitas dengan pembatasan (spasial) yang memuat kisah lampau dari kelompok atau masyarakat yang berada dalamlingkup yang terbatas (Finberg & Skipp,2005:15). Sejarah lokal menjelaskan peranan masyarakatlokal dalam periodisasi sejarah, karena sebelumnya lebih ditonjolkan peran orang asing dalam sejarah Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah dan tidak terlepas dari definisi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia pada masa lampau, mengaitkan dan merekontruksi dalam tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya tulis sejarah. Hasil penulisan secara kontekstual mencoba menerangkan dan memahami peristiwa sebagaimana terjadi (Abdullah, 1990:6). Louis Gottschalk mengatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis jejak rekam masa lampau (Gottschalk,1969:32). Dengan demikian metode penelitian sejarah harus kritis di dalam menggunakan aturan dan prinsip-prinsip ilmu sejarah. Tahap penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu; pengumpulan sumber (primer dan sekunder), verifikasi sumber untuk membuktikan kredibilitas sumber, dan kritik eksternal. Selanjutnya interpretasi berdasarkan analisis dan sintesis, serta histirografi secara deskriptisanalitis.

Penulisan sejarah lokal ini berusaha menguraikan mengapa peristiwa terjadi dengan menggambarkan kejadian tersebut sebagai proses yang

disimpulkan dalam uraian analisis (Kartodirdjo,1992:10). Perkembangan peristiwa dirangkai berdasarkan fakta tentang apa, siapa, kapan, di mana, serta bagaimana. Kemudian disusun secara kronologis variabel sebab-akibat, motivasi, sebagai suatu kompleksitas kejadian-kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Proses pengumpulan sumber dalam menelusuri serta menjelaskan permasalahan dilakukan melalui penelitian sumber primer maupun sekunder di lapangan dan perpustakaan. Sumber-sumber primer dan sekunder diperoleh di lokasi penelitian dan perpustakaan yang ada di Provinsi Aceh; yaitu Perpustakaan BPNB Banda Aceh, Perpustakaan PDIA, Perpustakaan Ali Hasymi, Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Aceh. Hasil penelitian memaparkan latar belakang historis yang menunjukkan kontinuitas dinamika berkaitan dengan peristiwa. Sartono menyebutkan, tugas interpretasi sejarah harus dipusatkan pada kontinuitas pembahasan,karena persoalan-persoalan yang berakar pada masa lampau akanterus berkembang sampai sekarang dan masa yang masa akan datang (Kartodirdjo,1997:134).

Tinjauan Geografis

Kuala Batu terletak di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya secara astronomi terletak pada 3º,05–3º,80 Lintang Utara dan 96º,23'.02'–97º,23'03' Bujur Timur (Ahmad,2007:83; BPS,2005:3). Kabupaten ini memiliki luas 2.334.01 Km^2. Letak geologinya tidak terlepas dari seluruh rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini termasuk di dalam lingkup "*ring of fire*" atau "cincin api" dalam rangkaian pegunungan yang masih muda yang diketahui dengan adanya gejala-gejala geologis seperti gempa bumi dan aktivitas gunung berapi yang dikenal dengan patahan semangka (Ahmad,2007:83). Aceh Barat Daya berbatas dengan beberapa kabupaten, yaitu; di bagian utara berbatasan dengan kabupaten Gayo Lues, di bagian selatan dengan Samudera Indonesia, di bagian barat dengan kabupaten Nagan Raya, dan di bagian timur dengan kabupaten Aceh Selatan (Aceh Dalam Angka,2005:3). Kabupaten ini

terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan, yaitu; Babah Rot, Kuala Batee, Jeumpa, Susoh, Blangpidie, Suak Setia, Tangan-Tangan, Manggeng, dan Lembah Sabil.

Kuala Batu berada di pesisir barat selatan Aceh di bagian tenggara Provinsi Aceh, namun karena kabupaten Aceh Tenggara sudah terlebih dulu ada, maka "*founding father*" daerah tersebut bersepakat menamakan "Aceh Barat Daya" (Aceh Dalam Angka,2005:85), saat daerah itu masih terintegrasi dalam lingkup Aceh Barat dan kemudian terintegrasi dalam Kabupaten Aceh Selatan. Daerah ini beriklim tropis, dengan curah hujan dan kelembabantinggi. Temperaturnya berkisar antara 26º-30º Celcius, di dataran tinggi berkisar antara 15º-23º Celcius, tetapi kadangkala bisa mencapai 12º Celcius (Aceh Dalam Angka,2005:85). Curah hujannya berkisar antara 3.228 mm-4.912 mm/tahun. Kelembaban antara 70-80%. Hanya pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus yang relatif agak kering (Aceh Dalam Angka,2005:85). Topografi daerah ini berbukit-bukit dan dataran yang relatif sempit dibandingkan daerah pantai timur Aceh. Daerahnya membujur di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.

Sebagian besar pesisirnya berlereng curam dan bergunung-gunung. Dataran rendahnya terletak di sebelah barat, di mana beberapa bagian daerah rawa-rawa dan muara sungai di pesisir kecamatan Kuala Batee dan Babahrot. Daerah pegunungan terletak di sebelah timur merupakan kawasan ekosistem Taman Nasional Leuser di barat wilayah ini.Dataran tingginya antara 0-100 meter dari permukaan laut seluas 43,04% dari luas keseluruhan wilayah ini. Selebihnya merupakan daerah landai dengan kemiringan 27,05%, sedangkan daerah bergelombang sekitar 21,81% , dan daerah miring dan terjal seluas 5,10% (Aceh Dalam Angka,2005:85).

Tinjauan Historis Penduduk

Asal-usul mengenai penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan bentang wilayah dari Ujong Manggeng hingga Ujong Raja ini, tidak disebutkan secara jelas. Masyarakat berpendapat bahwa penduduk asli yang mendiami daerah ini adalah orang Batak yang disebut "Batak

27".[3] Hal ini berkaitan dengan toponimi mengenai keberadaan suatu tempat yang dinamakan "*guha batak*" atau "gua batak" di pedalaman. Namun ada juga yang mempercayai penduduk aslinya adalah orang-orang *Manteu* (Gayo atau Aceh asli?). *Oral history* menyebutkan bahwa koloni orang Batak 27 telah terpinggirkan oleh pendatang baru dari Sumatera Barat maupun dari daerah Aceh lainnya. Mereka terpaksa menyingkir ke pedalaman dan terus terdesak hingga ke Bebesan di Kabupaten Gayo Lues sekarang. Di dataran tinggi Gayo, mereka kemudian dikenal dengan Belah Bebesan.[4]

Orang-orang *Aneuk Jamee* (Minangkabau) merupakan pendatang dari Sumatera Barat yang telah bermigrasi ke Aceh Barat Daya diperkirakan terjadi pada bagian kedua abad ke-17 (sekitar 1840-an setelah adanya Traktat Sumatera 1824), yaitu semenjak Belanda berhasil mempengaruhi dan menduduki Sumatera Barat yang sebelumnya di dalam lingkup vasal Kerajaan Aceh. Jauh sebelumnya, diduga setelah adanya *Traktat Painan* antara penguasa lokal Sumatera Barat dengan Belanda pada tahun 1663 sehingga perwakilan orang-orang Aceh yang berada di Sumatera Barat mulai menyingkir ke sana karena sebagian Sumatera Barat tersebut berada di bawah taklukan kesultanan Aceh dan orang Minangkabau yang tidak mau tunduk ke dalam kekuasaan Belanda. Mereka memilih bermigrasi ke pantai barat Aceh yang disebut sebagai daerah tujuan migrasi (*rantoe*). Sebagian di antara mereka membangun koloninya di Susoh dan sebagian lainnya di Meulaboh atau serta di tempat lainnya sehingga mereka di Aceh lazim disebut sebagai suku "*Aneuk Jamee*"atau "suku anak keturunan tamu".[5] Bersamaan dengan periodisasi itu, daerah ini juga kedatangan migrasi orang Aceh yang berasal dari

[3] Masyarakat Aceh Barat Daya juga mempercayai pada awalnya juga telah ada orang yang di Aceh umumnya disebut *Mantee*. Mereka sering dijumpai *mugee* tembakau yang melewati perjalanan menelusuri sekitar Taman Nasional Gunung Lauser hingga akhir tahun 1970-an.Orang *Mantee* bila bertemu orang asing langsung menghindar dan bersembunyi.

[4] Hal ini masih kontroversi karena berdasarkan penggalian arkeologis di Ceruk Mendale Aceh Tengah menyimpulkan bahwa orang Gayo sudah ada sejak 3500 tahun SM.

[5] Tentang penetrasi Belanda di Sumatera Barat dan konflik dengan penguasa Aceh di sana dapat dilihat dalam M. Said, 1961. *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Percetakan Waspada, hlm. 384-400.

Aceh Besar dan Pidie. Mereka juga membuka perkebunan *(seuneubok)* lada dan padi dan hingga awal abad ke-19, lada merupakan tanaman ekspor terpenting dalam perdagangan internasional di wilayah tersebut.[6]

Orang Minangkabau dan orang Aceh membangun komunitasnya di muara sungai, yaitu; Krueng Susoh, Krueng Baro, Krueng Babah Rot dan Krueng Seumayam, seperti di Lama Tuha, Kuala Batu, Susoh, Suak, Lhok Pawoh Utara, dan Pasi Ujong Manggeng. Lambat-laun permukiman terbentuk menjadi suatu pemerintahan lokal yang mandiri tetapi berada di bawah perlindungan Kerajaan Aceh Darussalam. Namun, di antara mereka ada yang berhasil, seperti Leube Dafa dari Trumon. Pada masa setelah itu ada juga Datuk Besar di Manggeng yang tidak mau membayar upeti kepada Sultan Aceh sehingga Sultan Alauddin Jauhar alAlamsyah yang memerintah dari tahun 1795-1824 murka dan memutuskan memimpin pelayaran sendiri menyerang Manggeng (Djajadiningrar,1911:263). Inspeksi sebagai kontrol hegemoni itu terus dilakukan oleh Sultan Aceh, namun tidak menutup kesempatan kerajaan-kerajaan kecil di *'ranto'*tersebut bisa secara mutlak dikuasai secara bijaksana oleh pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka secara ilegal sering berhubungan dengan pedagang asing dalam perdagangan lada tanpa membayar *wasee* atau pajak ke pusat kerajaan di Bandar Aceh Darussalam.

Di daerah ini pedagang Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda dapat leluasa memasuki dan melakukan hubungan perdagangan internasional dengan pelabuhan-pelabuhan lokal yang berlangsung hingga awal abad ke-19. Hal ini pernah dicatat oleh John Anderson yang pernah menyinggahi kota pelabuhan Manggeng, Susoh, Kuala Batu, dan Seumayam di pantai barat selatan Aceh (Anderson,159). Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim yang bergelar Alaiddin Mansur Syah 1836-1870,[7] juga pernah dikirim ekspedisi penertiban ke Susoh yang dipimpin

[6] Tentang kedatangan atau perpindahan penduduk atau orang Aceh ke pantai barat selatan, sehingga pernah menimbulkan konflik dan peperangan mengenai perebutan wilayah dan permukiman dengan orang Aneuk Jamee yang datang dari Sumatera Barat ke pantai Barat pada awal abad ke-18 (G.W.J. Drewes, 1979. *Hikajat Potjut Muhammad*. The Hague: Martinus Nijhoff, hlm. 116.

[7] Sultan Ibrahim dua kali memerintah di Kerajaan Aceh Darussalam, pertama hingga tahun

oleh pangeran Tuanku Husen karena negeri ini tidak membayar pajak yang telah ditentukan kepada wilayahnya. Pasukan Aceh dibantu Datuk Keng keturunan Datuk Baginda di Susoh.Sedangkan Susoh dipimpin Datuk Kepala keturunan Datuk Tua. Perang berakhir setelah Susoh menghormati ketentuan yang telah ditetapkan Kesultanan Aceh.

Tinjauan Sosial dan Budaya

1. Pendidikan

Pada masa lalu, sentral aktivitas pendidikan dalam masyarakat Aceh Barat Daya termasuk di Kuala Batu adalah di *Meuseujid*(Mesjid) dan *Meunasah* (Musalla) yang berdiri seluruh *Mukim* (gabungan beberapa desa) dan *Gampong* (desa). Di *Meunasah* anak-anak menerima pelajaran dan pendidikan agama untuk pertama kalinya.[8] Mereka menerima pengajaran dari *teungku*sebagai *guree* (guru) yang mengurusi *Meulasah* yang disebut "*teungku meunasah*". *Teungku Meunasah* bertugas memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Ia dibantu oleh beberapa orang *murib* (santri/siswa) yang sudah lebih cerdas dari yang lainnya. Sedangkan di beberapa tempat lain di Aceh Barat Daya mereka dinamakan *Sida* (Ahmad,2007:124). Metode pengajaran di *Meunasah* adalah membaca dan mengkaji Alquran, tajwid, shalat, puasa, dan ibadat lainnya yang diwajibkan atau dianjurkan oleh agama. Selain itu, pendidikan seni suara juga diajarkan, terutama seni suara yang berhubungan dengan agama yang dinamakan "*dikee*" (zikir) dan "*seulaweuet*"(selawat). Adakalanya setelah anak-anak yang menamatkan Alquran, mereka diajarkan beberapa kitab agama yang ditulis dengan huruf "*jawo*" atau huruf "arab gundul" yaitu kitab berbahasa Melayu dengan "huruf arab tanpa tanda" yang banyak dipergunakan di *dayah-dayah* atau pesantren tradisional di Aceh. Beberapa kitab masih diajarkan sampai sekarang, misalnya *Masailal*

1836 dan periode kedua hingga tahun 1870.

[8] Zakaria Ahmad, (ed), *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya Dalam Lintasan Sejarah Menuju Daerah Otonom,* Blangpidie : Pemda Aceh Barat Daya, 2007, hlm.124. Mesjid (*Meuseujid*) dan Madrasah (*Meunasah*) adalah sistem pendidikan agama dan adat yang sudah ada sejak dulu.

Muhtadi dan *Bidayah*,[9] sedangkan bagi orang dewasa diberi pelajaran pada waktu-waktu tertentu di *Meunasah* oleh *Teungku Meunasah*. Sekali-kali juga didatangkan *Imuem Chik* dari masjid kemukiman terdekat.

Kedudukan *Meunasah*, *Balee*, *Balai* dan *Surau* sama pentingnya. Pranata sosial yang berhubungan dengan agama banyak diajarkan di *Meunasah*. Di samping itu ada lembaga pendidikan agama yang diperuntukkan bagi para perempuan dan anak-anak yang disebut *Dayah* atau *Dokyah*.[10] Dalam menempuh pendidikan agama Islam yang lebih tinggi, anak-anak meneruskan pendidikan ke lembaga lebih tinggi yang dinamakan *Rangkang* atau selevel dengan Pondok Pesantren, Madrasah, atau *Dayah*.[11] *Rangkang* memiliki tingkatan tertentu dan tingkatan ini sangat tergantung kepada kedalaman ilmu yang dimiliki oleh *Teungku* (guru/*guree*). *Murib* (siswa) yang cerdas dan dinilai cukup mahir berguru di sini kemudian dianjurkan untuk mendalami pendidikannya ke *rangkang* yang *Teungku* atau gurunya lebih tinggi ilmunya. Ada *murib* yang berpindah-pindah dari satu *rangkang* ke *rangkang* lainnya untuk mendalami dan mengikuti pelajaran dari guru-guru terkenal bahkan ke luar negeri ke India, Mekkah dan Mesir, seperti Syekh Umar Thaher.

2. Kepercayaan

Kepercayaan yang dianut masyarakat Aceh Barat Daya tidak dapat dipisahkan dari aspek migrasi yang menyebabkan terjadi asimilasi budaya dari pergaulan multietnis yang didominasi pengaruh Islam. Proses pembauran antar kelompok etnik tersebut berlangsung serasi dan alamiah terutama setelah terintegrasi ke dalam lingkup Kesultanan Aceh Darussalam (1514 -1904), Aceh Barat (1904-1953), Aceh Selatan (1953-2002), dan Aceh Barat Daya (2002-sampai sekarang).

Dilihat dari sistem budaya masyarakatAceh yang pernah bersentuhan dengan kepercayaan lama, Hindu, Budha dan Islam. Pada masa lalu,

---

[9] Wawancara dengan Mahmudin pada tanggal 24 Februari 2012, di Blangpidie.

[10] *Ibid*, hlm.125, dalam istilah Aceh disebut *Dayah*, sedangkan dalam istilah *Aneuk Jamee* disebut *Dokyah*.

[11] *Ibid*, hlm.126.

Aceh Darussalam cukup gencar memberantas hal-hal *kurafat* dan *bid'ah* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Alqur'an. Namun masih ada bagian-bagian yang belum tersentuh sehingga karakter kebudayaan yang berkembang tetap mewarnai ketiga aspek kebudayaan tersebut.[12]

Masyarakat Aceh Barat Daya mayoritas menganut Islam. Penganut agama lainnya umumnya pendatang tetapi sangat sedikit jumlahnya. Pembauran ajaran Islam dengan budaya lokal, baik dari zaman pra-Islam maupun adat-adat sesudahnya telah terjadi secara harmonis dengan penyesuaian yang luar biasa sehingga sulit dibedakan mana dari syariat dan mana yang dari adat-istiadat. Hal ini, sudah lama terjadi dan dikenal ketika mufti kesultanan masa Sultanah Safiatuddin (1641-1675) Syekh Abdurrauf as-Singkili al Fansuri al Jawi dalam ungkapannya, "*hukom ngon adat lagee zat ngon sipeut*" (syariat dan adat seperti zat dengan sifatnya). Hal tersebut dipertegas lagi kemudian oleh Syekh Burhanuddin Ulakan di Pariaman Sumatera Barat dalam ungkapan "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersendi agama, agama bersendi Alqur'an) yang dianut oleh masyarakat etnik *Aneuk Jamee* yang mendiami bagian pesisir kabupaten Aceh Barat Daya.

Masyarakat Aceh Barat Daya, dalam mendalami agama sejak kanak-kanak sudah ditanam prinsip-prinsip keimanan. Kepercayaan mereka hanya boleh diserahkan kepada Allah SWT, yang disebut dengan "*Po teu Allah*" disebut dengan singkat "*Potallah*", artinya "Yang memiliki kita" atau "Yang menjadikan kita". Mereka diajarkan sifat Tuhan (Tauhid) yang berjumlah 20 (duapuluh) atau *sipeuet duaploh*. Penanaman ajaran dasar ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa tidak boleh menyekutukan Allah SWT dengan apapun.[13] Selain itu, mereka diajarkan mengenal nama-nama Tuhan yang berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) yang dinamakan *Asmaul Husna*. Selain itu, mereka juga diajarkansyarat/ rukun iman (*rukon iman*) yang terdiri dari 6 (enam) perkara dan syarat/

[12] Zakaria Ahmad, (ed), *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya Dalam Lintasan Sejarah Menuju Daerah Otonom*, Blangpidie: Pemda Aceh Barat Daya, 2007, hlm.164.

[13] Wawancara dengan Mahmudin di Blangpidie, pada tanggal 25 Maret 2012

rukun Islam (*rukon Islam*) yang terdiri dari 5 (lima) butir. Mereka juga ditanamkan pengetahuan tentang 25 (dua puluh lima) Nabi/Rasul, dan juga harus mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir atau *khatamul ambiya* sehingga tidak mudah tersesat dan disesatkan.[14] Kepercayaan dan pengetahuan masyarakat Aceh Barat Daya tentang mengenai makhluk gaib juga ada, seperti; malaikat, syaitan, jin jahat, dan jin Islam. Sebagian dari jin dan syaitan yang dikenal di sana, antara lain; *Raja Janan, Raja Dumet, Jen Pari, Jen Afrit, Burong, Hantu, Geunteut, Bujang Hitam,* dan *Hantu Buru.*[15] Mereka juga mempercayai adanya makhluk suci yang disebut "*aulia*" yang bertempat tinggal di tempat yang sangat tinggi, sepi dan terlindungi.

Mayoritas penduduk Aceh Barat Daya penganut mazhab Syafii dan berkembang *TarikatNaqsyabandiah*. Pada awal kemerdekaan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pernah berkembang, namun kemudian dibubarkan oleh pemerintah karena keterlibatan dalam DI/TII Aceh. Selain itu, ada organisasi Islam lain; seperti Muhammadiyah, Perti, Nahdlatul Ulama, Al Jamiatul Wasliyah, dan lain-lain. Mereka mayoritas menganut paham *Ahlussunnah Waljamaah*. Sedangkan Ahmadiyah dan Syiah pernah ada, namun kurang disukai karena dianggap "sesat" sehingga menghilang sejak tahun 1940-an. Namun, pengaruh kedua aliran ini masih dapat dijumpai dalam masyarakatnya misalnya dalam kesenian, kesusastraan, dan upacara-upacara keagamaan.[16]

Posisi dan kedudukan ulama atau *teungku* sangatlah penting di dalam masyarakat setiap *gamponh*/desa. Peranan *teungku* sangat besar, tidak terkecuali pada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, kesulitan-kesulitan, dan permasalahan sosial lainnya menyangkut kehidupan sehari-hari anggota masyarakat juga dapat meminta petunjuk darinya. *Teungku*juga dilibatkan dalam penetapan acara-acara yang dianggap penting dan sakral di dalam masyarakat, seperti; penetapan

[14] *Ibid.*

[15] Wawancara dengan Imuem Mukim Mahmudin di Susoh tanggal 24 Februari 2012, dan lihat juga, *op. cit.*, hlm.128

[16] Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2003, dan *op.cit,* hlm.173.

hari pelaksanaan perkawinan (*meukawen*), sunatan (*meusunat*), maupun hajatan-hajatan yang besar lainnya.[17] Di daerah inijuga ada pemeluk Budha, Hindu dan Kristen (Katholik dan Protestan) namun minoritas. Mereka diperbolehkan menjalankan aktivitas ibadah di rumah masing-masing dengan tenang.[18] Umumnya mereka adalah WNI Keturunan Tianghoa ataupunpara pendatang dari luar Aceh.

3. Adat-Istiadat

Kesatuan teritorial terkecil di Aceh Barat Daya adalah *gampong*.[19] *Gampong* berdasarkan Undang-Undang pada masa Orde Baru, mengalami perubahan dan tidak dipertahankan. Setelah reformasi lahir Otonomi Khusus Aceh yang diperkuat lagi dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh belakangan ini, memungkinkan struktur dan teritorial yang berbasis lokal untuk diatur dan direaktualisasi sebagai ciri khas dari suatu daerah. Oleh karena itu, bagian-bagian dari struktur dan organisasi sosial seperti; *Gampong, Mukim, Meuseujid, Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Panglima Uteuen*, dan lain-lain direaktualisasi kembali, karena masih bermanfaat dan menguntungkan. Kepala *Gampong* disebut *keuchik* dan pengurus administrasi *gampong* yang disebut *sekretaris gampong* (sekretaris desa). *Keuchik* dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh *Teungku Meunasah, Teungku Seumeubeut*, dan tetua adat yang disebut dengan *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*.[20] Beberapa lembaga pendidikan tradisional seperti *Meulasah, Dayah* dan *Balee* juga terdapat di sana. *Meunasah* adalah lembaga yang dipimpin oleh *Teungku Meunasah* yang sekaligus dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan shalat lima waktu. Dayah adalah lembaga pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan yang dipimpin oleh *Teungku Inong* (ustazah, ummi). Sedangkan *Balee* berfungsi sebagai tempat pengajian bagi anak laki-laki

[17] *Ibid.*
[18] Aceh Barat Daya Dalam Angka, 2003, dan *op.cit*, hlm.173-174.
[19] *Ibid*, hlm. 168.
[20] Wawancara dengan Imuem Mukim Mahmudin, di Susoh tanggal 24 Februari 2012.

gampong.[21]

Sistem perkawinan berbentuk matrilokal (pihak suami tinggal di rumah istrinya). Mereka tinggal bersama-sama dengan orangtua istri sampai mampu untuk mandiri (*peuaseng dapu*). Namun *peuaseng dapu* tidak dilakukan dengan suatu acara yang melibatkan masyarakat, hanya diketahui oleh anggota keluarga saja. Misalnya, pada saat sudah mandiri dilakukan pemisahan dapur, dan bisa juga berarti pemisahan rumah dengan menempati rumah yang baru yang berbeda dengan rumah pihak istrinya.[22] Garis keturunan keluarga pada masyarakat Aceh Barat Daya ada dua macam, pertama disebut *Taloe Wali* atau *Syedara Wali* yang menuruti garis keturunan ayah. Kedua, *Taloe Karong* atau *Syedara Karong* yang menuruti garis keturunan ibu. Oleh karena itu, keluarga batih berada dalam lingkungan pihak ibu, maka peranan *Wali Karong* dalam aspek sosial sangatlah besar. Kewajiban dan tanggungjawab sangat besar ditanggung oleh *wali karong*, sedangkan dalam pembagian harta pusaka, perkawinan, serta tanggungjawab sosial lainnya dipikul oleh *taloe wali*.[23] Sistem kekerabatan di antara keduanya disebut *kawom*. Anak sangat merasa aman dan tenteram pada saat berada di dalam *Kawom*-nya. Keselamatan anggota *kawom* merupakan tanggungjawab *kawom*-nya. Pada masa lalu peranan *kawom* sangatlah besar, biasanya salah seorang di antara mereka dipilih sebagai pemimpin tertinggi yang disebut *Panglima Kawom*.[24] Sedangkan pada etnik *Aneuk Jamee* juga dijumpai sistem yang demikian,[25] apabila mereka memiliki keluarga besar. Salah seorang di antara mereka, diangkat menjadi kepala keluarga dan kepadanya diberi gelar *datuk*.[26] Pemberian gelar *datuk* ini pada masa lalu pernah dilakukan dengan upacara penyembelihan kerbau.[27]

---

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*

Masyarakat Aceh Barat Daya didominasi etnis Aceh dan *Aneuk Jamee* yang masih menjalani kehidupannya dalam suasana tradisi yang kental. Tatatertib dalam masyarakat dan kehidupan harmonis merupakan harapan dan gambaran kehidupan ideal yang dicita-citakan. Tugas moral individu dalam masyarakat adalah menjaga keselarasan menjalankan kewajiban-kewajiban sosial yang ada di sekitarnya. Kewajiban-kewajiban sosial ini menyangkut hubungan sosial, baik hubungan antar individu yang di dalamnya terdapat pola hubungan yang hierarkis. Pola ini berdasarkan faktor-faktor perbedaan otoritas, kekayaaan, status sosial, peran sosial, usia, keturunan, dan lain sebagainya.[28] Solidaritas dan kebersamaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat sehingga rasa kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dalam perkumpulan tolong-menolong atau *meuseuraya* (gotong-royong) dan *duek pakat* (musyawarah) ketika penyelenggaraan hajatan besar (*keunuri*) maupun dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama sehingga menjadi tradisi masyarakat.[29]

4. Bahasa

Masyarakat Aceh Barat Daya berkomunikasi dalam dua bahasa, yaitu; bahasa Aceh dan bahasa *Aneuk Jamee*.[30] Biasanya masyarakat Aceh Barat Daya menguasai kedua bahasa tersebut sehingga mudah dalam berkomunikasi diantara mereka. Bahasa yang dominan digunakan sesuai lokasi dan juga dominasi serta komposisi etnik di daerah tersebut. Di pesisir pantai didominasi bahasa *Aneuk Jamee*, sedangkan di pedalaman didominasi bahasa Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh dan *Aneuk Jamee*dapat hidup secara berdampingan secara harmonis sejak beberapa abad lampau dan hampir tanpa ada pergesekan berarti di sana. Selain itu, juga ada bahasa Tionghoa yang merupakan bahasa orang Hakka dan Khek.

---

[28] Nield Mulder, 1986. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 38.

[29] Wawancara dengan Mahmudin di Susoh tanggal 22 Februari 2012.

[30] *Ibid*.

Situasional Pesisir Barat Selatan Aceh Sebelum Serangan Amerika Serikat

Periodisasi sejarah Aceh abad ke-18 dan abad 19 belum banyak diteliti sejarawan atau peminat sejarah di Aceh. Periode ini Belanda sudah mulai mengincar daerah taklukan (vasal-vasal) yang ada di bawah naungan Kesultanan Aceh. Selain itu, masa ini merupakanperiode "pemberontakan" di level bawah yang sering terjadi antarwilayah (*nanggroe*dan *ranto*) pecahan kerajaan, setelah kekuasaan kesultanan/ kesultanahan Aceh menurun. Pada saat yang bersamaan Belanda telah menyusup ke dalam konflik-konflik antarorang Aceh dengan tujuan mencapai target kolonialisasi.[31] Pada abad ke-18, monopoli sultan Aceh atas daerah-daerah 'vasal' mulai berkurang, terutama kekuasaan politik maupun ekonomi. Kemunduran Kerajaan Aceh sebenarnya telah dimulai ketika berakhirnya masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Dalam periode sebelumnya, di mana perang yang dilancarkan Sultan Iskandar Muda dalam mempertahankan hegemoni Kesultanan Aceh atas vasal-vasal yang sebelumnya dikuasai, telah menguras banyak kejayaan ekonomi kerajaan Aceh. Biaya yang sangat besar dianggarkan untuk membiayai operasional sebanyak 19.000 orang prajurit ketika menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1629, dan biaya-biaya lainnya untuk melengkapi peralatan perang; seperti kapal, perbekalan prajurit dan melengkapi persenjataan. Selain itu, serangan ini juga mengakibatkan berhentinya sumber-sumber produksi dari berbagai kegiatan perekonomian dan pertanian di wilayah kesultanan Aceh sendiri.[32]

Setelah periode selanjutnya terjadi kebakaran besar yang melanda pusat Kerajaan Aceh(*Dalam*)yang telah menghabiskan sebagian besar harta kekayaan kerajaan. Kebakaran itu terjadi pada masa pemerintahan Sultanah Inayat Syah Zakiatuddin Syah (1678-1688). Hal ini juga merupakan faktor lain yang menyebabkan berkurangnya harta kekayaan dan kekuasaan Kerajaan Aceh.

---

[31] Jean Gelman Taylor, 2008. dalam Henk Schulte Nordholt, *et.all* (ed.) Aceh: Narasi Foto, 1873-1930', *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta: KITLV, hlm. 336.

[32] *Ibid.*

Ada yang menduga faktor utama kemunduran Kerajaan Aceh adalah sistem pemerintahan pada masa sultanah selama setengah abad yang dimulai sejak tahun 1641 hingga 1699.[33] Di mana ketika itu, sultanah (raja-raja perempuan) tidak diperbolehkan untuk keluar istana, sehingga terpaksa diciptakan satu jabatan baru, ketua *uleebalang,* terutama di daerah-daerah yang menjadi sentral produksi padi(*seuneubok padee*) dan lada (*seuneubok lada*). Pengangkatan pemegang kekuasaan lokal sebagai ketua *uleebalang*dan *uleebalang* sebagai pemegang posisi strategis yang sangat banyak menghasilkan kekayaan ini sehingga menyebabkan banyak terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di Aceh.[34] Budaya politik di dalam kerajaan Islam membatasi penguasa perempuan dalam mengurus hubungan diplomasi dan hubungan dengan pedagang-pedagang internasional terkemuka. Mereka diwakili oleh para *uleebalang*dan perantara atau sida-sida istana. Peranan dan posisi sultanah (raja perempuan) juga ditentang oleh sebagian ulama dan anggota kerajaan yang laki-laki. Peran sultanah juga dihalang-halangi oleh para *uleebalang* sehingga kekuasaannya semakin melemah dan hak-hak istimewa yang dimilikinya semakin menciut.

Pihak laki-laki dari Kesultanahan Aceh merebut kendali atas perdagangan lada yang dihasilkan suatu wilayah taklukan. Merekalah yang menjadi 'penguasa baru' yang bebas bersyarat di wilayah tersebut. *Uleebalang* ini mengkorupsi sebagian penghasilan sultanah Aceh dari *wasee* (pajak ekspor) dengan cara menyelundupkan lada keluar dari pelabuhan yang mereka kendalikan. Kedudukan *uleebalang* sangat berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan menjadi raja. Merekalah yang menentukan calon raja yang berasal dari keturunan raja yang berhak menempati kedudukan sebagai sultan Aceh. Ketika para sultan berhasil merebut kembali monopoli kerajaan, maka *uleebalang* akan berusaha menurunkannya kembali. Mereka akan mengangkat raja laki-laki lain yang dinilai lebih lemah sehingga mudah dipengaruhi sebagai

[33] Djajaningrat, 1911, *op. cit.*, hlm. 263.
[34] *Ibid.*

penggantinya.[35] Akibat dari sistem politik yang tidak pasti di pusat kerajaan menyebabkan banyak terjadi migrasi dari pusat kerajaan (*dalam* dan *nanggroe*), yaitu; orang-orang di wilayah Aceh Besar dan Pidie ke daerah-daerah lain (*ranto*), seperti ke pesisir barat selatan Aceh. Daerah tersebut merupakan kawasan *ranto*"wilayah jauh yang masih ditutupi hutan belantara", terutama daerah-daerah yang dianggap cocok sebagai lahan pertanian lada dan padi. Pada saat itu lada telah menjadi primadona sebagai komoditi perdagangan internasional.

Pada abad ke-19, Aceh menjadi pengekspor lada yang besar. Hampir separuh dari kebutuhan lada dunia dipasok dari Kesultanan Aceh. Namun, keuntungan dari perdagangan lada ini tidak dapat menutupi biaya perang yang terus-menerus. Berdasarkan peta Veth, menunjukkan bahwa dari tahun 1875 kekuasaan Aceh sudah terpecah-pecah menjadi seratus lebih kerajaan kecil. Semua orang yang memiliki kekuasaan dapat merebut kekuasaan di wilayah Aceh. *Uleebalang* dan ulama saat itu memiliki pasukan dan koloninya masing-masing. Serbuan di antara kerajaan-kerajaan kecil ini (*nanggroe)* sering terjadi dan telah menjadi pemandangan umum saat itu.

Uleebalang daerah-daerah penghasil lada kemudian merasakan keuntungan dari hasil perdagangan lada di Aceh. Mereka membelanjakan hasil perdagangan lada untuk konsumsi barang-barang mewah, seperti pakaian sutera, emas perhiasan, budak, dan juga untuk membiayai pasukan pribadi dan melengkapi pasukannya dengan meriam-meriam. Hal ini mengakibatkan setiap koloni bebas membangun benteng-benteng pertahanan yang disebut *kuta. Kuta-kuta* di pesisir Barat Aceh, seperti di Kuala Batu dibuat dengan gundukan tanah seluas 25m^2 yang dilengkapi dengan meriam-meriam dengan arah moncong yang menghadap ke laut lepas.

[35] Lee Kang Hing, *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, dalam *ibid*, hlm. 336.

A. Kuala Batu

Kuala Batu awalnya dibuka oleh para pendatang dari Aceh Besar dan Pidie. Wilayah ini merupakan muara Sungai Krueng Babah Rot. Daerahnya sangat subur karena setiap tahun sering mendapatkan endapan humus dari pedalaman dari pegunungan Bukit Barisan dan Taman Nasional Gunung Leuser. Daerah ini ternyata sangat baik untuk ditanami lada dan padi. Posisinya sangat strategis karena berada pada sistem lalu-lintas atau transportasi kapal-kapal internasional di Samudera Hindia (Indonesia) menuju ke Timur India, terutama setelah Portugis berhasil menguasai Malaka pada 1511.

Kuala Batu awalnya merupakan wilayah kenegerian Susoh. Daerah ini yang dipimpin oleh Keucik Karim. Beliau yang meminta izin kepada Datuk Susoh untuk membuka perkebunan lada di Lama Inong, pedalaman Kuala Batu. Permintaan izin disetujui dengan syarat harus membayar *wasee* (pajak) kepada Datuk Susoh sebagai perwakilan sultan Aceh.[36] Leube Dafa memerintah di negeri Trumon, merupakan perwakilan sultan yang mengutip pajak di daerah pesisir barat dan selatan Aceh termasuk Kuala Batu.

Keucik Karim adalah pemimpin *sueneubok* lada pada awal kepemimpinannya, membayar seluruh kewajiban pajak yang telah menjadi tanggungannya dalam perdagangan lada kepada Leubee Dafa. Namun dalam hasil-hasil panen selanjutnya, ia sudah tidak mau membayar *wasee* lagi kepada perwakilan sultan tersebut. Demikian juga kapal-kapal dagang asing yang seharusnya memuat lada yang pada awalnya melalui pelabuhan Susoh, mulai dialihkan ke pelabuhan Kuala Batu, akibatnya kenegerian Susoh mengalami kerugian.[37]

Sebelumnya di dalam mewakili bisnis pelayaran dan perdagangan kesultanan Aceh, Leube Dafa yang mendapat banyak keuntungan dari komisi dan biaya pelayaran dan angkutan kapal. Kemudian, ia berunding dengan Datuk Susoh untuk membuka secara resmi Kuala

[36] K.F.H. van Langen, *op.cit.*, hlm. 210.
[37] *Ibid.*

Batu sebagai pelabuhan perdagangan lada di pesisir barat selatan Aceh. Untuk mengawasi dan mengontrol hegemoni kesultanan Aceh di sana, ia serahkan langsung kepada kedua anaknya, Teuku Nyak Haji dan Raja Bujang. Namun, hal itu tidak sempat terjadi karena Leube Dafa meninggal dunia sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai rencana.[38]

Akibatnya Kuala Batu diserang oleh Datuk Susoh yang beraliansi dengan Trumon sebagai perwakilan sultan Aceh. Perang terjadi berimbang dan kemenangan diperoleh bergantian. Perang berakhir, setelah dilangsungkan perkawinan politis antara anak laki-laki pemimpin Kuala Batu Teuku Lama yang bernama Raja Kuala dengan cucu raja Susoh Datuk Bagak.[39]

Setelah Teuku Lama meninggal dunia, kekuasaan dipegang adiknya Raja Pidie. Raja Pidie, sudah berpengalaman di bidang pemerintahan karena sering berkecimpung sejak masih muda di dalam mediasi perdamaian antara Kuala Batu, Susoh dan sekutunya Trumon. Kemudian, ia menghadap sultan di Bandar Aceh untuk memandirikan negeri Kuala Batu dari Susoh. Raja Pidie menikahi perempuan Susoh keturunan Air BangisSumatera Barat. Perkawinan tersebut menurunkan anak laki-laki bernama Raja Sulaiman.

Setelah Raja Pidie meninggal dunia, Raja Sulaiman memerintah di sebelah kiri Kuala Batu. Sedangkan sebelah kanan sungai dikuasai Pocut Hasan, anak Pocut Abdullah dari XXVI Mukim, Aceh Besar.[40] Raja Pidie dan Pocut Hasan datang bersama-sama dengan Pocut Kuala pada masa pemerintahan Raja Pidie di Kuala Batu. Menurut catatan Belanda, Raja Sulaiman memerintah kerajaan Kuala Batu hingga daerah ini dipengaruhi Belanda pada tahun 1881. Wilayah Kuala Batu, yaitu; *pertama,* wilayah pemerintahan Raja Sulaiman meliputi; Madat Manyang, Sarulah, Sikabu, Teurubue, Lama Inong, dan Siangen-Angen. *Kedua* wilayah Pocut Hasan meliputi Lhok Ek, Kuta Raya, dan Kuta Cot Dolah.*Ketiga,* wilayahKuala

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*, hlm.210-211
[40] *Ibid.*

Batu meliputi Seumayam, Surin, Lama Tuha, dan Lama Muda.[41]

Semenjak 1778 hingga lebih setengah abad lamanya pesisir barat dan selatan Aceh hingga Barus terbebas dari ancaman Belanda. Saat itu, kegiatan perdagangan di pantai-pantai Barat dan Selatan Aceh, termasuk transaksi langsung dengan kapal-kapal Eropa dan Amerika selama beberapa tahun pada masa sekitar pergantian abad ke-18 dan 19 berjalan dengan lancar tanpa dapat diganggu oleh Belanda. Kedatangan kapal-kapal Eropa dan Amerika langsung ke pusat produksi membuat pasar lada ramai dengan harga yang kompetitif.

Otoritas sultan di ibukota Bandar Aceh ke pesisir barat selatan sudah melemah sejak pertengahan abad ke-18. Keadaan politik di Trumon atau lebih ke Selatan lagi, yaitu Singkil yang sejak lama menjadi bagian dari Kerajaan Aceh pada pergantian abad sudah menjadi kabur. Meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah ini telah memancing kedatangan petani dari luar, yang ditandai dengan terjadinya pertumbuhan negeri-negeri yang baru, salah satunya adalah Trumon. Di mana seorang penduduk XXV Mukim Aceh Besar beserta pengikutnya pindah ke Susoh di sebelah selatan Meulaboh, lalu menjadi kepala kampung di Trumon. Dua orang keturunan pertamanya bernama Basa Bujang (Bujang Basa) pindah ke Teurumon, dan kedua bernama Leube Dafa pindah ke Singkil. Leubee Dafa berhasil mengembangkan pertanian lada di daerah tersebut.

Kepala negeri Singkil yang bersimpati kepadanya menikahkan putrinya dengan Lebai Dafa bahkan menyerahkan kepimpinanan di daerah tersebut kepadanya. Sedangkan Raja Bujang kurang berhasil dalam pertanian lada di Trumon mengundang adiknya tersebut pindah ke Trumon. Lebai Dafa setuju tanpa melepaskan posisinya sebagai raja Singkil. Trumon dan Singkil kemudian berkembang menjadi penghasil lada yang meningkatkan pemerintahan setempat dan para pemimpinnnya pada saat penghasilan kesultanan Aceh sedang merosot. Lebai Dafa disebutkan meninggalkan 17 putra dan 10 putri.

[41] *Ibid.*

Anak laki-lakinya Raja Bujang mewarisi Trumon, sedangkan anak laki-laki kedua Raja Muhammad Arif memerintah di Singkil. Lebei Dafa adalah penentang Sultan Jauhar Alam, seperti halnya paman sultan sendiri bernama Tuanku Raja. Ia melakukan pembangkangan terhadap sultan. Berbagai *wasee* serta pajak daerah-daerah lainnya tidak diserahkannya kepada sultan Aceh. Menurut laporan Kapten Canning yang meninjau Aceh atas perintah Gubernur Jenderal di Kalkuta, Lebai Dafa menguasai pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat selatan Aceh, antara lain; Singkil, Ayam Dammah, Trumon, Rambung, Susoh dan Kuala Batu dengan jumlah penduduk sekitar 27.750.[42]

Pada masa puncak produksi lada di daerah-daerah tersebut, Trumon berhasil mengekspor 40.000 pikul lada setahun. Rajanya begitu makmur sehingga sanggup membangun istana dengan perkarangan luas dikelilingi tembok batu dengan benteng setinggi 10 kaki dan dilengkapi dengan 32 pucuk meriam. Pada bagian luar mengelilingi istana dibangun parit dalam untuk membendung serangan. Raja Bujang juga mempunyai beberapa kapal yang membawa hasil-hasil bumi Teurumon langsung ke India, Penang, Singapura, bahkan Batavia. Pendapatan daerah ini ditaksir mencapai 100.000 Peso Spanyol dari pungutan bea ekspor dan impor sebesar 5%. Pendapatan tersebut tidak lagi dikirim ke Bandar Aceh sebagai *wasee* karena Teurumon sudah memakai bendera kerajaan sendiri.

Raja Bujang beristeri seorang putri dari perempuan Kristen asal Padang. Ketika pada 1793 pasukan Perancis menyerang Padang, perempuan tersebut diselamatkan oleh seorang Aceh ke pedalaman Minangkabau di mana ia di-Islam-kan dan bersedia dinikahinya. Dari pernikahan itu lahir seorang putri yang bernama Nona Gadis. Ketika kedua orang tuanya berangkat naik haji dengan menyinggahi Teurumon. Nona Gadis yang waktu itu sudah dewasa, dilamar Raja Bujang kepada kedua orang tuanya. Dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki

[42] John Anderson, *op.cit.*, hlm. 51. Canning mencatat bahwa tidak semua pelabuhan kecil itu ikut membangkang. Singkil misalnya mengirim wase kepada sultan berupa kapur barus dan kemenyan, senilai $3000 setahun. Kepatuhan itu juga dilakukan oleh Barus, Tapaktuan dan Ligan. Namun mungkin ini relatif.

bernama Nyak Banta.

Sementara itu, di Bandar Aceh, ketika Sultan Jauhar Alam wafat pada Desember 1823, pewaris kerajaan yang sudah ditentukan adalah putera almarhum dari istri gahara, bernama Tuanku Ibrahim. Para Panglima Sagoe memutuskan lain. Putera sultan tertua dari isteri biasa bernama Tuanku Darid atau Tuanku Daud harus dilantik, dan ditabalkan dengan gelar Sultan Alauddin Muhammad Syah. Tuanku Ibrahim mendapat tugas memelihara tertib hukum di bagian pantai Barat dan Selatan Aceh, terutama untuk pengutipan *wasee* atau bea cukai lainnya.Tuanku Ibrahim sangat aktif, cerdas, berani, tidak ambisius dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Tidak heran bila orangtuanya memilih dia sebagai pewaris tahta. Begitupun, Tuanku Ibrahim tidak menentang keputusan para Panglima Sagoe yang menolaknya. Dia banyak membantu saudaranya dan berbakti bagi stabilitas kerajaan, karena menyadari kerajaan perlu dibina kembali, sekaligus membangun kekuatan, wibawa, dan tata-tertibnya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, berbagai rongrongan Belanda, tertutup dan terbuka, berangsur-angsur dapat dicegah.

Ketika Tuanku Daud wafat, dan keluar keputusan untuk menetapkan putera almarhum Sultan Muhammad Syah, bernama Tuanku Sulaiman, sebagai sultan penganti, Tuanku Ibrahim juga menerima putusan itu. Mungkin karena kegiatan-kegiatannya tersebut, sementara penulis sejarah mencurigai Sultan Ibrahim dengan mengatakan dia naik tahta karena Panglima Sagoe XXII menggulingkan Tuanku Sulaiman, bergelar Sultan Ali Iskandar setelah baru tiga bulan menjadi sultan. Namun, menurut kapten Belanda, Veltman, dalam bukunya berjudul *Notaover de Geschiedenisvan het Landschap Pidie*, Tuanku Ibrahim naik tahta setelah Tuanku Sulaiman meninggal dunia. Veltman mengatakan, bahwa ia menemui silsilah tersebut di kantor pengawas Belanda di Sigli ketika bertugas di sana.

Dalam dokumen tersebut, Tuanku Sulaiman telah menikahi putri Tuanku Ibrahim bernama Putri Sari Banun. Menurut Veltman, Tuanku

Ibrahim sebagai sultan yang mengeluarkan *sarakata* di Pedir bertanggal 8 Rajab 1269 Hijriah (24 April 1853) yang ditandatanganinya. Ini berarti Tuanku Ibrahim adalah sultan pada 1853. Catatan lain, ketika Courier dit Dubekart berada di Bandar Aceh pada 1855, sultan pada waktu itu adalah Tuanku Ibrahim.[43] Bersamaan dengan penugasan Tuanku Ibrahim sebelumnya sebagai wakil pantai barat Aceh, juga ditetapkan pengangkatan saudara sultan yang lain bernama Tuanku Raja Muda bergelar Tuanku Rumoh Panjang yang bertugas mengawasi pantai utara Aceh, seperti Samalanga, Lhokseumawe, dan sekitarnya. Adiknya Tuanku Abbas bertugas di sepanjang pantai Pidie dengan kedudukan di Batee.

Penyebab Serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu

Serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu disebutkan sebagai balasan atas serangan terhadap kapal dagangnya *Friendship*. Angkatan Laut Amerika Serikat telah menjangkau jauh hingga ke Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonomi negaranya atau meningkatkan pengaruh kawasan untuk mengatasi musuh negara dan ideologi, atau balas dendam nasional mereka terhadap daerah ini. Pertama kali dalam sejarah Indonesia telah terjadi serangan langsung Angkatan Laut Amerika Serikat di Kuala Batu di Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh. Serangan militer Amerika Serikat terhadap Kuala Batu (*Qualla Batto*) tersebut merupakan respon terhadap apa yang mungkin paling ditakuti dunia saat itu, yaitu;tindakan bajak laut di perairan pesisir barat selatan Aceh. Sebelumnya para pedagang Amerika Serikat pertama kali tiba di Sumatra pada akhir abad ke-18.

Sejak saat itu hingga 1860 diperkirakan kapal Amerika Serikat sebagian besar bersandar ke pelabuhan Salem, Boston Amerika Serikat. Di mana tercatat sekitar 1000 pelayaran yang telah membawa lada seharga sekitar £370,000,000., atau seharga 17.000.000., dolar.

[43] Tarling, Nicholas, 1957, "Sumatra and The Archipelago", dalam *British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago, 1824-1871,* JIMBRAS, hlm.1, mencatat bahwa suasana di Aceh pada tahun 1851 sedang kusut. Tuanku Ibrahim ingin menggantikan menantunya Sultan Ali Iskandar Syah. Ketika ia jadi pemangku. Namun keterangan ini tidak jelas karena Tarling tidak menyebutkan sumber.

Disebutkan hampir setengahnya merupakan lada yang dihasilkan dari daerah-daerah di Aceh selama periode tersebut.[44] Bahkan, biaya operasional rendah dengan kapal yang cepat yang diaktifkan pedagang Amerika Serikat sehingga mereka dapat bersaing dengan Inggris dan Belanda dalam perdagangan lada. Hal ini merupakan permasalahan lain yang menjadi perhatian dari kedua kekuatan yang sama-sama mengincar Aceh. Akibatnya Sultan Aceh, Muhammad Syah (1823-1838) berada di bawah tekanan Belanda dan Inggris, berusaha mengkaji hubungan perdagangan Amerika Serikat di Aceh.

Pembajakan terhadap kapal dagang Amerika Serikat, *Friendship* milik Silsbee, Pickman dan Stone diduga sebagai akibat pelanggaran undang-undang perdagangan kepada Inggris atau Belanda.[45] Dalam perjanjian yang sudah ditandatangani Aceh dengan Inggris pada 1819 sebenarnya termasuk salah suatu upaya untuk menyingkirkan kekuatan Amerika Serikat di Aceh.Pada awalnya pembajakan kapal dagang Amerika Serikat tidak jelas apa dilakukan oleh perompak murni atau hanya "permainan politik" akibat perebutan pengaruh perdagangan internasional lada di pesisir barat selatan Aceh. Perairan pesisir barat selatan Aceh saat itu dikuasai bajak laut. Bajak laut di sekitar perairan ini sering disebut "*Viking of the East*" atau "*Viking* dari Timur", karena tidak ada kapal dagang yang aman dari ancaman perompakan. Kekuatan mereka karena posisi pantai yang strategis sehingga mereka dapat bersembunyi dan berlindung di banyak tempat, seperti teluk dan muara sungai yang sepi di sepanjang pantai Sumatera. Mereka hanya keluar untuk merompak dengan mengarungi laut secara berkelompok sampai sebanyak 50 perahu dengan kecepatan tinggi. Mereka mengejar kapal dagang yang berlayar dengan lambat karena muatan yang penuh dari berbagai wilayah di perairan Hindia Timur.Mereka menggunakan kedua barisan dayung dengan kapal

[44] Pelabuhan-pelabuhan yang dikunjungi antara lain; Meulaboh, Tapaktuan, Teurumon, dan Singkil. Ada pula pelabuhan yang didatangi langsung seperti Rigaih, Meukek, Labuhan Haji, Kuala Batu, Susoh, Asahan, Said, M., *Aceh Sepanjang Abad*, Medan; Waspada, hlm.509.

[45] M.Nur El Ibrahim, *Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh*, Jakarta: Grasindo, hlm.30.

layar lebar yang dipersenjatai. Mereka mengenakan jubah merah dan rantai, *rencong, kelewang* sering diacungkan, dan pelontar batu api. Para perompak membunuh setiap orang, memenjara untuk ditebus, atau akan dijual sebagai budak.

Pada Februari 1831, kapal dagang Amerika Serikat bernama "*Friendship*" sedang berlabuh di Kuala Batu. Kapal ini hendak membeli lada untuk sebuah kargo dengan kapten kapal Charles Moses Endicott. Ia sudah sering pergi-pulang antara Kuala Batu dan pelabuhan Salem Amerika Serikat. Ia sering memperoleh keuntungan yang besar. Kapal ini membawa 17 awak kapal dan tiba di Kuala Batu pada 22 September 1830. Setelah memuat stok lada yang sudah tersedia di sana, kapal masih harus menunggu panen pada Maret dan Juni 1831, sehingga mereka menyingkir ke sebuah pulau kecil yang berjarak sejauh dua mil dari Kuala Batu.[46] Suatu malam, kapal didatangi sebuah perahu yang menawarkan sebanyak 50-60 karung lada selundupan kepada Endicott.[47] Beberapa hari setelah menampung lada selundupan tersebut, kapal ini diminta mendekat ke Kuala Batu untuk memuat lada hasil panen baru berjumlah ratusan karung. Serangan bajak laut justru terjadi ketika kapal sedang menerima muatan lada, ketika Endicott sedang berada di daratan untuk menimbang lada.

Bajak laut menyamar sebagai membawa lada dengan perahu. Akibat serangan tersebut lima awak kapal terbunuh dan selebihnya melompat ke laut menyelamatkan diri.Setelah itu, Endicott beserta awak kapal yang selamat menyingkir ke Meukek. Di sana ada kapal Amerika Serikat lainnya bernama "*James Monroe*"yang dinakodai Porter dan dua buah kapal lainnya, "*Governor Endicott*" dan "*Palmer*". Berkat bantuan mereka kapal "*Friendship*"berhasil dikuasai kembali.[48] Owen Rutter dalam bukunya "*The Pirate of Wind*", mengatakan bahwa ada beberapa awak kapal tewas dalam serangan itu. Para pembajak diperkirakan orang Kuala Batu merampok kapal dan membawa semua barang serta uang tunai

[46] *Ibid.*, hlm 425.
[47] James Duncan Philip, 1884. *Salem and the Indies; Story of the Great Commercial Era of the City.*
[48] Said, *op. cit.*, hlm. 426.

senilai 8.000 dolar. Kapten kapal "*Friendship*", Charles Moses Endicott, saat itu berada di darat bersama empat anak buahnya. Ketika kembali ke kapal, ia menemukan awak kapalnya telah tewas, kargo hilang dan isi kapal berantakan. Mereka menyingkir dari daerah tersebut dan meminta bantuan kapal kargo Amerika Serikat lainnya yang berada di sepanjang pesisir barat selatan Sumatera.[49]

Menurut versi lain, penyerangan ini ganjil karena bajak laut hanya menyerang kapal "*Friendship*". Sedangkan orang-orang Amerika Serikat yang sedang berada di darat termasuk Endicott tidak diserang. Kapal-kapal Amerika Serikat lainnya di Meukek juga tidak diserang, mereka bebas datang ke Kuala Batu. Endicott tidak menjelaskan sikap penguasa setempat dan mengapa tidak menemui raja Kuala Batu untuk melaporkan kejadian tersebut. Sementara bajak laut yang menyerang kapal itu telah menyingkir ke pelabuhan-pelabuhan lain.

Saat mereka singgah di "*Tallapow*", disebutkan bahwa di Kuala Batu suasana cukup ramai karena hampir semua penduduk menggunakan pakaian merah, putih dan biru, kemeja strip, dan pakaian orang Eropa lainnya. Endicott menyebut pakaian tersebut adalah hasil curian dari kapal mereka termasuk taplak wol dan kabin-kabin.

Kapal dagang "*Friendship*" tiba kembali di Amerika Serikat, masyarakat di sana heboh dan menuntut pembalasan. Presiden Amerika Serikat Andrew Jackson memerintah hukuman berat terhadap penduduk dan pemimpin Kuala Batu untuk menuntut dan memperbaiki serta mengembalikan segala properti kapal yang disita atau dirusak. Pemimpin Kuala Batu Molay Muhammad (Sidi Muhammad) yang oleh Amerika Serikat disebut "Mohamed" telah menyangkal semua tuduhan mengenai keterlibatannya atas serangan terhadap kapal itu.[50]

---

[49] Dalam versi lain disebutkan Pada 7 Februari 1831 kapal tersebut berlabuh di pelabuhan Kuala Batu, Aceh Barat Daya. Ketika M. Endicot dan anak huahnya berada di daratan, tiba-tiba kapal tersebut dibajak oleh sekelompok penduduk Kuala Batu. Akan tetapi, dapat dirampas kembali oleh kapal-kapal Amerika Serikat lainnya yang kebetulan saat itu berada di perairan Kuala Batu. Namun mereka menderita kerugian sebesar US $ 50.000 dan tiga anak buah kapal terbunuh.

[50] Peristiwa serangan atas kapal itu kemudian menimbulkan sejumlah tanda tanya. Pasalnya, selama setengah abad menjalin hubungan dagang di antara Kuala Batu dengan pedagang Amerika Serikat belum pernah terjadi perompakan seperti itu di sana.

Angkatan Laut Amerika Serikat ditugaskan untuk menghukum penjahat Kuala Batu dengan setimpal. Menurut anggapan orang Amerika Serikat, Sidi Muhammad telah menghina secara berlebihan dengan memberikan harga yang tinggi atas kepala Kapten M. Endicott, perwira dan pelaut yang telah lolos dari serangan bajak laut tersebut. Untung saja saat itu ada kapal dagang lainnya yang berhasil membawanya kembali ke pelabuhan di Salem, Boston Amerika Serikat.

Faktor-faktor penyebab lainnya, yaitu; *Pertama*, peristiwa penyerangan dipicu oleh kekecewaan orang Aceh yang selalu ditipu oleh pedagang Amerika Serikat dalam perdagangan lada. Hal itu akibat suatu ketika diketahui bahwa berat lada yang dibeli dari Aceh 3.986 pikul, tetapi ketika dijual kembali oleh pedagang Amerika Serikat beratnya menjadi 4.583 pikul. Hal itu dilakukan pedagang Amerika Serikat dengan penipuan pada takaran timbangan, dengan cara menyetel suatu sekrup yang dapat dibuka di bagian bawah timbangan yang berbohot 56 lbs, yang diisi 10 atau 15 pon timah, sehingga dalam satu pikul lada, orang Aceh ditipu sebanyak 30 kati.[51]

Kedua, penyerangan itu akibat adanya provokasi oleh Belanda, karena Amerika Serikat telah berhasil menguasai perdagangan lada dikawasan pantai barat dan selatan Aceh. Belanda ingin merusak nama baik Kerajaan Aceh di dunia internasional dengan tuduhan bajak laut dan tidak mampu melindungi kapal-kapal asing yang berlabuh di perairannya.[52]

Respon Sultan Aceh Alaidin Muhammad Syah (1824-1836) terhadap aksi pembajakan kapal dagang asing di wilayah perairan Aceh tersebut menyebutkan bahwa perompakan ditunggangi kepentingan politis Belanda.Belanda sengaja mempersenjatai sebuah kapal Aceh yang dirampasnya di perairan pantai barat selatan Aceh. Kapal itu dinakodai suruhan Belanda bernama Lahuda Langkap.[53] Saat merompak kapal dagang Amerika Serikat di Kuala Batu pada 7 Februari 1831, Lahuda bersama

[51] M. Nur El Ibrahim, *op.cit.*
[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*

anak buahnya telah dibayar Belanda untuk menyerang kapal tersebut dengan menyamar dan menggunakan bendera milik Kesultanan Aceh.

Respon Amerika Serikat terhadap pembajakan kapal dagangnya di Kuala Batu tersebar luas. Berita itu menjadi transparan ketika kapal tersebut tiba kembali di pelabuhan Salem Boston pada 16 Juli 1831. Senator Nathanian Silsbee, salah seorang pemilik kapal itu adalah senator dari Partai Republik yang merupakan oposisi pemerintahan Presiden Andrew Jackson. Ia seorang politikus yang sangat berpengaruh pada masa itu. Ia menyurati Presiden pada 20 Juli 1831 dan meminta agar pemerintah Amerika Serikat menuntut ganti-rugi atas kejahatan yang telah dilakukan penduduk Kuala Batu terhadap kapal tersebut.Ia menyampaikan petisi yang ditandatangani seluruh pedagang di Salem Boston kepada pemerintah Amerika Serikat. Isi petisi tersebut meminta untuk segera dikirimkan kapal perang ke perairan Kuala Batuuntuk menuntut ganti-rugi dan tanggungjawab dari penguasa lokal. Hal tersebut didukung oleh pemilik kapal bernama Robert Stones. Ia bersama Andrew Dunlop sangat akrab dengan Presiden Andrew Jackson. Mereka meminta kepada Panglima Angkatan Laut Amerika Serikat, Levy Woodbury untuk mendesak presiden mengirimkan kapal perang ke Kuala Batu. Silsbee secara pribadi juga menulis surat kepada Woodbury. Ia menggambarkan besarnya keresahan akibat peristiwa penyerangan kapal dagang tersebut bagi pedagang-pedagang lada di Salem, Boston.

Pemerintah Amerikasebelum menerima imbauan Senator Silsbee telah memutuskan mengambil tindakan terhadap penyerangan kapal *Friendship* di Kuala Baru. Setelah mengetahui peristiwa pembajakan itu melalui surat kabar, Woodbury segera memerintahkan agar disiapkan segala keperluan untuk menuntut ganti-rugi atas pelanggaran tersebut. Presiden berjanji akan memutuskan dengan cepat. Dia membicarakan permasalahan tersebut kepada anggota parlemen pada Desember 1831. Ia mengatakan kepada Senat dan parlemen bahwa perlawanan terhadap kepentingan Amerika Serikat telah dikobarkan di lautan Hindia Timur (Indonesia) dengan penyerangan dan penjarahan terhadap kapal dagang

itu ketikasedang melakukan pembelian lada di pelabuhan Kuala Batu.

Amerika Serikat telah membuka ruang diplomatis, tetapi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Presiden Andrew Jackson mengatakan; *"para pelaku penyerangan hanyalah kelompok masyarakat kecil di dalam lingkup hubungan internasional yang beradab sehingga sangat tidak mungkin untuk dapat diselesaikan secara diplomatis"*. Selanjutnya ia mengatakan; *"Saya segera perintahkan mengirim angkatan laut untuk menuntut pertanggung-jawaban atas kerusakan serta membayar gantirugi kepada pemilik"*.[54] Presiden AS dengan yakin mengatakan; *"mereka (Kuala Batu) telah melakukan tindakan penyerangan yang mengerikan, pastilah anggota pemerintahan yang terorganisasi mampu menjaga hubungan bilateral dengan negara asing, pertanggung-jawaban dapat dinegosiasikan. Namun, jika mereka hanya kelompok bajak laut tanpa hukum, angkatan laut Amerika Serikat-lah yang akan mendapatkan perintah untuk memberikan hukuman"*.[55]

Serangan Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Kuala Batu

Kapal angkatan laut Amerika Serikat yang dikirim untuk "memberikan hukuman" terhadap 'bajak laut' Kuala Batu adalah kapal *Potomac*. *Potomac* adalah kapal angkatan laut yang dibangun di *yard* Washington pada 1822. Kapal perang ini dilengkapi dengan 42 meriam peluncur, dan 30 penahan gempuran meriam. Komandan ekspedisi dipimpin Komodor John Downes. Ekspedisi tersebut merupakan pelayaran pertama *Potomac* ke luar negeri. Kapal ini berangkat dengan membawa kekuatan gabungan 300 orang pasukan "*naviseal*/baret biru" bersenjata lengkap dari angkatan laut dan marinir Amerika Serikat. Kapal itu meninggalkan Sandy Hook, New York, pada 28 Agustus 1831, menuju Kuala Batu dan untuk pertama kalinya militer Amerika Serikat melakukan intervensi resmi terhadap wilayah itu.

Tanggal 9 Agustus 1831, John Downes diberi instruksi lengkap mengenai segala tindakan yang harus dilakukandi Kuala Batu, yaitu:

[54] Jeremiah N Reynolds, 1835, *"Voyage of the United States FrigatePotomac"*, New York: Harper and Brothers, 1835.

[55] *Ibid.*

(1) Mencari informasi mengenai penyerangan kapal *Friendship*.Apabila informasi yang diperoleh sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh awak kapal tersebut di Washington, maka harus dituntut gantirugi dan pembalasan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Kuala Batu terhadap kapal itu; (2) Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi, maka pelaku penyerangan harus ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili sebagai bajak laut; (3) Sebaliknya, apabila informasi yang diperoleh di Kuala Batu berbeda dengan keterangan kapten kapal, maka Amerika Serikat hanya meminta ganti-rugi serta menghukum mati pelaku penyerangnya.

Pada 29 Agustus 1831, *Potomac* berangkat dari New York ke Kuala Batu dengan kekuatan 260 marinir. Sebelum sampai di Kuala Batu John Downes melakukan penyimpangan terhadap instruksi panglima angkatan laut Amerika Serikat yang diterimanya. Ia terpengaruh oleh cerita yang didengar dari kapten kapal *Friendship* yaitu; Endicott dan orang-orang Inggris yang dijumpainya di Tanjung Harapan saat pelayaran ke Kuala Batu itu, yaitu; mengenai tidak mungkin akan mendapatkan ganti-rugi dari penguasa lokal Kuala Batu.

Tanggal 5 Februari 1832, *Potomac* tiba di perairan Kuala Batu dengan berlabuh pada jarak 5 mil dari tepi pantai. Mereka mengatur strategi pendaratan untuk mengetahui situasi Kuala Batu dan kemampuan pertahanannya. Namun, Downes lebih mendengar nasihat dari seorang penduduk Pulau Kayu bernama Po Adam. Ia sudah bersahabat baik dengan para pedagang lada dari Amerika Serikat. Dia menyarankan kepada Amerika Serikat untuk berurusan dengan Molay (Sidi) Muhammad. Menurutnya, pemimpin Kuala Batu tidak perlu lagi dinegosiasikan, kecuali dengan tindakan kekerasan.

Downes kemudian mengutus Letnan Marinir Shubrick pada dini hari 6 Februari 1832 untuk mengintai keadaan di darat. Penduduk Kuala Batu tidak terkecoh oleh penyamaran yang dilakukan Shubrick. Mereka berkelompok di pantai untuk menghadapi sesuatu kemungkinan terburuk. Ia melaporkan bahwa Kuala Batu memiliki beberapa benteng

pertahanan. Selanjutnya Downes memerintahkan untuk mendaratkan kekuatan seluruh pasukan *Potomac* dan juga mengepung *kuta-kuta* (benteng-benteng) yang berada di sekitar pantai Kuala Batu untuk menangkap pemimpin-pemimpinnya.

Penduduk Kuala Batu saat penyerangan itu sekitar 2.000 orang; 500 di antaranya adalah prajurit tempur dari beberapa benteng di Kuala Batu. Pasukan Kuala Batu telah siaga untuk berjuang dan mempertahankan benteng-benteng pertahanan mereka, yaitu;

- Benteng pertama, atau benteng yang paling depan di pinggir laut. Benteng ini dipimpin oleh raja bernama Moley Mahomed atau Sidi Muhammad.[56] Letak benteng itu sebelah barat laut Kuala Batu,atau dengan jarak 60 *ela* dari permukaan laut.
- Benteng kedua, terletak sekitar 5.000 *ela* dari benteng pertama. Benteng kedua dipimpin oleh Teungku Di Lama yang juga benteng Teuku Di Lama.
- Benteng ketiga terletak di dekat muara Kuala Batu. Benteng ini dipimpin Keuchik Dorahman.
- Benteng keempat terletak persis di depan kota pelabuhan. Benteng ini hanya berjarak 30 *ela* dari garis pantai. Benteng ini dipimpin oleh raja yang paling berpengaruh saat itu bernama Cek Abdullah. Benteng-benteng tersebut membelakangi hutan rawa, sehingga pasukan Amerika Serikat mengira bahwa orang-orang Kuala Batu tidak akan lolos kalau dikepung.

Meski pasukan Amerika Serikat mengatakan mereka adalah para pedagang lada, panglima utama Kuala Batu Sidi Muhammad sama sekali tidak mempercayainya. Pihak Kuala Batu rupanya sudah bertekad akan menghadapi setiap tuntutan dan kemungkinan terburuk dari Amerika Serikat tersebut.[57] Tanpa membuang waktu Sidi Muhammad memerintahkan meriam-meriam Kuala Batu ditembakkan ke arah perahu-perahu milik pasukan Amerika Serikat yang sedang mendarat.

[56] Putnam, *op. cit*, hlm.102.
[57] *Penang Gazette*, 2 Februari 1838, dalam Nicholas Tarling, *op. cit*, hlm.185.

Sementara dari atas *Potomac*, mereka terus menggempur benteng-benteng sehingga dalam tempo singkat suasana berubah menjadi perang total.

Akhirnya Sidi Muhammad dan pemimpin benteng lainnya gugur dalam penyerangan itu. Namun perlawanan masih terus dilakukan oleh pasukan Kuala Batu yang masih tersisa di dalam benteng. Kendati pasukan marinir telah menguasai benteng-benteng tersebut. Ketika pasukan tambahan mendarat, sisa-sisa pejuang Kuala Batu berhasil mengundurkan diri dan masuk ke hutan rawa di sekitar tempat itu. Pasukan marinir Amerika Serikat mengatakan, bahwa orang-orang Kuala Batu telah berhasil menghindari sergapan melalui terowongan rahasia (saluran-saluran atau sungai-sungai buatan).[58]

Setelah itu Amerika Serikat membakar kota Kuala Batu dan merampas harta yang dilakukan oleh pasukan marinir. Tidak hanya berhenti di situ saja, setelah benteng-benteng atau *kuta-kuta* yang terbuat dari kayu dan tanah gundukan dengan luas sekitar 25x25 meter^2 dihancurkan oleh 42 buah meriam pelontar dan 30 buah anti meriam. Kerugian 2 (dua) orang pasukan dan 11 orang lainnya luka-luka di pihak marinir Amerika Serikat.[59] Downes kemudian memerintahkan untuk menembaki Kuala Batu dengan meriam-meriam dari atas kapal *Potomac*. Akibatnya Kuala Batu hancur serta lebih dari 300 orang penduduk Kuala Batu terbunuh.[60]

Dampak Serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu

Dampak serangan terhadap Kuala Batu yang dilakukan pasukan Downes dengan kapal perang *Potomac*.Mereka mendapat kecaman dari sebagian politikus di Amerika Serikat, diantaranya George Bencroft yang pada waktu penembakan Kuala Batu berada di atas kapal *Potomac*. Kemudian sebagian surat kabar di Amerika Serikat di Washington seperti *Nile's Weekly Register* juga mengecam tindakan tersebut.

[58] Nicholas Tarling, *ibid.*

[59] Laporan Angkatan Laut AS, *"Cougar Scream"*, US 166th Marine Corps, Vol. 1 Nov 1941, No. XXIII.

[60] *Ibid.*

Pada 23 Juli 1832 seorang anggota parlemen Amerika Serikat, Henry A.S. Dearborn dari Partai Republik dari Massachusetts yang beroposisi mengajukan mosi yang meminta agar Presiden Andrew Jackson menyampaikan kepada Kongres mengenai instruksi kepada Downes untuk menggempur Kuala Batu. Laporan tentang peristiwa tersebut dan mosi itu pun diterima Sidang. Pada hari itu Presiden Jackson memenuhi permintaan kongres, tetapi ia minta agar hal tersebut tidak dipublikasikan sebelum laporan lebih lanjut diterima.Akibat penyerangan Kuala Batu tersebut, Downes dikritikdengan keras di Amerika Serikat, terutama pers dan publik karena tindakannya dianggap keterlaluan. Namun, presiden Jackson tetap menyetujui seluruh tindakan tersebut dan mengatakan bahwa; *"untuk memberikan hukuman seperti itu, akan menghalangi mereka dan orang lain untuk melakukan agresi yang sama seperti ini". "Hal ini tetap perlu dilakukan dan efeknya berupa penghargaan untuk bendera kami, dan keamanan tambahan bagi perdagangan kami".*

Pada sidang Sabtu 24 Juli 1832, permintaan Presiden Amerika Serikat itu diperdebatkan. Anggota Dearborn berpendapat bahwa hal tersebut harus dipublikasikan karena apabila ditutup-tutupi dapat menjadi sorotan negatif dari publik.Sebaliknya, Ketua Komisi Urusan Angkatan Laut, Michael Hoffman dari Partai Demokrat New York menentang pendapat Dearborn dengan suatu amandemen, bahwa peristiwa tersebut dapat dipublikasikan, tetapi harus menunggu laporan lebih lanjut.

Dalam amanat tahunannya, Presiden Jackson sudah tidak menyinggung sama sekali peristiwa penggempuran Kuala Batu dengan kapal perang *Potomac* yang dipimpin Downes. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa penyerangan Kuala Batu dan pembantaian penduduknya oleh marinir Amerika Serikat telah ditutup.[61]

Dampak serangan Amerika terhadap Kuala Batu dilukiskan dalam berbagai versi. Baik ekonomi, politis bahkan karya sastra. Berkenaan dengan keberhasilan serangan kapal angkatan laut *Potomac* terhadap Kuala Batu. Di mana kapal itu melanjutkan tur resminya mengelilingi

[61] M.Nur El Ibrahim, *op. cit.*

dunia dan menjadi kapal angkatan laut Amerika Serikat pertama yang mendapatkan penghargaan dari raja dan ratu *Sandwich Island* (Hawaii) sehingga kembali ke Boston pada Juni 1834.[62]

Selain itu, penyerangan Kuala Batu juga telah menjadi seting cerita sebuah novel di Amerika Serikat tahun 1901 yang dibuat Munroe Kirk. Novel sejarah itu berjudul "*A Son of Satsuma*" merupakan pembauran antara fiksi dan fakta dengan protagonis utama Bob Whiting yang menemukan dirinya terdampar di Kuala Batu, Sumatera ketika kapalnya *Friendship* ditawan oleh bajak laut lokal. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang "bermata abu-abu" dan ia mengamati kehidupan di ladang lada Sumatera. Terakhir ia diselamatkan oleh *Potomac* sebagai "campur tangan" Paman Sam di dunia internasional. Novel diakhiri Whiting dengan sepak terjangnya di Jepang menyamar sebagai Kato dan kemudian bergabung dengan *United States Naval Academy*.[63]

Serangan terhadap Kuala Batu "*Qualla Batto*" juga dirayakan di Amerika Serikat di Korps Marinir, tetapi lebih sedikit disebutkan daripada di tempat lain. Sebagai tindakan pertama militer Amerika di Asia, eksploitasi Downes "barangkali tidak terkenal dan dirayakan dalam sejarah militer AS" seperti yang sebelumnya oleh angkatan laut yang dipimpin Stephen Decatur melawan bajak laut di pantai Barbary Tripoli di Libya. Diperkirakan telah terjadi gubahan pembukaan himne marinir Amerika Serikat pada lirik bait, "*dari lorong-lorong Montezuma*", untuk bait; "*dari tepi Qualla Batto*".

Setelah penyerangan Amerika terhadap Kuala Batu sepertinya tidak menyurutkan langkah para pedagang Amerika Serikat untuk terus berdagang di sana. Tujuh tahun setelah itu, pada 28 Agustus 1838, kapal dagang Amerika Serikat "*Eclipse*" juga diserang oleh kelompok orang di Meukek yang menewaskan kapten kapal Charles T.Wilkens. Peristiwa penyerangan hampir sama dengan penyerangan terahadap kapal *Friendship*. Pembajakan yang terjadi di Meukek dilakukan oleh 24

62 "*Voyage of the United States Frigate Potomac*", *op. cit.*

63 Kirk Munroe, *A Son of Satsuma; or with Perry in Japan*, dalam *the United Stated Attack on Kuala Batu*, dalam *Sejarah Melayu*, www.*sabrizain@malaya.org.uk*, diakses 18 Maret 2012.

orang Aceh, yang awalnya meminta izin untuk bertemu. Saat itu, Wilkens sedang didera demam di dalam kabin. Namun ketika mereka sudah berada di dek, kapten kapal telah meminta mereka untuk menyerahkan senjatanya sebelum naik ke kapal. Hal ini awalnya disetujui tanpa ada perlawanan. Namun, ketika kapten muncul di dek untuk menerima mereka, mereka memohon agar senjata dikembalikan sebagai tanda persahabatan dan itikad baik. Wilkens menyetujui permintaan ini dan senjata orang Aceh dikembalikan, beberapa menit kemudian, ia ditusuk dan dibunuh. Kedua awak kapal lainnya juga ditikam, tetapi berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Sedangkan kapten kedua sedang berada di darat untuk menimbang lada, namun mereka berhasil kembali membawa *Eclipse* ke Salem, Boston Amerika Serikat.

Para "bajak laut" Meukek telah menjarah kapal tersebut sehingga Amerika menderita kerugian 26.000, dolar, empat peti opium, dua peti pakaian, dua buah jam emas, teropong, dan sebagainya.[64] Raja setempat memberikan bantuan kepada mereka ketika menerima laporan penyerangan. Untuk membalas tindakan penyerangan tersebut, tidak perlu menunggu perintah presiden Amerika Serikat, karena Komodor Reid dengan kapal perang *Columbia* langsung menerima kabar ini ketika sudah mendekati Colombo, Srilanka. Dia langsung berlayar kembali ke Aceh. Tiba di Meukek, mereka juga langsung membombardir kota ini dengan kekuatan 30 perwira, dan 300 pasukan marinir. Dalam beberapa jam serangan dengan gempuran meriam, Meukek terbakar dan jatuh korban beberapa penduduk meninggal dunia, dan lainnya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di hutan-hutan di sekitarnya.

Dampak dari cara Amerika Serikat "main hakim sendiri" menyelesaikan sengketa maut antara pembeli dan penjual lada pada masa itu, ternyata diikuti oleh negara barat lainnya, seperti Perancis yang juga melakukan penyerangan militer terhadap Meukek pada 1839. Mereka menyerang Meukek dengan dalih menghukum pembajak laut atau perompakan "*piracy*". Cara-cara kekerasan melalui militerisme

[64] Said, *op. cit.*, hlm. 429.

tetap digunakan oleh para petualang dalam melancarkan aksinya untuk memperoleh keuntungan perdagangan yang besar dengan tindakan dan cara-cara kolonialisme.

Kesimpulan

Serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu disebut oleh Amerika Serikat sebagai penghukuman terhadap penyerangan atas kapal dagangnya *Friendship*. Tindakan main hakim sendiri Amerika Serikat telah menjangkau jauh hingga ke pantai barat selatan Aceh untuk melindungi kepentingan politik ekonomi mereka. Serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu akibat persaingan politik dalam perdagangan lada, dan provokasi Belanda terhadap Kerajaan Aceh. Di mana sejak 1789, Aceh sudah menjalin hubungan dagang dengan Amerika Serikat dan kapal-kapal mereka datang untuk memuat lada,dan kemudian mengangkutnya ke pelabuhan Salem, Boston Amerika Serikat, dan juga Eropa, Cina yang memuat sekitar 42.000 pikul atau kira-kira 3.000 ton.

Ketika harga lada di pasaran internasional mulai merosot tahun 1829, jumlah kapal Amerika Serikat yang datang ke Kuala Batu juga menurun. Kapal-kapal Amerika Serikat yang datang ketika depresi ekonomi dunia itu,antara lain kapal *Friendship* milik Silsbee, Pickman, dan Stone di bawah pimpinan nakoda Charles Moore Endicot. Endicott seorang mualim yang sering membawa kapal dagang ke Aceh. Tanggal 7 Februari 1831 kapal berlabuh di pelabuhan Kuala Batu, Aceh Barat Daya. Namun, ketika Endicot dan anak buahnya berada di daratan untuk menimbang lada, di perairan kapal awak kapal mereka dibajak oleh sekelompok penduduk Kuala Batu. Setelah kapal dapat direbut kembali, dicatat kerugian sebesar U$ 50.000 dolar dan tiga orang anak buah kapal terbunuh dalam serangan tersebut.

Penyebab serangan menurut pihak Kuala Batu, dipicu oleh kekecewaan penduduknya yang sering ditipu oleh pembeli lada dari Amerika Serikat. Hal itu diketahui ketika berat lada yang dibeli di Aceh 3.986 pikul, tetapi ketika dijual kembali oleh pedagang Amerika Serikat

beratnya menjadi 4.583 pikul akibat pemalsuan takaran timbangan.

Selain itu, ada upaya provokasi Belanda, karena Amerika Serikat berhasil menguasai perdagangan lada di kawasan pesisir barat selatan Aceh. Mereka bermaksud merusak citra kerajaan Aceh di mata internasional karena merajalelanya bajak laut akibat ketidakmampuan Kesultanan Aceh melindungi kapal-kapal internasional yang berlabuh di perairannya. Pihak Kerajaan Aceh membantah hal tersebut, dan menyebut Belanda sengaja mempersenjatai kapal Aceh yang telah dirampasnya. Ketika merompak kapal *Friendship* milik Amerika Serikat di Kuala Batu 7 Februari 1831, Belanda telah mengupah Lahuda Langkap untuk melakukan aksi pembajakan kapal dagang milik Amerika Serikat dengan menggunakan bendera Kerajaan Aceh.

Penyerangan kapal *Frienship*tersiar luas di Amerika Serikat dan semakin jelas ketika kapal itu telah kembali di Salem,Boston, Amerika Serikat pada tanggal 16 Juli 1831. Pemerintah Amerika Serikat melalui Panglima Angkatan Laut mengeluarkan surat perintah kepada kapten kapal *Potomac* pada 9 Agustus 1831, untuk menyerang Kuala Batu. Kapal perang bertolak ke perairan pantai barat selatan Aceh pada 29 Agustus 1831 dari New York dengan kekuatan 260 orang pasukan marinir.

Di Kuala Batu, pemimpin dan penduduk sudah menduga akan adanya serangan Amerika Serikat tersebut. Masyarakat bersiaga menghadapi serangan tersebut. Ketika kapal-kapal dayung Amerika Serikat merapat ke daratan langsung diserbu pasukan Kuala Batu. Pasukan marinir Amerika Serikat yang lebih kuat dan hebat dengan persenjataan modern sehingga sulit dibendung oleh pasukan Kuala Batu. Pasukan Amerika Serikat berhasil mencapai daratan Kuala Batu dan membunuh 300 orang yang berada di benteng, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka juga merampas harta benda milik penduduk Kuala Batu sebagai pampasan perang.

Setelah serangan berlangsung, Downes memerintah untuk membombardir kota Kuala Batu dengan meriam-meriam dari kapal *Potomac* sehingga kota ini hancur dan rata dengan tanah.Dampak terhadap

serangan tersebut, pasukan marinir Amerika Serikat mendapat kecaman termasuk di negerinya sendiri. Namun, presiden Amerika Serikat Andrew Jackson tetap tidak mau membahasnya dalam pidato penutup tahun. Peristiwa penyerangan Kuala Batu dengan kapal *Potomac* yang dipimpin Downes sudah ditutup-tutupi di Amerika Serikat. Dampak lain dari gaya Amerika Serikat "main hakim" dalam menyelesaikan "sengketa" antara pembeli dan penjual lada di Kuala Batu, dengan cara menggiring 'pemahaman masyarakat dunia' sebagai penyerangan kepada kelompok bajak laut atau perompak "*piracy*" yang legal dengan tindakan kekerasan.

Serangan Amerika Serikat di Kuala Batu meninggalkan jejak-jejak bersejarah, yaitu; pertempuran antara lokal dengan negara 'super power', jejak sejarah perdagangan dunia, dan melahirkan berbagai cerita fiksi baik yang dirangkai dalam tulisan maupun lisan rakyat; baik di Amerika Serikat maupun di Kuala Batu.

Dari peristiwa serangan Amerika Serikat terhadap Kuala Batu, di Aceh Barat Daya pada 6 Februari 1832, disarankan beberapa hal:

1. Perlu pengkajian, penggalian, dan melestarikan nilai-nilai historis yang berdimensi hubungan perdagangan internasional tersebut dalam penguatan jatidiri kita sebagai bangsa yang maritim besar, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai historis dan nilai-nilai edukatif yang membanggakan dari sistem perdagangan internasional di masa lalu.
2. Puing-puing kota Kuala Batu sebagai jejak bersejarah sudah tidak terbantahkan, namun berbagai tindakan vandalisme terhadap peninggalan bersejarah di kawasan ini telah terjadi sejak lama sehingga telah merubah bentuk tinggalan Kuala Batu di Kabupaten Aceh Barat Daya. Apalagi toponim nama Melayu 'Kuala Batu' yang di dunia internasional disebut "*Qualla Batto*" telah berubah menjadi nama lokal "Kuala Batee". Kuala Batu hanya dikenal sebagai pelabuhan udara kecil yang terdapat di Aceh Barat Daya.
3. Relokasi terhadap meriam-meriam yang sudah dipindahkan dari benteng-benteng yang terdapat di Kuala Batu perlu dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait kepentingan historis, edukatif, dan rekreatif di masa kini dan akan datang.

4. Perlu penataan kembali kawasan Kuala Batu menjadi kawasan maritim bersejarah yang dilengkapi dengan sarana edukatif historis, rekreatif dan pengembangan ekonomi berbasis kemaritiman di Kabupaten Aceh Barat Daya mengingat daerah ini sangat potensial untuk mendapatkan kembali kejayaannya; seperti yang pernah terjadi saat sistem perdagangan internasional pada masa lalu sebelum dihancurleburkan Amerika Serikat pada 6 Februari 1832.
5. Perlu dilakukan pemetaan dan penataan kembali 'kawasan maritim Kuala Batu'yang bersejarah dengan disinkronkan melalui pembangunan pelabuhan Surien yang segera dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di Lama Tuha, yaitu masih di lingkup kawasan Kuala Batu di Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga penguatan ekonomi kemaritiman di sana dapat kembali terwujud seperti yang pernah terjadi di sana dari abad ke-18 hingga awal abad ke-19, meski pun komoditasnya bukan lagi lada, tetapi sawit, biji besi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia.*Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ahmad, Zakaria. 2007. *Negeri dan Rakyat Aceh Barat Daya dalam Lintasan Sejarah Menuju Daerah Otonom.* Blangpidie: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Anderson, John. *Acheen and The Port on The North and East Coust of Sumatra.*

BPS, 2005. *Aceh Barat Daya Dalam Angka.* Kerjasama BPS dan Bappeda Aceh Barat Daya.

Djajadiningrat, R. Hoesein 1911. "Critisch Overzicht van de in Maleische werken vervette Gegevens over de Geschiedenis van het Soetanaat van Atjeh", dalam *BKI.*

Drewes, G.W.J. 1979. *Hikajat Potjut Muhammad.* The Hague: Martinus Nijhoff.

Finberg dan Skipp. 2005. Dalam Taufik Abdullah (ed), *Sejarah Lokal di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gottschalk, Louis.1969. *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Nutosusanto. Jakarta: UI Press.

Ibrahim, M. Nur El. *Selayang Pandang Langkah Diplomasi Kerajaan Aceh,* Jakarta: Grasindo.

Imuem Mukim Mahmudin wawancara di Susoh pada tanggal 24 Februari 2012.

Iskandar, Mohammad 2005. Nusantara Dalam Kurun Niaga Sebelum Abad ke-19, dalam *Naska, Tradisi Lisan, dan Sejarah.* Jakarta: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya Vol.7 Nomor 2, Oktober 2005.

Jean Gelman Taylor, dalam Henk Schulte Nordholt, *et.all* (ed.) 2008. Aceh: Narasi Foto, 1873-1930', *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta: KITLV.

Kartodirdjo, Sartono.1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.* Jakarta: PT Gramedia.

Kartodirdjo, Sartono.1997. "Modernisme dalam Perspektif Historis", dalam *Buletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. No.5.* ogyakarta: Fakultas Sastra.

Laporan Angkatan Laut AS, "*Cougar Scream*", US 166th Marine Corps, Vol. 1 Nov 1941, No. XXIII.

Lee Kang Hing, *The Sultanate of Aceh: Relations with the British 1760-1824.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Mahmudin, wawancara pada tanggal 24 Februari 2012, di Blangpidie.

Mulder, Nield. 1986. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Munroe, Kirk. 2012. *A Son of Satsuma; or with Perry in Japan,* dalam *the United Stated Attack on Kuala Batu*, dalam *Sejarah Melayu*, www. *sabrizain@malaya.org.uk*, diakses 18 Maret 2012.

Penang Gazette, 2 Februari 1838, dalam Nicholas Tarling.

Philip, James Duncan.1884. *Salem and the Indies; Story of the Great Commercial Era of the City.*

Reid, Anthony, 1992. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680.* Jakarta: Yayasan Obor.

Reynolds, Jeremiah N. 1835. "*Voyage of the United States FrigatePotomac*", New York: Harper and Brothers.

Rulofsz, Meilink M.A.P. 1962. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630.*

Said, H. Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad.* Medan: Harian Waspada.

Said, M. 1961. *Aceh Sepanjang Abad.* Medan: Percetakan Waspada.

Tarling, Nicholas. 1957. "Sumatra and The Archipelago", dalam *British Policy in the Malay Peninsula and Archipelago, 1824-1871,* JIMBRAS.

TAMBAK IKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DI KARESIDENAN SURABAYA PADA AWAL ABAD XX: SUATU KAJIAN AWAL[1]

Darto Harnoko[2]

Pendahuluan

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda usaha pertambakan telah berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Daerah-daerah yang menjadi tempat pembukaan tambak antara lain di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, pantai Pulau Madura dan pantai barat Sulawesi Selatan. Dari seluruh luas bentangan tambak ikan yang ada di pantai utara Pulau Jawa maka dua pertiganya berada di sekitar Selat Madura (Lekkerkerker, 1938:680).

Menurut kajian Spall di wilayah Karesidenan Surabaya, tambak ikan pertama kali ada pada tahun 1780. Pembuatan tambak ikan dilakukan di sepanjang pantai, karena pada masa VOC ada kewajiban terhadap para bupati waktu itu untuk memberikan laporan tentang jumlah ikan kepada VOC secara berkala. Untuk memuaskan pihak VOC maka para bupati di wilayah Surabaya dan Gresik memerintahkan pembuatan tambak ikan di sepanjang pantai kepada penduduk (Spall, 1865:12). Hal ini berkaitan dengan kebijaksanaan P.G van Overstraten, pejabat pemerintah daerah pesisir Jawa Timur pada tahun 1791-1796 yang memerintahkan pencatatan di semua kabupatan dalam wilayahnya.

[1] Makalah ini disampaikan pada seminar pada tanggal 25-28 April 2016 di Makassar Golden Hotel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

[2] Staf Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta.

Selain itu juga berkaitan dengan adanya kewajiban penduduk untuk membuat garam di pantai. Pada saat musim hujan maka pembuatan garam menjadi terganggu. Lambat laun timbul pemikiran untuk memanfaatkan tambak garam tersebut selama musim hujan untuk memelihara ikan. Hal ini terbukti memberi keuntungan maka kemudian penduduk di daerah pantai membuat tambak dengan tujuan untuk memelihara ikan (Spall, 1865:13).

Pada awalnya pembuatan tambak ini bersifat bebas dan dimiliki sepenuhnya oleh penduduk pribumi yang membuatnya, namun karena adanya tekanan dari para penguasa feodal atau pemegang jabatan lokal beserta perangkatnya maka tambak-tambak ikan tadi beralih menjadi milik penguasa feodal atau pemegang jabatan lokal beserta para perangkatnya (Spall, 1865:16). FA. Sutjipto dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa pada awal abad ke-19 daerah rawa-rawa di luar kota Surabaya, di *Regentschap* Surabaya telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk pembuatan tambak ikan. Hasil tambak ikan tersebut cukup untuk wilayah itu dan juga dikirim ke luar daerah (Sutjipto, 1983: 126).

Selanjutnya pada masa pemerintahan sementara Inggris (1811-1816), Raffles mengetahui bahwa usaha tambak ikan telah dilakukan di daerah-daerah pantai yang rendah. Ikan yang dipelihara adalah ikan bandeng. Untuk pemeliharaan yang paling intensif dilakukan di daerah Gresik. Hal ini memang karena pada awalnya pembuatan tambak ikan tujuannya yang utama adalah untuk memelihara ikan bandeng. Ikan-ikan jenis yang lain tidak dipelihara dan kalaupun berada dalam tambak karena ketidaksengajaan, seperti terbawa air laut.

Ikan bandeng mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan jenis ikan lain, maka mendorong orang untuk mendapatkan ikan bandeng dalam jumlah yang besar (Masyhuri, 1995:23). Cara yang paling tepat dilakukan adalah dengan memelihara ikan bandeng dalam tambak. Dengan melakukan pemeliharaan ikan bandeng dalam tambak para pemilik tambak mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang besar, disamping mendapat beberapa keuntungan yang lain (Spall, 1865:2).

Dalam pembuatan tambak ikan yang penting adalah pengaturan letaknya dengan lahan pertanian, karena ada juga areal pertanian penduduk yang memanfaatkan daerah rawa-rawa, sedangkan air yang digunakan untuk mengairinya menggunakan air tawar. Kemudian untuk proses produksi dari tambak ikan meliputi penyiapan tambak ikan untuk pemeliharaan, penaburan benih, pemeliharaan ikan dan pemanenan hasil. Selain itu juga berkaitan dengan kepemilikan dan pemasaran hasil tambak ikan serta kebijaksanaan pemerintah kolonial dalam sektor pertambakan.

Penelitian ini lebih menekankan pada usaha tambak ikan terutama ikan bandeng di Karesidenan Surabaya pada awal abad XX. Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada pendekatan sejarah ekonomi maritim.

Tambak Ikan Di Karesidenan Surabaya Pada Awal Abad XX Dalam Sketsa Sejarah

Secara administratif berdasar reorganisasi pada 1900 maka Karesidenan Surabaya dibagi dalam enam wilayah *regentschappen* yaitu Surabaya, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Lamongan. Sedangkan Sedayu dan Bawean yang sebelumnya merupakan suatu *afdeeling* tersendiri dijadikan *controle-afdeeling* dari Gresik. Pembagian administratif selanjutnya ke tingkat yang lebih rendah menjadi 13 *controle-afdeeling*, 28 distrik, 4629 desa *gubernemen* dan 319 desa partikelir (Encyclopedie IV, 1921: 30).

Jumlah penduduk Karesidenan Surabaya pada awal abad XX adalah 2.530.000 yang terdiri dari 21.000 orang Eropa, 39.700 orang timur asing dan 2.469.000 pribumi. Penduduk pribumi mayoritas adalah orang Jawa dan terdapat sebagian orang Madura. Sebagian besar penduduk pribumi bermatapencaharian bertani, perdagangan kecil, pemeliharaan ikan di sepanjang pantai dan terutama yang tinggal di ibukota membuat berbagai macam kerajinan (Encyclopedie IV, 1921:31).

Jumlah orang Madura yang tinggal di Karesidenan Surabaya tergolong cukup besar. Pada 1846 dari 498.273 orang Madura yang

berada di Jawa Timur maka yang tinggal di Surabaya, Gresik dan Sedayu mencapai 240.000. Migrasi orang Madura merupakan akibat dari ekologi Pulau Madura yang tidak menguntungkan sehingga memaksa mereka mencari pekerjaan keluar (Kuntowijoyo, 1980:41).

Dalam kegiatan perekonomian penduduk yang cukup penting adalah peranan pasar. Pasar-pasar pantai banyak menjual hasil-hasil produksi pantai seperti ikan laut, garam, kerang, ikan hasil tambak dan sebagainya. Pasar-pasar ini juga menampung barang-barang dari daerah pedalaman dan juga barang-barang impor dari pulau lain atau luar negeri. Barang-barang dagangan hasil bumi yang diperjualbelikan di pasar-pasar kota Surabaya sebagian besar berasal dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Kediri bahkan dari daerah Madiun.

Selanjutnya berkaitan dengan luas dan lokasi tambak ikan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Spall pada tahun 1863 dapat diketahui bahwa Karesidenan Surabaya memiliki luas bentangan tambak ikan yang paling besar diantara karesidenan yang lain di Pulau Jawa. Perbandingan luas tambak ikan dari setiap karesidenan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel Luas tambak ikan setiap karesidenan di Pulau Jawa pada tahun 1863

No.	Karesidenan	Luas Tambak Ikan (bau)
1	Surabaya	35.211
2	Jepara	2.332
3	Pasuruan	3.804
4	Probolinggo	1.475
5	Besuki	736
6	Rembang	1.321
7	Semarang	1.189
	Luas total	46.068

Sumber: PW.A. Spall, "Onderzoek Omtrent het Aanleggen van Zout-Zoetwater Visch-Vijver op Java", *Tijdschrijft voor Nijverheid en Landbouw in Nederlansch-Indie,* 11 (Batavia: W. Ogilvie, 1865), hlm. 5.

Tidak semua *regentschap* di wilayah Karesidenan Surabaya mempunyai tambak ikan. Adapun luas tambak ikan di setiap *regentschap* dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel Luas tambak ikan setiap regentschap di Karesidenan Surabaya pada tahun 1863

No.	Regentschap	Luas Tambak Ikan (bau)
1	Surabaya	7.329
2	Sidoarjo	10.333
3	Gresik	15.399
4	Sedayu	1.972
5	Lamongan	178
	Luas total	35.211

Sumber: PW.A. Spall, "Onderzoek Omtrent het Aanleggen van Zout-Zoetwater Visch-Vijver op Java", *Tijdschrijft voor Nijverheid en Landbouw in Nederlansch-Indie,* 11 (Batavia: W. Ogilvie, 1865), bijlage Lr.A.

Daerah-daerah yang banyak digunakan untuk membuat tambak ikan adalah daerah sepanjang pantai. Deretan tambak ikan yang pertama yaitu di sepanjang pantai dari kota Surabaya ke arah barat sampai daerah perbatasan dengan *regentschap* Tuban. Oleh karena kondisi pantai di sebelah barat kota Surabaya yang masuk wilayah *regentschap* Surabaya tidak panjang maka dalam deretan tambak ikan ini hanya sedikit tambak yang masuk wilayahnya. Deretan tambak ikan yang cukup panjang terletak di wilayah *regentschap* Gresik. Tambak ikan yang ada bersambungan membentuk suatu rangkaian yang panjang, hanya sesekali terputus oleh karang atau gundukan pasir yang terlalu tinggi bagi air laut untuk dapat mengairi jika di tempat itu dibuat tambak ikan. Bentuk pantai di daerah ini memang sangat menguntungkan untuk membuat tambak ikan. Jika pada waktu itu orang melakukan perjalanan melewati jalan pos Deandels maka akan melihat rangkaian tambak ikan di pantai hampir sepanjang jalan mulai dari dekat kota Surabaya sampai Sedayu. Di wilayah *regentschap* Sedayu rangkaian tambak ikan sering terputus oleh batu, karang atau gundukan pasir yang tinggi. Deretan tambak ikan

terus berkelanjutan sampai masuk ke wilayah *regentschap* Sidoarjo, hingga mencapai sungai Porong yang memisahkan *regentschap* Sidoarjo dengan wilayah Karesidenan Pasuruan.

Pembuatan tambak ikan disamping di daerah sepanjang pantai juga dilakukan di tepi sungai dekat muara. Di daerah sebelah barat kota Surabaya tambak ikan dibuat tepi sungai Lamong, Bengawan Solo, Ngawen dan Logong. Di tepi kanan sungai Logong terdapat tambak ikan yang masuk wilayah Gresik, sedangkan di tepi kiri terdapat tambak yang masuk wilayah Tuban. Sementara di sebelah timur kota Surabaya tambak ikan dibuat di tepian Sungai Porong, Sidoarjo, Tanggul Angin dan Candi (Spall,1865:6).

Pembuatan tambak ikan dilakukan oleh penduduk desa secara bergotong royong. Mereka membuat tambak ikan di rawa-rawa yang belum dimanfaatkan di daerah sepanjang pantai atau tepian sungai di desa tempat tinggalnya. Setelah bentangan tambak ikan selesai dibuat maka kemudian dilakukan pembagian diantara mereka yang ikut terlibat dalam pembuatan. Seorang mantri yang memang diangkat untuk mengurusi masalah tambak ikan memberi petunjuk kepada penduduk yang membuat tambak ikan. Mantri ini juga memegang daftar nama para pemilik dan penyewa tambak ikan, luas dan jenis tambak ikan serta kelas tambak ikan dan taksiran pajaknya.

Para mantri ini diangkat dari perangkat desa atau distrik tempat tambak ikan berada. Pengangkatan para mantri merupakan pelaksanaan dari keputusan Letnan Gubemur Jendral No. 8 tanggal 10 Januari 1827. Isi dari keputusan tersebut adalah pengangkatan pegawai pribumi dengan pangkat bekel dan diberi gelar mantri tambak serta pembantunya yang disebut asisten tambak. Mantri tambak ini diberi gaji f.50,- per bulan sedangkan asisten tambak menerima gaji f.15,- per bulan. Dalam menjalankan tugasnya mereka langsung dibawah perintah bupati dan *controlleur* (Spall, 1865:32).

Permasalahan utama dalam pembuatan tambak ikan menemui kendala. Kendala yang pertama yaitu masalah biaya. Sebagian besar

penduduk desa merasa cukup berat atas besamya biaya yang diperlukan dalam pembuatan tambak ikan. Pemerintah kolonial pada waktu itu memang belum memberikan bantuan modal berupa uang. Kendala yang kedua yaitu sifat dari sebagian besar penduduk yang dianggap pemalas, ceroboh dan pasrah pada nasibnya.

Sifat dan penduduk yang demikian memang sudah menjadi mentalitas dari orang Jawa. Mereka mempunyai konsep hidup yang pasif, nrima, tabah dalam keadaan menderita tetapi tidak tabah dalam hal berkarya. Mereka percaya bahwa hidup di dunia sudah diatur sehingga mereka mempunyai sikap menyerah kepada takdir atau nasib (Kodiran, 1971:343).

Penambahan areal tambak ikan berjalan tidak sesuai yang diinginkan pemerintah kolonial. Sebagian besar penduduk kurang mempunyai kesadaran bahwa dengan pembuatan tambak ikan dan memilikinya maka akan dapat mengangkat kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mau berusaha keras untuk melakukannya. Kemajuan yang seharusnya diperoleh terhambat oleh sikap hidup yang pasif dan kurang berorientasi ke depan (Koentjaraningrat, 1971:384).

Waktu normal yang diperlukan untuk pembuatan tambak ikan di wilayah Gresik sekitar 3 sampai 4 tahun. Waktu selama itu dapat menjadi hanya satu tahun bila tidak ada masalah dengan biaya. Untuk merangsang atau menggiatkan pembuatan tambak ikan di kalangan penduduk maka pemerintah kolonial mengeluarkan kebijaksanaan bahwa tambak ikan yanq baru selesai dibuat tidak dikenakan pajak selama beberapa tahun.

Selanjutnya pemerintah kolonial mengucurkan dana bantuan modal berupa kredit untuk usaha tambak ikan pada awal abad ke-20 setelah banyak berdiri bank-bank perkreditan. Pada tahun 1910 *volkscredietwezen* memberikan kredit untuk sektor perikanan di wilayah Karesidenan Surabaya sebesar f 20.165,- atau sebesar 21,35% dari seluruh kredit di sektor ini. Sebagian besar kredit diberikan untuk usaha tambak ikan. Hal ini karena usaha tambak ikan memberikan hasil yang lebih pasti. Pendapatan pemilik tambak lebih teratur, lebih mudah dikontrol dan para

pemilik tambak dapat memberi agunan untuk memperoleh pinjaman, misalnya dengan tanah tambaknya (Masyhuri: 1995: 138-139).

Pada sekitar awal abad ke-20 ada keinginan dari pemerintah kolonial untuk mengetahui perihal kesejahteraan penduduk pribumi. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa kesejahteraan penduduk pribumi telah mengalami penurunan sebagai akibat penguasaan pemerintah kolonial. Untuk melaksanakan hal itu maka dibentuk suatu komisi *Mindere Welvaart Commissie*. Di dalam komisi ini duduk orang-orang Belanda, yang dianggap mampu untuk memberikan laporan sesuai yang diinginkan pemerintah kolonial. Komisi ini melakukan penelitian terhadap semua aspek kehidupan penduduk pribumi di wilayah Pulau Jawa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa luas tambak ikan di wilayah Karesidenan Surabaya pada tahun 1904 sebagai berikut :

Tabel luas tambak ikan di Karesidenan Surabaya pada tahun 1904

No	Regentschap	Distrik	Luas Tambak Ikan (bau)
1	Surabaya	Surabaya	6.419,5
		Jaba Kota	2.030
2	Sidoarjo	Sidoarjo	4.605
		Porong	3.009
		Gedangan	7.045
3	Gresik	Gresik	7.454
		Bengawan Jero	12.505,25
		Gunung Kendeng	556,25
		Paciran	1.400
		Sedayu	1.652
4	Lamongan	Tengahan	102
	Luas total		46.768

Sumber : *Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Ib. Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelyke Onderzoekingen naar de Viseteelt en Visscheri en Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen,* 2e deel (Batavia: Landsdrukkerij, 1905), bijlage H, hlm. 8

Dengan luas tambak ikan seperti dalam tabel di atas maka dari tahun 1885/1886 sampai tahun 1904 wilayah Karesidenan Surabaya telah mengalami penambahan luas tambak ikan yang cukup besar.

Dengan penambahan luas tambak ikan itu maka Karesidenan Surabaya mengambil bagian yang terbesar dari penambahan luas tambak ikan di seluruh Jawa.

Penambahan luas tambak yang cukup besar tersebut terutama berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada sektor penangkapan ikan laut. Perubahan itu dimulai dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang mulai tahun 1864 menghapuskan sistem sewa di sektor penangkapan ikan laut dan menerapkan sistem pajak perusahaan yang menjadi sebab utama kemunduran usaha penangkapan ikan di Laut Jawa mulai sekitar tahun 1880-an.

Pemberlakuan aturan baru ini menyebabkan penghasilan para penanam modal dalam bidang penangkapan ikan laut menjadi tidak menentu. Akibatnya usaha yang mereka lakukan hanya sekedar untuk mendapatkan kembali modalnya dan menghentikan usahanya setelah modal mereka kembali. Sebagian dari mereka mengalihkan usahanya pada sektor lain mencari altematif pengganti, salah satunya dalam bidang usaha pertambakan ikan (Masyhuri, 1995:91).

Di samping itu para nelayan, khususnya juragan darat mengalihkan usahanya dari penangkapan ikan laut ke pengembangan usaha tambak ikan karena terdorong adanya beberapa keuntungan, antara lain adanya pengakuan hak milik perorangan atas tambak ikan. Usaha tambak ikan juga mempunyai resiko yang jauh lebih kecil dibandingkan usaha penangkapan ikan laut. Lebih-lebih usaha tambak ikan menjanjikan hasil yang besar. Sementara para nelayan pekerja juga beralih ke sektor pertambakan karena menjadi tenaga kerja di tambak ikan hasilnya lebih besar (Masyhuri, 1995:110).

Selanjutnya perlu juga dijelaskan tentang kepemilikan tambak ikan. Pemilik iambak-tambak ikan di Karesidenan Surabaya pada pertengahan abad ke-19 semuanya merupakan orang pribumi yang terdiri dari penduduk biasa, para kepala desa dan beberapa pensiunan pegawai pemerintah. Tidak ada bupati atau pejabat tinggi pemerintah yang memiliki tambak ikan. Para pemilik tambak ikan ini mendapatkan

tambak ikannya melalui cara pembelian, warisan dan pembuatan.

Untuk tambak-tambak ikan yang dahulu atau sebelumnya merupakan milik para pemegang jabatan lokal atau feodal masih dapat diketahui dari nama-nama yang diberikan penduduk kepada suatu bentangan tambak ikan seperti *tambak daleman*, *tambak collecteur* dan *tambak jeksa*.

Kebijaksanaan pemerintah kolonial dalam hal kepemilikan tambak ikan ini mengakui adanya hak milik perorangan. Pemberian bukti hak dilakukan oleh mantri tambak dibantu perangkat desa yang ditunjuk dari tempat tambak ikan berada. Setelah dilakukan pengukuran maka pemilik tambak ikan diberi bukti yang memuat nama, pemilik, dari mana tambak ikan itu didapat seperti pembelian atau pewarisan, serta kewajiban dari pemilik tambak ikan. Untuk tambak yang pembuatannya secara gotong royong maka terlebih dahulu dilakukan pembagian kepada yang terlibat di dalamnya baru diberi bukti kepemilikan (Onderzoek... 9b, 1909:16).

Pada awal abad ke 20 tambak-tambak ikan yang luas banyak dimiliki oleh haji dan kepala desa. Mereka mendapatkan tambak ikan yang luas melalui warisan dan dari pemberian. Ada juga yang mendapat dari orang yang meminjam uang kepadanya dengan jaminan tambak ikan dan orang tadi tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya. Pemilikan tambak ikan yang luas paling banyak terjadi di Sidoarjo kemudian disusul daerah *Regentschap* Surabaya (Onderzoek... 9b, 1909:16).

Selanjutnya bagaimana bentuk tambak ikan waktu itu, bentuk yang pertama yaitu bentuk Porong yang merupakan bentuk tambak ikan yang paling banyak ditemukan di Karesidenan Surabaya. Untuk bentuk ini ikan biasanya dibagi menjadi 3, kadang 4 bahkan ada yang 5 petakan. Petakan ini tergantung kebutuhan dan keinginan penggarapnya.

Petak yang pertama disebut *pinian* atau *peneran* yang merupakan tempat pertama kali benih ikan bandeng dimasukkan. Luas petak ini merupakan yang paling kecil dibandingkan petak yang lain. Petak yang keduanya, yaitu untuk pengembangan sementara ikan bandeng. Petak kedua ini disebut *dawoean* yang mempunyai arti tanggul. Kata ini diambil dan keadaan khas ketika air laut ke dimasukkan ke tambak ikan maka air

akan masuk ke petakan ini melalui tanggul sebelah dalam. Petakan ini juga disebut *buyaran* karena di tempat ini ikan akan membuyar setelah dari petakan pertama yang jauh lebih kecil.

Petak yang ketiga digunakan untuk membagi air yang masuk ke tambak ikan, memelihara ikan dan untuk menangkap ikan ketika panen. Petakan ini yang berarti sesuatu yang dibuka dan dimasuki sesuatu atau berarti dirawat. Petak ini mempunyai kedalaman yang lebih dibanding petak yang lain. Petak yang keempat dan kelima jika ada digunakan untuk memelihara ikan yang sengaja dipelihara sampai tua, melebihi umur ikan bandeng yang normal untuk konsumsi biasa. Petakan ini disebut *kawakan*, berasal dari kata *kawak* yang artinya menunjutkan tanda-tanda tua (Spall, 1865:25).

Bentuk tambak ikan yang kedua yaitu bentuk Taman. Dinamakan bentuk Taman karena muncul pertama kali di daerah Taman, wilayah Sidoarjo. Bentuk Taman ini dibuat untuk daerah yang pantainya tinggi, seperti di Taman yang pantainya sudah tinggi sebelum ada orang membuat tambak ikan di sana. Tambak ini dapat menyesuaikan dengan suplai air yang sedikit. Perbedaan yang mendasar dengan bentuk porong yaitu untuk petak pembagi air tidak hanya petak kecil, dan tempat menangkap ikan di suatu saluran kecil yang panjang. Pasa masa sulit air bagian yang tergenang air cukup hanya di parit-parit dan saluran yang panjang itu. Pada awal abad 20 hampir semua tambak ikan di Gresik menggunakan air asin, di Surabaya sebagian besar juga menggunakan air asin sedangkan di Sidoarjo sebagian besar dengan air payau (Spall, 1865:35).

Perbedaan jenis air yang digunakan oleh tambak ikan dikarenakan perbedaan asal air yang mengairinya, dan hal ini tergantung dari letak tambak ikan. Untuk tambak ikan yang letaknya dekat atau tepi laut maka diisi dengan air laut sehingga airnya asin baik langsung atau melalui saluran, sedangkan tambak yang airnya payau adalah tambak ikan yang menggunakan campuran air laut dan air sungai untuk mengisinya. Hal ini untuk tambak ikan yang air laut tidak dapat mencapai sepenuhnya atau tambak di tepi laut yang dekat muara sungai.

Pembuatan tambak ikan secara besar-besaran membuat tidak hanya memakai tanah endapan lumpur di daerah pantai tetapi juga yang sudah jauh masuk daratan. Tambak ikan yang berada di dekat laut oleh penduduk disebut *tambak lanyah*. Tambak ikan ini sepanjang tahun dapat terisi air laut, sedangkan tambak ikan yang jauh dari laut disebut *tambak darat*.

Untuk *tambak darat* karena letaknya jauh dari laut maka air laut tidak lancar mencapainya sehingga pengisian air lebih banyak dengan air sungai yang sangat dipengaruhi oleh hujan. Oleh karena itu tambak ikan ini tidak dapat digunakan untuk memelihara ikan sepanjang waktu. Dalam satu tahun tambak ikan ini hanya dapat digunakan selama 9 sampai 10 bulan karena pada sekitar bulan Juni sampai Juli kering (Schuster, 1949:15).

Salinitas (kadar garam) air yang digunakan dalam suatu bentangan tambak ikan secara bertahap akan menurun sesuai dengan letak tambak ikan. Tambak ikan yang paling dekat dengan laut salinitasnya paling tinggi dan semakin jauh dari laut semakin rendah salinitasnya karena dalam percampurannya dengan air tawar prosentase air laut semakin kecil. Hal ini tidak memenuhi syarat untuk memelihara ikan bandeng.

Selanjutnya bagaimana proses pemeliharaan ikan bandeng dalam tambak. Proses pemeliharaannya perlu ketersediaan benih ikan bandeng atau nener. Hal ini disebabkan pada waktu itu nener tidak bisa diperoleh dengan menetaskan sendiri tetapi harus ditangkap dari laut.

Tambak ikan di Karesidenan Surabaya mendapatkan suplai nener dari daerah Madura. Pada tahun 1863 nener dibeli para penggarap tambak ikan dengan harga sekitar 19 sen per 100 ekor. Nener ini ditangkap di perairan pantai pulau Madura dalam ukuran masih sebesar jarum (Spall, 1865:30).

Sampai awal abad ke-20 tambak ikan di Karesidenan Surabaya masih tetap mendatangkan nener dari Madura. Dibandingkan harga nener pada tahun 1853 maka harganya lebih mahal yaitu sekitar f.15 per 1000 ekor. Suatu kebijaksanaan dalam hal pengadaan nener pemah satu ketika pemerintah kolonial pemah memberi bantuan kepada penggarap tambak

ikan di *Regentschap* Surabaya sebanyak satu juta ekor secara gratis untuk ditaburkan dalam tambak ikan mereka (Onderzoek... 1n, 1905:11).

Para penggarap tambak ikan di Karesidenan Surabaya mendatangkan nener dari Madura karena jumlah nener yang ditangkap di perairan pantai Madura sangat banyak, jauh melebihi kebutuhan tambak ikan di Madura. Sementara nener yang dihasilkan dari pantai-pantai di Jawa belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan tambak ikan di daerah sekitar penangkapannya. Hal lain yaitu nener yang dihasilkan dari Madura dikenal oleh para penggarap tambak ikan mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan nener yang dihasilkan dari Jawa. Kemungkinan hal ini karena ketrampilan dari orang-orang yang menanganinya nener tadi sudah cukup baik dan berpengalaman (Slamet, 1983:86). Nener dari Madura terus mengalir ke daerah-daerah tambak ikan di Karesidenan Surabaya.

Dalam satu tahun terdapat dua musim penangkapan nener. Nener yang ditangkap pada bulan April sampai Mei disebut *nener kesongo*, sedangkan yang ditangkap pada bulan September sampai November disebut *nener ketigo*. Ukuran jumlah nener yaitu *rajut* (50 ekor) dan *rean* (5.000 ekor) (Memori Serah Jabatan..., 1978:267).

Menyesuaikan dengan ketersediaan nener maka tambak ikan ditaburi nener dua kali dalam satu tahun. Penaburan nener *kesongo* pada bulan-bulan April sampai Juni yang juga disebut musim *kesongo*. Penaburan nener *ketigo* pada bulan Oktober sampai Desember yang disebut musim labuhan.

Sebelum nener dimasukkan ke dalam petak *pinian*, maka petak ini dikeringkan untuk sementara waktu. Dasar petakan ini dibiarkan terkena sinar matahari yang terik sampai retak-retak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kematian nener dalam jumlah yang besar (Spall, 1865:36).

Dengan pengeringan ini tanah yang tadinya terendam air bersifat *anaerob* (tidak beroksigen) menjadr (cukup oksigen) sehingga terjadi mineralisasi bahan-bahan organik. Hasil mineralisasi bahan-bahan organik menghasilkan mineral yang sangat diperlukan oleh ganggang

biru yang merupakan makanan utama ikan bandeng. Dengan demikian kemampuan tanah untuk menghasilkan ganggang biru dapat diperhatikan. Selanjutnya dengan pengeringan ini gas-gas beracun seperti metana, amonia dan hidrogensultida akan terhalau dari tanah. Gas-gas beracun ini bila dibiarkan akan mengganggu nener (Slamet, 1983:76).

Setelah pengeringan dianggap cukup maka petak pinian diisi air sampai dengan ketinggian satu kaki (30 cm) dan nener dimasukkan ke dalamnya. Air untuk mengisi petak *pinian* berasal dari petak *dawoean* melalui tabung bambu yang dipasang pada tanggul. Untuk menghalangi masuknya ikan-ikan jenis lain dan hewan-hewan air yang merugikan maka di ujung bambu dipasang penyaring yaitu berupa kain tipis yang oleh penduduk disebut *waring*.

Penambahan air sampai penuh baru dilakukan setelah bibit ikan mencapai panjang satu setengah ibu jari (1,5 cm) dan lebar 2 mm. Tindakan selanjutnya yaitu mencegah masuknya ikan-ikan jenis lain dan nener dibiarkan berkembang dalam petak *pinian* selama hampir tiga bulan. Tidak ada perawatan khusus selain menjaga nener dari burung-burung laut.

Selama waktu itu digunakan untuk penggalian dan perbaikan di petak *dawoean* dan petak *lalahan*. Setelah nener hampir tiga bulan di petak *pinian* maka air di petak ini sebagian dialirkan ke petak *dawoean* sampai tinggal 1-1,5 kaki (30 - 45 cm). Pengaliran air ini bersama sepertiga jumlah ikan yang ada. Setelah 3-4 hari di petak *dawoean* tutup antara petak *dawoean* dan *luluhun* dibuka sehingga ikan dapat bergerak bebas ke petak *lalahan*.

Setelah hampir tiga bulan ikan bandeng di petak dawoean dan *lalahan* maka ikan bandeng telah siap untuk dipanen. Pada saat itu biasanya ikan bandeng mencapai panjang dua sampai dua setengah telapak tangan (20-25 cm) dan lebar tuju sampai delapan ibu jari (7-8 cm). Penangkapan ikan bandeng dilakukan di petak *lalahan* dekat pintu air yang ditutup dengan anyaman bambu di bagian belakangnya. Dengan membuka pintu air pada waktu pasang maka air akan mengalir masuk dan ikan-ikan bandeng akan selalu berkumpul dalam aliran air baru yang masuk. Dengan mudah ikan

bandeng ditangkap dalam jumlah dan ukuran yang dikehendaki (Spall, 1865:31).

Ikan bandeng yang sudah dewasa mempunyai keinginan yang kuat untuk meloloskan diri dari tambak ikan dengan adanya rangsangan dari laut yaitu naiknya air pada waktu pasang. Mereka akan gelisah dan berenang secara berkelompok menyusuri tepian tanggul secara terus menerus mencari jalan keluar ke laut. Hal ini semata-mata karena naluri untuk kembali ke laut setelah dewasa untuk berkembang biak. Segera setelah air pasang dialirkan ke tambak ikan maka seluruh ikan bandeng akan menghampiri pintu air dan berjam-jam mereka berenang berhenti dalam arus air laut yang masuk. Dalam keadaan mabuk laut ini ikan bandeng yang biasanya liar dan takut bila didekati orang menjadi sangat mudah ditangkap dengan tangan (Slamet, 1983:101).

Jika ikan bandeng yang ada dipetak *dawoean* dan *lalahan* telah habis ditangkap maka kedua petakan ini dikeringkan dan saluran-saluran diperdalam. Setelah selesai kemudian kembali menerima sepertiga yang kedua ikan bandeng dari petak pinian. Setelah 3 sampai 4 hari di petak *dawoean* maka ikan bandeng tersebut dilepas ke petak lalahan dan langsung ditangkap seperti cara yang dilakukan pertama. Cara yang sama juga untuk sepertiga ikan bandeng yang terakhir.

Untuk mendapat keuntungan yang lebih besar maka para penggarap tambak ikan memindahkan 20 sampai 30 ekor ikan bandeng ke petak *kawakan* yang selalu terisi air. Di petak ini ikan bandeng dibiarkan hidup selama berumur satu sampai dua tahun, kadang-kadang sampai tiga tahun. Ketika dijual bandeng kawakan ini harganya empat sampai lima kali harga bandeng biasa yang berumur enam sampai tujuh bulan. Pemeliharaan bandeng kawakan ini yang paling banyak dilakukan di Gresik, disusul di Surabaya dan paling sedikit di Sidoarjo. Oleh karena itu yang paling terkenal adalah bandeng Gresik dibanding Surabaya (Spall, 1865:32).

Selanjutnya untuk pemeliharan ikan bandeng di tambak ikan yang jauh dari laut (tambak darat) terdapat perbedaan. Di tambak ikan ini

hanya bisa satu kali memasukkan nener dalam satu tahun yaitu nener *ketigo* pada musim *labuhan*. Hal ini karena air tidak tersedia sepanjang tahun. Cara penangkapan ikan bandeng dapat memanfaatkan air pasang karena perbedaan tinggi airnya sudah sangat kecil. Cara yang dilakukan adalah dengan menangkap langsung di tambak ikan secara beramai-ramai setelah sebelumnya tambak ikan dikurangi airnya. Penangkapan ini dilakukan pada waktu siang hari, berbeda dengan penangkapan jang memanfaatkan air pasang yang dilakukan pada malam hari (Schuster, 1949:65).

Selanjutnya perlu juga dijelaskan tentang tenaga kerja. Ada dua jenis pekerja tambak ikan yaitu pekerja tetap dan pekerja lepas. Pekerja tetap adalah orang yang membantu, menggarap tambak ikan selama pengelola tambak ikan masih percaya kepadanya. Ia bekerja hanya di satu tambak yang dikerjakan seorang pengelola dan mengerjakan semua jenis pekerjaan yang ada di tambak itu. Sementara itu pekerja lepas adalah orang yang hanya bekerja suatu tambak ikan jika diminta bantuan tenaganya oleh pengelola tambak ikan itu. Biasanya pekerja lepas dibutuhkan pada waktu ada pekerjaan-pekerjaan berat dalam tambak ikan. Bahkan berkaitan dengan penjualan atau pemasaran ikan bandeng, pemerintah kolonial tidak mempunyai aturan untuk mengatur secara pasti hasil dari tambak ikan (Masyhuri, 1995:109).

Ikan bandeng pada umumnya dipasarkan dalam bentuk ikan segar atau ikan pindang dan bisa dipastikan ikan ini tidak pernah diproses menjadi ikan asin. Mahalnya harga ikan bandeng mengakibatkan pemasaran ikan ini terbatas pada kalangan masyarakat tertentu di daerah perkotaan. Dengan demikian ikan bandeng bukanlah jenis ikan yang menjadi menu harian bagi kebanyakan penduduk. Dari segi pemasarannya ikan bandeng bukan merupakan saingan secara langsung terhadap ikan-ikan jenis lain yang harganya lebih murah. Ikan-ikan tersebut mempunyai wilayah pemasaran yang berbeda-beda.

Ikan bandeng hasil produksi tambak ikan cukup kecil bila dibandingkan jumlah ikan lain hasil perikanan laut, tetapi harga jual

dalam ukuran yang jauh lebih mahal. Konsumen yang utama dari ikan bandeng adalah orang yang kaya. Disamping membeli ikan bandeng yang biasa mereka juga beli ikan bandeng kawak. Ikan bandeng kawak ini dijadikan menu utama waktu mengadakan pesta atau perayaan, namun hanya sesekali dijadikan menu harian. Untuk menu harian mereka mengkonsumsi ikan bandeng yang biasa (Encydopedic..., 1939:1738).

Pada awal abad ke-20 hasil ikan bandeng dari tambak ikan di daerah luar kota Surabaya cukup untuk konsumsi lokal dan juga diperdagangkan kelain daerah (Sutjipto, 1983:126). Pada sekitar tahun 1885 produksi ikan bandeng dari daerah Gresik hampir seluruhnya dipasarkan ke kota Surabaya. Hanya dalam jumlah kecil yang diperdaganghan di daerah sekitar Gresik sendiri. Sementara itu produksi ikan bandeng dari daerah Surabaya juga dipasarkan di kota Surabaya. Banyak pemilik tambak yang memasarkan sendiri ikan-ikan bandeng hasil tambak ikan mereka ke pasar-pasar setempat. Untuk ikan bandeng produksi Sidoarjo telah menjangkau kota-kota yang agak jauh yaitu Madiun dan Kediri, baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan pindang (Masyhuri, 1995).

Perdagangan ikan segar sangat dipengaruhi oleh iklim dan sarana transportasi. Dalam iklim tropik seperti di Jawa jika sarana transportasi tidak baik maka perdagangan ikan segar paling jauh hanya mencapai 20 km. Pada awal abad 20 ikan bandeng segar dari Sidoarjo telah mencapai Madiun dan Kediri karena tersedianya sarana transportasi yang memadai. Sarana transportasi itu ialah adanya jalur kereta api yang menghubungkan Sidoarjo – Mojokerto – Kertosono – Wilangan dan Madiun. Dari jalur ini juga ada jalur yang menuju Malang (P.J. Veth, 1882:852).

Selanjutnya perlu dijelaskan bagaimana usaha tambak ikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat. Usaha tambak ikan yang dilakukan penduduk di wilayah Karesidenan Surabaya sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat. Dari sudut sosial yang terlihat yaitu terciptanya suatu masyarakat tambak. Pada pertengahan abad ke-19 pemilik tambak ikan merupakan suatu kelompok penduduk tersendiri yang terpisah dari

penduduk desa tempat tambak ikan mereka berada.

Para pemilik tambak ikan tinggal bersama-sama di sepanjang pantai dari suatu desa. Mereka oleh penduduk desa yang lain disebut *wong tambak*, sementara penduduk desa lain yang memiliki sawah pertanian disebut wong dusun. Para pemilik tambak ikan ini mendirikan rumahnya di dekat tambak-tambak ikan miliknya, kadang-kadang bersama dengan para nelayan yang sedang bekerja. Banyak pemilik tambak ikan mempunyai pekerja untuk menjaga tambaknya baik dari kerabatnya sendiri ataupun orang lain yang tinggal di dekat tambak ikan yang dijaganya. Para pekerja ini rumah asalnya jauh dari tambak-tambak ikan yang dijaganya (Spall, 1865:19).

Pada awal abad ke-20 setelah melalui perkembangannya maka masyarakat tambak ini semakin jelas terlihat terutama di daerah Gresik dan Sidoarjo. Di dalam masyarakat tambak ini masih terdapat aturan-aturan pantangan-pantangan serta adat-istiadat Hindu masa lalu walaupun mereka sudah memeluk agama Islam. Penduduk di dalam masyarakat tambak menjaga adat-istiadat mereka secara turun-temurun.

Dalam kehidupan masyarakatnya terdapat suasana keagamaan serta kesederhanaan. Penduduk yang tinggal di dalamnya mempunyai sifat-sifat khas yang cukup menonjol. Mereka memiliki rasa sangat bangga dengan diri mereka dan sukar bergaul dengan penduduk desa lain yang berada di luar kelompoknya. Sifat yang lain yaitu memiliki jiwa tidak mau terikat yang mengakibatkan mereka senang mengabaikan nilai-nilai kemasyarakatan desa. Oleh anggota masyarakat desa yang lain mereka sering dianggap berperilaku kasar dan bersikap kurang sopan. Sifat yang lain dari diri mereka yaitu mempunyai harga diri yang cukup tinggi (Schuster, 1949:151).

Secara garis besar penghuni masyarakat tambak dapat dibagi kedalam tiga golongan. Golongan yang pertama yaitu para pemilik tambak ikan yang disebut *gogol tambak*. Golongan ini memiliki kesejahteraan hidup paling tinggi dan sebagian besar adalah para haji yang kaya, mereka merupakan anggota masyarakat tambak yang dikenal memiliki

pengetahuan yang paling luas dan wawasan berpikir paling maju, tetapi juga mempunyai sifat paling sukar bergaul dengan penduduk desa di luar masyarakat tambak. Ketika pemerintah kolonial sudah memperkenalkan pendidikan sekolah kepada penduduk pribumi maka anak-anak dari golongan ini banyak yang mengkutinya.

Golongan kedua yaitu orang-orang yang menggarap tambak ikan milik orang lain baik dengan menyewa maupun sistem bagi hasil, yang disebut *wong angguran*. Juga termasuk di dalamnya orang-orang yang menjadi pekerja tetap dari suatu tambak ikan. Berbeda dengan anak-anak golongan yang pertama maka anak-anak dari wong angguran tidak banyak yang mengenyam pendidikan sekolah. Di dalam tingkatan sosial masyarakat tambak maka wong angguran berada di lapisan kedua di bawah para gogol tambak.

Golongan ketiga yaitu orang-orang yang menjadi pekerja lepas dari tambak ikan yang disebut *wong manukan*. Mereka semata-mata hanya menjual tenaga saja dan baru bekerja jika ada penggarap tambak yang membutuhkan tenaga. Tenaga mereka sering dibutuhkan pada waktu tambak ikan sedang mempunyai pekerjaan berat dan penggarapnya merasa perlu untuk menggunakan tenaga kerja tambahan. Pada saat-saat seperti pemanenan hasil atau ketika sedang dilakukan perbaikan tambak ikan maka tenaga mereka banyak dibutuhkan. Posisi golongan ini berada di paling bawah dan tingkatan sosial yang ada dalam masyarakat tambak.

Sementara pada waktu tidak ada yang menggunakan tenaganya maka *wong manukan* mendapat makan dengan menangkap ikan atau kepiting di sungai atau anak sungai dan bisa juga mereka memperoleh penghasilan dengan mengumpulkan kayu bakar yang ada di sekitarnya.

Kehidupan masyarakat tambak terisolasi dari penduduk desa yang lain. Hal ini justru membuat menjaga kebiasaan-kebiasaan khas yang mungkin di tempat lain sudah hilang. Salah satu kebiasaan yang cukup menonjol adalah saling membantu diantara penggarap tambak ikan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan penggarapan tambak ikannya (Onderzoek, 1909:25).

Di daerah tambak ikan tidak ada pemilikan komunal sehingga mengakibatkan ikatan untuk kerja bersama di antara para penggarap tambak ikan menjadi lebih rendah dibandingkan petani di desa tersebut. Hal ini mendorong para penggarap tambak ikan atas kemauan mereka sendiri membentuk kelompok-kelompok kerja tambak ikan. Satu kelompok kerja terdiri dari beberapa penggarap yang letak tambak ikannya saling berdekatan. Mereka saling membantu kerja di antara sesama anggotanya dan dalam hal ini mereka menganut suatu prinsip hidup *sami ngramut, sami ngedoh,* yang artinya jika ada pekerjaan maka dikerjakan bersama dan bila ada rejeki maka dinikmati bersama.

Pada waktu salah seorang anggota kelompok kerja mempunyai pekerjaan besar ditambak ikan yang digarapnya, seperti penaburan nener atau pemanenan maka anggota kelompok yang lain akan datang membantu tanpa memperoleh imbalan uang. Juga ketika hasil tamhak ikan seorang anggota kelompok kerja jelek atau gagal maka anggota yang lain memberi bantuan berupa udang atau sayuran yang ditanam di tanggul tambak ikannya.

Ikatan di antara anggota kelompok kerja semakin kuat dengan adanya kegiatan ritual yang harus dilakukan oleh seorang penggarap tambak ikan. Dalam satu tahun sekurang-kurangnya terdapat tiga kali kegiatan ritual yang dilakukan seorang penggarap tambak ikan. Kegiatan ritual pertama yaitu selamatan pada waktu penaburan nener kedalam tambak ikan yang disebut *slametan lebon*. Untuk acara ritual ini penggarap tambak ikan membuat bubur berwarna merah dan putih yang dipersembahkan kepada nabi Adam dan Hawa. Hal ini dilakukan dengan harapan mereka memperoleh syafaatnya sehingga tambak ikan memberikan hasil yang baik. Bubur selebihnya kemudian dihidangkan kepada semua orang yang hadir.

Acara ritual kedua yaitu selamatan pada waktu memindahkan ikan bandeng dari petak *pinian* ke petak *buyaran* yang disebut slametan *mbuyar.* Kepada semua orang yang hadir dalam acara ini diberi hidangan dengan sajian utama berupa ikan untuk dinikmati bersama.

Sebagai acara ritual ketiga yaitu pada selamatan waktu pemanenan hasil tambak ikan yang disebut slametan *ngentas-ngentas*. Jika hasil tambah ikan kurang baik maka dalam acara ini hanya disembelih ayam dan mereka banyak memanjatkan doa kepada Tuhan. Tetapi jika hasilnya bagus maka sebagai hidangannya disembelih seekor kambing yang gemuk (Schuster, 1949: 159).

Dan bentuk acara-acara ritual yang dilakukan oleh penggarap tambak ikan terlihat adanya unsur-unsur Hindu dan Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di dalam masyarakat tambak telah terjadi apa yang dalam istilah kebudayaan disebut proses akulturasi (Koentjaraningrat, 1990:248).

Besarnya penghasilan para pemilik tambak ikan membuat mereka mempunyai tingkat ekonomi yang cukup baik. Hal ini juga tercermin dari keadaan rumah yang mereka buat. Dari pengamatan diketahui rumah yang dindingnya dibuat dari batu bata dan atapnya menggunakan genting jumlahnya jauh lebih banyak ditemukan di dalam masyarakat tambak dari pada di lingkungan penduduk desa pemilik sawah pertanian.

Rumah yang dibangun oleh para pemilik tambak ikan berukuran besar dan dilengkapi dengan pintu dan jendela kayu yang sangat bagus. Didalam rumah mereka terdapat hiasan-hiasan berupa ukiran kayu yang indah buatan dari dalam negeri (Masyhuri, 1995:81).

Baiknya tingkat kehidupan yang dinikmati para pemilik tambak ikan berlangsung terus sampai awal abad ke-20. Di desa para pemilik tambak ikan merupakan kelompok orang yang secara ekonomi kuat. Mereka adalah para haji-haji kaya serta para kepala desa. Melalui berbagai cara seperti pewarisan dan pembelian maka tambak ikan yang mereka miliki semakin bertambah luas dan terjadi penimbunan-penimbunan kepemilikan tambak ikan di satu tangan. Cara lain yang semakin menambah luasnya tambak ikan mereka adalah dengan meminjamkan uang jika tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya maka tambak ikan yang digunakan sebagai jaminan diambil (Onderzoek, 1909:16).

Penutup

Pada akhir abad XIX sampai awal abad XX luas tambak ikan mengalami penambahan yang cukup besar. Faktor eksternal merupakan sebab utama penambahan luas tambak ikan yang terjadi, yaitu adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah kolonial di sektor penangkapan ikan laut di Jawa yang mengakibatkan modal dan tenaga kerja di sektor ini sebagian berpindah ke sektor pertambakan ikan. Faktor lain yang cukup berperan yaitu ketersediaan lahan yang cukup besar di Karesidenan Surabaya dibandingkan daerah lain untuk pembukaan bentangan tambak ikan yang baru.

Dari dua proses perkembangan luas tambak ikan yang sudah berlangsung dapat dilihat betapa pentingnya modal dan mental penduduk. Pentingnya modal terlihat dalam dua hal. Yang pertama dilihat dalam lamanya waktu pembuatan tambak ikan. Semakin tersedia biaya maka semakin cepat selesai pula pembuatan tambak ikan dan sebaliknya semakin tidak ada biaya maka semakin lama selesainya pembuatan tambak ikan. Yang kedua dilihat dalam penambahan luas tambak ikan secara keseluruhan. Ketika tidak ada modal yang masuk ke sektor pertambakan ikan terlihat tidak ada penambahan luas tambak ikan. Dengan masuknya modal dari sektor perikanan laut maka terjadi penambahan yang cukup besar.

Mental penduduk juga berpengaruh besar dalam pengembangan tambak ikan. Penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani sebagian besar mempunyai sikap hidup yang hanya berdasar pada kebiasaan dan tidak memandang jauh ke depan untuk maju. Hai ini tidak mendukung untuk usaha pengembangan tambak ikan sehingga tidak terjadi penambahan luas tambak ikan. Dengan masuknya orang-orang baru dari sektor penangkapan ikan di laut maka terjadi perubahan. Orang-orang ini sudah terbiasa berspekulasi dalam menjalani hidup sehari-hari. Sikap mental seperti ini lebih mendukung untuk melakukan suatu usaha sehingga terjadi penambahan luas tambak ikan yang cukup besar.

Kepemilikan tambak ikan dalam rentang waktu pertengahan abad XIX sampai awal abad XX menunjukan perubahan, yaitu adanya anggapan yang sudah membudaya dari para pemilik tambak ikan bahwa tambak ikan bukan sekedar sebagai lahan penghidupan tetapi juga mencerminkan keberadaan keluarga.

Selanjutnya ada tiga hal yang penting dalam sistem produksi dari tambak ikan. Yang pertama hubungan penggarap dengan proses produksi. Dalam usaha tambak ikan keterlibatan penggarap dalam proses produksi sangat besar. Para penggarap tambak ikan terlibat langsung dalam proses produksi seperti penyiapan tambak untuk pemeliharaan, penaburan benih, pemeliharaan ikan, perawatan tambak dan sebagainya.

Yang kedua yaitu hubungan antara perbaikan teknik penggarapan serta sarana produksi dengan hasil produksi. Hasil produksi tambak ikan dapat ditingkatkan dengan nyata melalui perbaikan teknik penggarapan atau sarana produksi. Para mantri tambak memberikan petunjuk-petunjuk berupa perbaikan cara penggarapan kepada penggarap tambak ikan untuk meningkatkan hasil produksinya.

Yang ketiga yaitu kaitan antara batas kemampuan seseorang dalam menggarap tambak ikan dengan pola hubungan kerja yang ada dalam pengusahaan tambak ikan. Berawal dari batas maksimun luas tambak ikan yang dapat dikerjakan seorang penggarap maka terbentuklah sebuah pola hubungan kerja. Pola hubungan kerja yang terbentuk menempatkan semua orang yang terlibat dalam penggarapan tambak ikan pada posisi yang berbeda-beda dengan berdasar pada pemilikan, kepercayaan dan tenaga.

Penilaian ketiga hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem produksi tambak ikan sama dengan sistem produksi pada lahan pertanian. Dengan sistem produksi yang demikian maka tidak mengherankan bila penggarap tambak ikan lebih dikenal dengan sebutan petani tambak.

Ikan bandeng yang merupakan hasil utama dari tambak ikan memiliki sifat istimewa yang khas. Sifat istimewa itu adalah rasanya lebih lezat dibandingkan ikan jenis lain yang menyebabkan harga ikan bandeng

lebih mahal. Hal ini membuat ikan bandeng mempunyai segmen pasar dari wilayah pemasaran tersendiri. Karena ikan bandeng lebih banyak dipasarkan dalam bentuk ikan segar maka dalam iklim seperti yang ada di Jawa, sarana transportasi sangat mempengaruhi pemasarannya. Dengan sarana, transportasi yang memadai maka hasil tambak ikan dari Karesidenan Surabaya dapat dipasarkan ke kota-kota di luar wilayah karesidenan seperti Madiun, Kediri dan Malang. Hal ini rupanya yang menyebabkan jumlah pemasukan pemerintah kolonial pada awal abad XX meningkat, karena pemasaran yang lebih lancar akan membuat harga menjadi lebih baik.

Pemerintah kolonial Belanda rupanya cukup memperhatikan usaha tambak ikan yang dilakukan penduduk. Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan hampir menyangkut semua hal yang berkaitan dengan tambak ikan seperti pembukaan bentangan tambak baru, pemilikan, proses produksi. Semua kebijaksanaan yang dikeluarkan bertujuan untuk mengembangkan keberadaan tambak ikan. Namun penambahan luas tambak rupanya tidak diikuti dengan penambahan pemasukan. Hal itu kemungkinan membuat pemerintah kolonial pada 1917 mengeluarkan kebijaksanaan untuk menarik pajak dari tambak ikan di tanah partikelir yang tadinya bebas pajak dengan tujuan untuk memperbesar pemasaran dari tambak ikan. Satu-satunya yang terlepas dari kebijaksanaan pemerintah kolonial adalah masalah pemasaran. Walaupun demikian secara tidak langsung pemerintah kolonial telah mengambil suatu kebijaksanaan yang sangat membantu masalah pemasaran yaitu pemasangan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah Karesidenan Surabaya dengan kota-kota di sekitarnya.

Usaha tambak ikan yang dilakukan penduduk mempunyai dampak sosial ekonomi yang cukup nyata. Dampak sosialnya yaitu terbentuknya masyarakat tambak. Masyarakat tambak ini merupakan suatu komunitas tersendiri dari penduduk desa tempat tambak itu berada. Di dalam masyarakat tambak ini terdapat kegiatan ritual yang berbeda dari penduduk desa karena sudah disesuaikan dengan lingkungannya.

Dampak ekonomi yang cukup mencolok yaitu besarnya penghasilan yang diterima pengelola tambak, terutama pemilik tambak, jauh lebih besar dibandingkan penghasilan dari mata pencaharian yang lain. Sejak pertengahan abad XIX sampai awal abad XX terutama para pemilik tambak merupakan orang-orang atau golongan penduduk dengan tingkat ekonomi yang tinggi dibandingkan penduduk desa lain yang bermata pencaharian lain. Tingkat ekonomi yang tinggi ini menyebabkan mereka mempunyai kedudukan sosial yang cukup berpengaruh serta mempunyai akses yang kuat untuk semakin menambah kekayaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Encyclopedie van de Nederlandsch-Indie, IV. Leiden´s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921.

Encyclopedie van de Nederlandsch-Indie, VIII. Leiden´s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1939.

Kodiran. 1971. "Kebudayaan Jawa" dalam Koentjaraningrat, ed. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Koentjaraningrat. 1971. "Aneka Warna Manusia dan Kebudayaan Indonesia Dalam Pembangunan" dalam Koentjaraningrat, ed. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Kuntowijoyo. 1980. "Social Change in Agrarian Society: Madura 1850-1940." Disertasi untuk mendapatkan gelar Doctor Ilmu Sejarah pada Columbia University.

Lekkerkerker, C. 1938. *Iand en Volke van Java*, Batavia. J.B Wolter´s Uitgever Mattschapp.

Masyhuri. 1995. "Pasang Surut Usaha Perikanan Laut: Tinjauan Sosial-Ekonomi Kenelayanan di Jawa dan Madura, 1850-1940." Disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Sejarah pada Vrije Universitelt, Amsterdam.

Memori Sejarah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan) Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.

Onderzoek naar de Mindere Welvart der Inslandsche Bevolking op Java en Madoera, Ib. Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzokingen naar de Vischteell en Visscherij en Daaruit Gemaakte Gevolgtrekkingen, 2e deel. Batavia: Landsdrukkerij, 1905.

Onderzoek naar de Mindere Welvart der Inslandsche Bevolking op Java en Madoera, 9b. Samentrekking van de Afdeelingsverslagen der Onderzoekingen naar: de Economie van de Desa. Weltrevreden: Boekhandel Visser & Co. 1909.

Schuster, W.H. 1949. *De Viscullwur in de Kustvijvers op Java.* Bandung: Departement van Landbouw en Visserij, 1949.

Slamet Soeseno. 1983. *Budidaya Ikan dan Udang Dalam Tambak.* Jakarta: PT. Gramedia.

Spall, P.W.A. 1865. "Onderzoek Orntrent het Aanleggen van Zout-Zoetwater Visch Vijvers op Java" *Tijdschriftvoor Nijverheid en Lanbouw in Nederlandsch-Indie, 11.* Batavia: W. Ogilvie.

Sutjipto Tjiptoatmodjo. 1983. "Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII Sampai Medio Avad XIX)" Disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Sejarah pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Veth, P.J. 1882.*Java: Geograpisch, Etnologisch, Historisch I,* Harlem: De Erven F. Bohn.

GEMPA BENGKULU 12-13 SEPTEMBER 2007 DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKAMPUNGAN NELAYAN DI BENGKULU UTARA DAN MUKO-MUKO[1]

Seno[2]

Pendahuluan

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam paling misterius bagi manusia. Terjadinya bisa dengan tiba-tiba dan kapan saja tidak mengenal waktu. Berbeda dengan bencana letusan gunung berapi, yang selalu didahului dengan tanda-tanda sehingga bisa diprediksi. Gempa bumi datangnya dapat saja mendadak, dan dalam waktu hanya beberapa detik saja dapat meruntuhkan bangunan-bangunan sehingga rata dengan tanah. Akibatnya, saat gempa terjadi yang ada cuma kepanikan dan kegelisahan tanpa tahu apa yang harus diperbuat.

Sebelum ilmu pengetahuan berkembang seperti saat ini, orang-orang zaman dahulu mempunyai pemikiran bermacam-macam tentang penyebab terjadinya gempa bumi. Orang Mongolia misalnya mereka percaya setelah bumi selesai diciptakan, Tuhan kemudian meletakkannya di atas punggung seekor katak yang sangat besar. Maka ketika katak bergerak terjadilah gempa bumi.

Berbeda dengan pandangan itu, Aristoteles menyatakan bahwa gempa bumi terjadi karena udara yang terkurung di dalam perut bumi ingin keluar. Ketika udara itu benar-benar bisa keluar, bumipun

[1] Disampaikan dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian BPNB se-Indonesia di Makassar pada 25-28 April 2016.

[2] Staf Peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang

bersendawa yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa bumi. Sementara itu penduduk Sunda di Jawa Barat mempercayai gempa bumi terjadi karena adanya batu hidup yang terdapat di puncak gunung. Mereka percaya ketika batu itu bergerak menyebabkan terjadinya gempa bumi.

Di Jepang ada anggapan bahwa di dalam bumi terdapat suatu ikan lele *(cat fish)* raksasa yang bersemayam di dalamnya. Jika ikan lele ini menggeliat/bergoyang maka akan terjadi gempa bumi. Ini ditandai oleh adanya fenomena alam berupa ikan lele yang menyembul ke permukaan air sebelum terjadinya gempa bumi.[3]

Pada zaman modern ini, setelah ilmu pengetahuan berkembang, apa lagi sejak ditemukannya alat untuk mendeteksi getaran bumi yang disebut *seismograph*, maka terjadinya gempa dilihat sebagai fenomena alam biasa. Melalui *seismograph* maka sejak awal abad ke-20 telah dapat dianalisis susunan bagian dalam bumi. Para ahli juga dapat memetakan jalur-jalur penyebaran gempa bumi di seluruh dunia beserta sifat-sifatnya. Untuk itu kita harus mampu merancang bangunan-bangunan yang sesuai dengan karakteristik gempa di mana kita tinggal. Yang perlu diperhatikan bahwa sikap dan tindakan bagaimana menghadapi gempa bumi amatlah penting.

Secara geografik, wilayah Provinsi Bengkulu termasuk daerah yang rawan gempa. Di Bengkulu memang belum pernah terjadi tsunami yang dahsyat seperti yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam 26 Desember 2004. Namun kemungkinan terjadinya tsunami besar juga dapat terjadi di Bengkulu di masa-masa yang akan datang. Tsunami ini dapat terjadi bisa disebabkan oleh adanya pergerakan air laut dalam jumlah yang sangat besar. Pergerakan itu disebabkan terjadinya gempa di dasar laut yang berkekuatan lebih dari 6,5 SR dan pusat gempanya termasuk dangkal (kedalaman kurang dari 60 km), serta sesar yang terjadi merupakan sesar naik dengan deformasi vertikal dasar laut relatif besar.

Secara alami, pantai wilayah barat Sumatera pada umumnya dan pantai pesisir Bengkulu pada khususnya termasuk daerah yang rawan

[3] Tiar Prasetya dkk. 2006. *Gempa Bumi,* Ciri dan Cara Menanggulanginya. Yogyakarta: Gitanagari, hlm. 27-29.

tsunami yang diakibatkan oleh gempa dasar laut. Hal ini disebabkan karena di situlah tempat bertemunya lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia itu terus bergerak rata-rata 6 cm per tahun ke arah utara.

Gempa yang mengguncang Bengkulu tanggal 12 September 2007 yang terjadi di sore hari menjelang magrib telah menimbulkan kerusakan cukup parah. Namun trauma dan ketakutan penduduk belum sirna, hanya selang sehari gempa Bengkulu berkekuatan 7,9 Skala Richter, pada Kamis pagi, 13 September gempa lagi dengan kekuatan 7,7 SR. Meskipun gempa tersebut berpusat di Sungaipenuh, namun getarannya terasa sangat kencang di pesisir Bengkulu Utara dan Muko-Muko.

Pusat gempa Bengkulu berjarak 159 km barat daya Kota Bengkulu, sementara gempa yang kedua berjarak 193 km dari kota Bengkulu, mendekat ke arah Padang, yaitu sekitar 214 km Tenggara Padang. Pusat gempa mendekat ke Kepulauan Mentawai di sebelah Selatan Padang.[4]

Menurut Danny dan Prih, sebenarnya rangkaian gempa itu menyebabkan tsunami, tetapi lemah. Gempa Bengkulu menimbulkan tsunami 3 meter di kawasan pantai, tetapi terendam karena pantai Bengkulu tingginya lebih dari 5 meter. Gempa Padang memicu tsunami 70 cm. Gelombang inipun kurang dirasakan masyarakat.[5] Jumlah gempa susulan pada gempa Bengkulu tergolong ekstrim, yaitu 44 kali dalam sehari dengan magnitudo 4,5 – 7,7 SR.

Gempa Bengkulu ini menarik untuk diteliti mengingat kerusakan yang ditimbulkan cukup besar dan merata di sepanjang pantai Bengkulu dari Muko-Muko hingga Bengkulu Utara, namun belum ada yang mengkaji atau menelitinya. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap persoalan-persoalan yang muncul setelah gempa itu terjadi dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan tersebut.

---

[4] Gempa Sumatera, Perlu Semakin Waspada Untuk Mitigasi Bencana, dalam *Kompas*, Jumat, 14 September 2007, hlm. 1.

[5] *Ibid.*, hlm. 15.

Rangkaian pertanyaan ini dapat membantu mengarahkan pokok-pokok persoalan secara lebih jelas. Adapun pertanyaan yang akan dirumuskan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Sampai sejauh mana dampak gempa Bengkulu 2007?, (2) Persoalan-persoalan apa yang muncul pasca gempa Bengkulu?, dan (3) Sampai sejauh mana peran pemerintah daerah dalam penaggulangan bencana gempa tersebut?

Adapun batasan spasial dalam pembahasan ini adalah sepanjang pantai Bengkulu Utara dan Muko-Muko yang merupakan perkampungan nelayan yang mengalami kerusakan paling parah. Batasan temporal dalam permasalahan ini dilakukan pada September 2007 dan dampaknya hingga tahun 2008.

Dampak Gempa Bengkulu 2007.

Gempa pada 12 dan 13 September 2007 menyebabkan hampir seluruh wilayah Provinsi Bengkulu mengalami kerusakan parah. Yang paling parah adalah Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-Muko. Demikian juga Kota Bengkulu mengalami kerusakan yang berat. Yang kerusakannya kecil atau bahkan tidak mengalami kerusakan yang berarti itu adalah Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, meskipun korban jiwa sangat sedikit, tetapi kerusakan rumah dan bangunan lainnya cukup parah. Data Pos Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Provinsi Bengkulu mencatat, jumlah sekolah yang rusak karena gempa di daerah itu mencapai 885 unit. Parahnya lagi, 260 unit di antaranya kini dalam kondisi rusak total karena gedung dan ruang kelas ambruk.[6]

Direktur Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum telah menginven-tarisasi 25 titik kerusakan infrastruktur jalan akibat gempa, yang sebagian besar terletak di wilayah Provinsi Bengkulu. Namun kerusakan jalan itu diprediksi tidak akan mempengaruhi kelancaran arus mudik di Bengkulu, Jambi dan Sumatera Barat.

[6] *Ibid.*

"Temuan sementara kami, ada kerusakan di 25 titik. Ada jalan yang amblas atau rusak karena permukaan tanah bergeser ke samping. Kami akan perbaiki secepatnya", kata Dirjen Bina Marga Departemen PU Hermanto Dardak. Daftar sementara kerusakan infrastruktur jalan Departemen PU menyatakan, kerusakan jalan terjadi antara lain di ruas Permo-Beringin II, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, ruas Tambang Sawah Ketenan, Kabupaten Lebong, Bengkulu dan ruas Curup-Tes, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.[7]

Kerusakan yang terjadi di Kabupaten Muko-Muko, baik berupa kapal maupun rumah yang hancur cukup besar jumlahnya. Diperkirakan sebanyak 403 unit kapal nelayan rusak berat dihantam gelombang tsunami. Kerusakan yang cukup parah tersebut menyebabkan ratusan nelayan di Muko-Muko tidak dapat melaut. Gempa berkekuatan 7,9 SR telah membuat lebih dari 500 keluarga nelayan di Muko-Muko kehilangan sumber penghidupan. Selain sebagian besar rumah mereka rusak total, para nelayan tidak dapat melaut karena sarana dan prasarana penangkap ikan ikut rusak saat gempa.[8]

Menurut Ichwan Junus, beberapa saat setelah gempa mengguncang kawasan pesisir Muko-Muko, para nelayan dikejutkan munculnya gelombang pasang yang tingginya lebih dari 3 (tiga) meter. Gelombang pasang ini menerjang rumah-rumah penduduk dan merusak ratusan kapal nelayan yang tengah ditambatkan. Bahkan ada yang terseret hingga ke tengah laut.[9]

Secara terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Muko-Muko Saparuddin menjelaskan, sarana nelayan yang rusak berat itu tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Muko-Muko Selatan, Pondok Suguh dan Muko-Muko Utara. Tiga kecamatan itu dikenal sebagai sentra perikanan tangkap. Tentang jenis kerusakannya, ada yang pecah dan rontok, atau mesin mati total. Untuk memperbaiki

---

[7] *Ibid.*

[8] Wawancara dengan Ichwan Junus, Bupati Muko-Muko tanggal 18 September 2008.

[9] "Empat Ratus Tiga Kapal Nelayan di Muko-Muko Rusak Berat" dalam *Kompas*, Selasa, 25 September 2007, hlm. 23.

kerusakan dibutuhkan waktu lama, sehingga para nelayan tidak bisa melaut dalam jangka panjang.[10]

"Para nelayan di Muko-Muko masih bingung untuk memperbaiki alat angkut yang rusak parah itu, apalagi pada waktu bersamaan mereka juga harus merehabilitasi rumah yang nyaris ambruk diguncang gempa", kata Saparuddin. Ia sendiri kehilangan 7 buah kapal nelayan.[11]

Mengenai kerusakan rumah di Muko-Muko, Ichwan menyatakan, untuk sementara ada 10.412 unit. Dari jumlah itu, 5.334 unit berkategori rusak total, roboh dan rata dengan tanah. "Saat ini sedang dilakukan validasi pendataan para korban dan bangunan yang rusak. Data yang ada di Satlak (Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi) baru laporan awal", kata Ichwan lagi.

Ia menambahkan, dua minggu terakhir Satlak masih konsentrasi dalam penanganan tanggap darurat. Titik beratnya adalah penyalurtan bantuan bahan makanan, tenda dan pelayanan kesehatan bagi para korban gempa.[12]

Yanto (46) memandang air laut yang bergelombang di lepas pantai dengan tatapan menerawang. Nelayan di Pantai Tapak Paderi itu sejak pagi duduk didepan perahu miliknya yang dibiarkan teronggok di pinggiran sungai.

Sejak hari Kamis tanggal 13 September 2007 perahu-perahu milik nelayan di pantai itu tidak dioperasikan, menyusul gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter yang terjadi sehari sebelumnya. Gempa yang diikuti gelombang pasang tinggi saat itu membuat gentar para nelayan yang biasa melaut pada malam hari atau subuh. Bagaimana tidak. Setelah musibah itu, di Pantai Tapak Paderi, hampir 10 perahu nelayan tradisional rusak dan hilang terseret gelombang laut yang tinggi.[13]

---

[10] Wawancara dengan Saparuddin, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Muko-Muko, tanggal 18 September 2008.

[11] *Ibid.*

[12] *Ibid.*

[13] Wawancara dengan Yanto, Nelayan di Pantai Tapak Paderi, Muko-Muko pada tanggal 18 September 2008.

Hingga kemarin belum ada satu nelayanpun yang pergi melaut. Beberapa orang memilih memperbaiki perahu-perahu mereka yang rusak[14]. "Kami masih trauma dengan gempa dan gelombang yang tinggi. Apalagi cuaca sudah membaik, angin tidak lagi kencang dan ombak tidak lagi tinggi, baru kami berani melaut", kata Yanto.[15]

Hal serupa terjadi di Pantai Pulau Baai, Kota Bengkulu. Ratusan nelayan di sana sejak hari Rabu lalu tidak melaut karena khawatir dengan gempa susulan dan gelombang besar. Ini artinya, mereka kehilangan penghasilan untuk sementara waktu.

Hendri (30), nelayan di Pulau Baai, menuturkan, ia biasanya mendapat ikan rata-rata 200 kilogram setelah melaut empat hari. Akibat gagal melaut, untuk menyambung hidup dan makan sehari-hari, dia terpaksa berhutang kepada pedagang pengumpul atau tengkulak di sana.[16]

Di Provinsi Bengkulu, korban tewas tercatat ada 10 (sepuluh) orang, dengan perincian 2 (dua) orang meninggal di Kota Bengkulu, 5 (lima) di Kabupaten Muko-Muko dan 3 (tiga) orang di Bengkulu Utara.

Selain itu, sejumlah gedung pemerintah, sekolah dan tempat ibadah rusak. Gempa juga memutuskan jalur darat dari Bengkulu ke Padang di ruas Lunang Silaut dan Lais, Bengkulu Utara. Beberapa tiang listrik roboh sehingga di beberapa tempat di Bengkulu Utara dan Muko-Muko untuk sementara tidak mendapatkan aliran listrik[17].

Berdasarkan data yang ditulis di Kompas yang terbit pada hari Kamis 13 September 2007, kerusakan yang terjadi di Bengkulu sebanyak 132 rumah roboh, 1.233 rumah rusak berat, dan 2.641 rumah rusak ringan. Di Pesisir Barat Bengkulu Utara lebih dari 200 rumah hancur dan sekitar 800 rumah rusak. Kerusakan paling parah terjadi di Kecamatan Lais sehingga memaksa sebagian besar penduduk tinggal di tenda-tenda yang mereka

[14] "Gempa Sumatera, Mereka Masih Trauma dan Belum Berani Melaut" dalam *Kompas,* Minggu, 16 September 2007, hlm. 5.

[15] Wawancara dengan Yanto, Nelayan di Pantai Tapak Paderi, Muko-Muko pada tanggal 18 September 2008.

[16] Wawancara dengan Hendri, Nelayan di Pantai Pulau Baai, Kota Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

[17] "Ribuan Rumah Rusak di Bengkulu dan Sumbar" dalam *Kompas,* Jumat, 14 September 2007, hlm. 1.

dirikan di depan rumah.

Mulai dari Kota Bengkulu sampai ke Lais, gempa menyebabkan tembok-tembok dan atap rumah berjatuhan. Banyak kabel listrik yang putus karena bagian atas tiang jatuh akibat gempa. Sejak dari Kecamatan Pondok Kelapa sampai Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, di kiri kanan jalan, terdapat rumah yang roboh sampai rata dengan tanah atau rusak di beberapa bagian.

Setengah bangunan Balai Desa di Desa Lubuk Tanjung, Air Napal, roboh karena tulang besi pada kerangka temboknya patah. Di Desa Kota Agung, Air Besi, Bengkulu Utara, hampir semua penduduk membangun tenda di depan atau samping rumah. Hampir tidak ada lagi rumah yang utuh. Jika bagian depan bangunan utuh, di bagian tengah atau belakang rusak atau dindingnya roboh.[18]

Kemiskinan Bertambah

Betapa dahsyatnya gempa Bengkulu dapat dilihat antara lain dari ambruknya sejumlah bangunan. Di Kota Bengkulu, bangunan sekolah SMA Santo Carolus rusak berat, sementara jalan penghubung Bengkulu Utara ke Kota Bengkulu di Kecamatan Lais rusak berat.

Gempa yang menimbulkan kerusakan parah pada rumah dan perahu nelayan diakui atau tidak akhirnya menambah tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Sebagaimana dikemukakan Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Pemberantasan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Bahrullah Abbas, jika rumah yang rusak itu tidak diperbaiki, akan berpotensi menambah jumlah kemiskinan di provinsi tersebut.

APBD Provinsi sangat terbatas. Jangankan untuk mendanai perbaikan rumah penduduk, untuk pemutakhiran data keluarga miskin tahun lalu saja kami kekurangan dana. Jika tidak ada bantuan dana rehabilitasi dari pemerintah pusat, dipastikan kemiskinan penduduk akan bertambah.[19]

---

[18] *Ibid.*

[19] "Gempa Sumatera, Mereka Masih Trauma dan Belum Berani Melaut" dalam *Kompas,* Minggu, 16 September 2007, hlm. 5.

Hingga kemarin jumlah rumah warga yang terdata mengalami kerusakan mencapai 14.070 rumah. Sebanyak 3.830 rumah tercatat rusak berat, 4.594 rumah rusak sedang dan 5.646 rumah rusak ringan.[20]

Mengenai jumlah penduduk miskin, Data Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Bengkulu menunjukkan, pada tahun 2005 tercatat 183.931 keluarga atau 46 persen dari 369.341 keluarga tergolong miskin. Kini memang sudah ada harapan perbaikan hidup bagi para korban. Seperti dikemukakan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, pihaknya sedang mendata rumah, gedung dan fasilitas umum di Bengkulu yang rusak. Rehabilitasi rumah yang rusak akan dibiayai melalui APBN dan dana *block grant*.

Gempa yang menggoncang Bengkulu telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Di beberapa lokasi, seperti Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kemarin belum seluruh toko atau warung buka. Sebagian besar warga tampak masih sibuk mengurus rumah yang hancur, bahkan banyak pula yang masih mengungsi.

Tidak hanya nelayan, sejumlah petanipun belum berani berladang atau ke sawah. Mereka masih trauma dengan gempa susulan. Bisa dikatakan, sebagian besar korban gempa saat ini kehilangan pencaharian dan sangat bergantung pada pertolongan orang lain. Sebab, data Badan Pemberdayaan Masyarakat Bengkulu menunjukkan, 80 persen atau mayoritas penduduk Bengkulu adalah petani dan nelayan.[21]

Ketika gempa terus mengguncang Muko-Muko, satu-satunya harapan warga hanyalah segera dikucurkan dana perbaikan dan pembangunan kembali (dana *recovery*) seperti yang dijanjikan pemerintah pusat sejak pascagempa. Dana itu besarnya bervariasi, mulai dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk rusak ringan hingga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bagi bangunan yang roboh.

Bupati Muko-Muko Ichwan Yunus yang ditemui di Muko-Muko, Selasa tanggal 26 Februari 2008, menyatakan, Satlak PBP dua hari lalu

---

[20] *Ibid.*

[21] "Gempa Bengkulu, Enam Bulan Bersama Teror Tsunami" dalam *Kompas,* Kamis, 28 Februari 2008, hlm. 1.

baru menerima kucuran dana perbaikan rumah bagi warga sebesar Rp. 21,7 miliar. Bantuan tahap pertama untuk membangun kembali rumah para korban gempa terlambat sampai di kabupaten karena mengendap tiga bulan di Kantor Pemprov Bengkulu. "Dalam minggu ini, bantuan pusat itu akan segera dibagikan. Apalagi, para korban gempa yang berhak semuanya memang sudah memiliki rekening di bank"[22], katanya.

Bagaimana pun kucuran bantuan kemanusiaan paling tidak bisa sedikit mengobati trauma warga Muko-Muko, yang sejak beberapa hari belakangan masih diteror gempa dan tsunami.

Yang biasanya menjadi nelayan, ia tetap ingin jadi nelayan. Maka rumahnya harus dibangun di dekat pantai. Jika jauh dari pantai, hal ini akan menyulitkan, sedangkan beralih profesi juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Akhirnya mereka tetap membangun rumah di tempat reruntuhan rumahnya yang hancur karena gempa. Hal ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain.

Menurut Camat Lais, Bu Siti Khairiah, pendapatan penduduk di Lais rata-rata sedang atau bahkan tergolong miskin. Rumah dan bangunan umum rata-rata juga tergolong sederhana. Jika ada yang kaya jumlahnya tidak banyak, hanya beberpa glintir saja. Mereka itu tergolong kaya karena mempunyai beberpa kebun seperti kebun karet, kebun sawit dan kebun coklat.[23]

Nelayan dan petani Lais tergolong miskin. Para petaninya hanya memiliki sepetak sawah atau ladang yang tidak luas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan nelayan hanya memiliki perahu/kapal ikan kecil yang daya tangkapan ikannya tidak banyak.

Bahkan Kantor Camat Lais juga tergolong sederhana. Itupun sebagian bangunannya mengalami kerusakan cukup parah ketika dihantam gempa, sehingga kondisinya sebenarnya sudah tidak layak untuk berkantor. Namun karena ketiadaan dana dan bantuan juga belum

[22] Wawancara dengan Ichwan Junus, Bupati Muko-Muko tanggal 18 September 2008.

[23] Wawancara dengan Ibu Siti Chairiyah, Camat Lais, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Agustus 2008.

kunjung tiba, terpaksa kondisi kantor yang sudah miring bangunannya tersebut masih tetap dipakai sampai sekarang. Waktu disurvay sama konsultan, ketika bencana gempa itu terjadi, bangunan kantor Camat yang di depan ini sudah turun 10 cm, dan posisi gedung sudah miring.

Beberapa bulan sebelum terjadi musibah gempa besar tersebut, sudah ada tenaga lapangan yang membantu melakukan pemasangan sirine untuk memberitahukan jika terjadi tsunami. Lagi pula kejadian gempa tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004 telah memberi pelajaran bagi kita semua yang tinggal di daerah pantai. Jika terjadi gempa besar dan diperkirakan akan menimbulkan tsunami, masyarakat secara spontan akan lari ke arah bukit atau tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kemungkinan terjadi tsunami. Jadi sirine yang dipasangpun sebenarnya sudah tidak efektif karena sebelum sirine dibunyikan, orang sudah lari duluan.[24]

Untuk yang di Muko-Muko sudah dibuatkan pula sirine. Bahkan juga dibuatkan seperti sumur, tetapi yang di Lais ini belum karena untuk membangun mahal biayanya, sedangkan dana tidak ada.

Di Lais juga ada himbauan untuk membangun rumah tahan gempa, tetapi himbauan itu sulit diwujudkan di lapangan, karena untuk membangun rumah yang tahan gempa untuk ukuran warga masyarakat Lais dirasa mahal. Paling-paling hanya membangun rumah semi permanen yang separo dindingnya dari bata semen, kemudian separo yang di atasnya lagi dari papan dengan atap seng. Dengan demikian, rumah tahan gempa itu program khususnya belum berjalan, Cuma arahan-arahannya sudah ada.

Bagi mereka yang rumahnya hancur, dan mendapat bantuan dana kemudian dibangun kembali dengan semi permanen, separo dari bata semen dan separo lagi dengan papan. Atau semua dibuat dari bahan papan. Pasca gempa, harga kayu mengalami lonjakan yang cukup besar. Hal ini terjadi karena pasca gempa terjadi permintaan kayu yang cukup

[24] Wawancara Dengan Siti Khairiah, Camat Lais, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Agustus 2008.

besar pula, sedangkan persediaan kayu di hutan sudah sangat terbatas. Untuk mengatasinya, mereka yang masih mempunyai kebun dan ada pohon kayu yang cukup besar, mereka tebang dan dimanfaatkan untuk bahan bangunan, meskipun kualitasnya kurang bagus. Seperti kata pepatah, tak ada rotan, akarpun jadi. Maka kayu sembarangpun dapat dipakai untuk bahan bangunan. Mereka yang sudah dapat memperbaiki rumahnya itu karena mereka mempunyai simpanan. Sedangkan yang tidak mempunyai simpanan, mereka terpaksa membangun dengan kayu apa adanya sehingga kondisinya belum dapat dikatakan layak. Hanya merupakan bangunan rumah sederhana yang dapat dijadikan berteduh dan melepas lelah. Hal ini disebabkan karena bantuan yang diterima belum cukup untuk membangun rumah tahan gempa yang layak huni.

Pada waktu ada work shop penanggulangan gempa, diinformasikan bahwa rencana yang akan direlokasi bagi mereka yang tinggal di Air Padang dipindah ke tempat yang lebih tinggi. Mengingat memindahkan manusia itu tidak mudah, maka pelaksanaannya sampai sekarang belum juga tuntas. Apalagi bagi mereka yang tempat tinggalnya berada di pinggir jalan poros dan biasa berjualan/berdagang. Mereka merasa keberatan direlokasi kaerena di tempat yang baru mereka merasa sulit untuk memulai hidup baru karena pekerjaan yang lam tidak bisa diganti dengan pekerjaan di tempat yang baru. Waktu terjadi gempa besar, mereka berbondong-bondong membikin tenda ke tempat yang aman, tetapi setelah situasinya tidak mengkhawatirkan lagi, mereka kembali lagi ke tempat tinggalnya semula, meski rumahnya sudah rata dengan tanah. Mereka untuk sementara membangun tenda atau tempat berteduh sederhana sampai saatnya rumah yang baru dapat dibangun kembali. Mereka bertahan berbulan-bulan, bahkan sampai lebih setahun di tempat darurat tersebut. Hal ini mereka hadapi selama ini karena kondisi rumahnya sudah hancur, belum sempat membangun, sementara mau pindah ke tempat barupun banyak faktor yang menghambat, seperti tidak mempunyai tanah, di tempat lain. Kalau sekarang yang sudah pindah atau bersedia direlokasi itu ada 16 Kepala Keluarga (KK). Hal ini dimungkinkan karena mereka

mempunyai tanah. Daerah relokasinya terletak di daerah Air Padang, tidak terlalu jauh, jaraknya hanya 500 meter. Sedangkan mereka yang tidak bersedia pindah karena berada di jalan poros/lintas Sumatera, yang dinilai sangat strategis untuk berjualan.[25]

Peran Pemerintah Daerah

Mengenai kiprah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi cukup besar. Mereka menurunkan para stafnya ke lapangan untuk ikut membantu meringankan beban derita masyarakat yang terkena musibah. Di samping memberikan bantuan tenaga, fikiran, mereka juga memberikan bantuan moral dan materaial. Bantuan diberikan secara pribadi, kolektif maupun bantuan dari instansi tempatnya bekerja. Secara rinci, kiprah Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Penyaluran Bantuan**

Untuk meringankan beban derita masyarakat yang terkena musibah gempa, Pemerintah Daerah Bengkulu menurunkan bantuan beras untuk perpanjangan tanggap darurat, yaitu sekitar 1.509 ton beras yang kemudian disalurkan langsung ke satkorlak-satkorlak di kabupaten.

Kalau bantuan-bantuan, baik dari NGO maupun pihak-pihak lain itu terfokus di satkorlak yang di back up dari Polda dan BPKP. BPKP itu tugasnya mengaudit supaya laporan-laporannya langsung final. Jadi Bapak Gubernur meminta bantuan ke BPKP setiap hari itu berapa yang masuk dan berapa yang keluar langsung diaudit ke satkorlak. Satkorlak itu termasuk litbang linmas, termasuk kesehatan perhubungan, PU, Ormas-Ormas dan lain-lain.

Bantuan yang disalurkan melintasi jalan darat yang di back up sama TNI dan Polda. Jadi ada TNI ada polisi dan semua unsur masuk. Waktu kejadian gempa itu, pemerintah langsung mendirikan tenda-tenda di tempat-tempat pengungsian di seluruh wilayah yang mengalami

[25] Wawancara dengan Siti Khairiyah, Camat Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 8 Agustus 2008.

kerusakan parah, seperti di Rumah Sakit, di satkorlak, di masjid, di sekolah dan sebagainya.

Untuk menambah tenaga sukarelawan, pemerintah Provinsi Bengkulu juga merekrut tenaga sukarelawan dari masyarakat untuk dilatih menangani dan menyalurkan bantuan kepada korban yang terkena musibah gempa. Agar lebih tertib dan aman, maka barang-barang yang akan dibagikan kepada korban, disalurkan melalui satkorlak[26].

Pemerintah Daerah mempunyai stok makanan yang disalurkan melalui satkorlak. Jadi data lengkapnya di satkorlak. Termasuk rekafree nya untuk Bengkulu ditangani melalui dana Menko Kesra dan Depsos. Bedanya jika di Depsos menangani bantuan sosial, sedangkan Kesra ke satkorlak.. Dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab menangani ini adalah Asisten Dua, yang waktu itu dijabat oleh Bapak Asnawi Alamsyah.

Untuk menghindari ancaman bahaya tsunami pasca gempa, Pemerintah Daerah sudah mensosialisasi tempat-tempat atau titik-titik berkumpul. De depan kantor SKIP Kota Bengkulu ada papan petunjuk jalur evakuasi kepada masyarakat Kota Bengkulu. Demikian juga di seluruh kota kabupaten seluruhnya sudah diperintahkan oleh gubernur untuk membuat jalur evakuasi. Semua sudah menyebar dari Muko-Muko sampai ke Kaur sudah ada jalur evakuasi.[27]

Mungkin masih ada yang belum membuat jalan permanen, namun untuk jalur evakuasi sudah disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Misalnya jika terjadi gempa dahsyat yang dikhawatirkan akan terjadi tsunami, maka lokasinya itu, titik evakuasinya sudah diatur harus lari kemana. Di Kota Bengkulu saja sudah ada 12 titik berkumpul, jika terjadi gempa larinya ke tempat yang telah ditentukan. Jadi sudah ada peta evakuasinya.

Waktu bulan Desember 2007 pernah ada uji coba yang dilakukan untuk seluruh Provinsi Bengkulu dan membentuk titik-titik berkumpul,

[26] Wawancara dengan Surianto, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

[27] *Op. cit.*, hlm. 24.

lengkap dengan memasang tenda pengungsi. Begitu mendengar ada sirine berbunyi, masyarakat harus segera lari ke tempat yang jauh dari pantai atau ke tempat ketinggian/perbukitan. Uji coba itu dilakukan untuk mengantisipasi seandainya suatu saat nanti ada terjadi gempa besar yang menimbulkan tsunami.

Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2000 kekuatan getarannya ada 7, 3 Skala Rechter, sedangkan gempa tahun 2007 kekuatannya sekitar 7, 9 Skala Recter. Tetapi menurut catatan dari Amerika Serikat gempa tahun 2007 itu berkekuatan 8, 8 Skala Rechter. Pusat gempa tahun 2000 berada di Enggano dengan kerusakan yang parah di daerah Bengkulu Selatan, Kaur, Siluma dan kota. Sedangkan pusat gempa tahun 2007 berada pada jarak 10 kilo meter pantai Barat Bengkulu dengan kedalaman 10 km yang menimbulkan goncangan ke kiri dan ke kanan, artinya goncangan yang horisontal.

Tempat kerusakannya berbeda. Kalau tahun 2000 kerusakannya di Bengkulu Selatan, sedangkan tahun 2007 di Bengkulu Utara. Kerusakan yang ditimbulkan dari kedua gempa tersebut hampir sama. Pada tahun 2000 yang meninggal 99 orang, sedangkan tahun 2007 hanya 16 orang. Kecilnya korban meninggal ini disebabkan faktor keberuntungan. Gempa tahun 2000 terjadinya pada jam 12 malam. Sedangkan gempa tahun 2007 pada waktu menjelang shalat magrib, sehingga orang-orang masih berada di luar rumah. Waktu itu sore menjelang datangnya bulan puasa.[28]

Seandainya gempa tahun 2007 itu orang-orang masih berada di dalam rumah/gedung, maka tidak dapat dibayangkan jumlah korban yang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan. Karena seperti di Lais dan sekitarnya, dapat disaksikan banyaknya rumah-rumah yang ambruk. Jika mereka berada di dalam rumah, mereka tentu mati tertimpa reruntuhan bangunan. Terhindarnya korban jiwa ini disebabkan juga karena adanya sosialisasi sebelumnya, sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dianggap berhasil.

[28] Wawancara dengan Surianto, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

Ketika gempa itu isunya. Jika tahun 2000 warga masyarakat belum mengerti. Sebelum kejadian gempa tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 orang belum percaya meskipun ada orang berteriak gelombang laut naik, gelombang laut naik, banyak warga yang tidak peduli. Setelah melihat gempa tsunami Aceh, setiap kali terjadi gempa besar orang khawatir.

Waktu terjadi gempa tanggal 12 September 2007, banyak orang Bengkulu yang tidak terpikir akan terjadi tsunami. Yang terpikirkan pada waktu itu, selamatkan dulu keluarga, setelah itu mereka ke satkorlak. Malah ada yang pergi ke pinggir pantai yang dianggap rawan, dan mereka turun melihat laut. Hal ini membuktikan bahwa waktu gempa tahun 2007 tidak terjadi kepanikan akan terjadi tsunami, tidak banyak orang yang lari menjauhi pantai. Namun demikian, di Kota Bengkulu di daerah Lempuing juga nampak ada sekelompok orang yang naik ke daerah yang tinggi. Rumah dikosongkan kemudian lari menuju bukit.[29]

Ketidak panikan ini terjadi mungkin karena sebelumnya sudah ada sosialisasi kalau terjadi gempa itu melihat ke pinggir laut, ke daerah pantai. Jika air lautnya terjadi surut, kemungkinan akan terjadi tsunami, maka harus lari menjauhi pantai ke arah yang lebih tinggi/perbukitan. Paling tidak pergi ke titik berkumpul yang telah ditentukan. Sebenarnya titik berkumpul itu untuk emergensi.

Jika nanti masih terjangkaua tsunami, arah larinya sudah ditentukan tebe 1, tebe 2. Masyarakat Bengkulu sudah terbiasa, jika terjadi gempa di bawah 6 Skala Rechter, tidak terlalu dirasakan. Bagi masyarakat bengkulu itu dianggap aman dan tidak terjadi musibah. Mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasanya.

Namun ada juga tamu dari Depsos yang datang ke Kota Bengkulu, ketika sedang santai sambil makan bakso di Mol pinggir pantai, tiba-tiba terjadi gempa kecil di bawah 6 Skala Rechter. Ia sudah stress dan ketakutan, pada hal masyarakat sekitarnya tenang-tenang saja.

[29] Wawancara dengan Darmawan, Kasubbag Bantuan Sosial Departeman Sosial Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

Masyarakat Bengkulu sudah akrap dengan gempa, sehingga tidak terlalu khawatir dengan gempa meski cukup besar getarannya. Mereka tidak lari tunggang-langgang mencari selamat, tetapi memperhatikan pergerakan air laut. Jika air laut tidak surut berarti tidak aman. Berbeda dengan masyarakat Padang.

Ketika gempa pada 2007 yang juga melanda Sumatera Barat, masyarakat kota Padang sudah panik dan eksodus menuju tempat yang lebih tinggi. Sedangkan masyarakat Kota Bengkulu tenang-tenang saja. Ada juga satu dua orang yang lari, tetapi tidak terjadi eksodus seperti yang terjadi di Padang.

Ketika ada isu bahwa pada 23 Desember 2007 akan terjadi gempa besar yang menimbulkan tsunami, banyak juga masyarakat di Pulau Baai yang percaya dan khawatir akan terjadi musibah besar. Mereka eksodus sehingga perkampungan mereka selama satu minggu kosong, pada hal sudah ada himbauan agar tidak percaya pada isu, tetapi mereka tetap khawatir akan terjadi tsunami.

Namanya juga masyarakat awam, pikirannya bisa macam-macam. Jika terjadi gempa besar, jembatan yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Pulau Bay akan putus, jika terjadi tsunami bagaimana, bisa mati semua. Karena termakan isu itulah maka sebagai akibatnya pasokan ikan dari Pulau Bay kosong, karena warga yang sebagian besar sebagai nelayan tersebut tidak melaut, tetapi eksodus.[30]

Waktu menangani korban gempa, bantuan yang dikirim melalui pusat dan ada yang melalui NGO. Ada beberapa NGO yang turun ke Bengkulu menyalurkan bantuan. Mereka banyak yang memberi bantuan langsung, tetapi harus lapor dulu ke Satkorlak Hal ini dilakukan agar setiap bantuan yang disalurkan dapat terpantau dan terdata. Jangan sampai daerah yang mendapat bantuan NGO, pemerintah pusat tidak mengetahui. Mereka berasal dari beberapa provinsi yang dengan suka

[30] Wawancara dengan M. Ridho, Kasi Bencana Kesbanglinmas di Kantor Provinsi Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

rela datang untuk memberi bantuan. Mereka mau membangun apa harus lapor dulu ke Satkorlak.

Sampai sekarang rekafre belum selesai. Diharapkan sebelum lebaran bantuan rekafre segera diselesaikan. Pemerintah Daerah Bengkulu sistemnya memberi bantuan tunai. Jika melalui Depsos, bantuan disalurkan dalam bentuk barang atau bahan bangunan. Sedangkan Menko Kesra dan Pemda memberi bantuan dalam bentuk uang tunai, seperti yang dilakukan dalam menangani korban gempa di Yogyakarta pada 2006.

Memang sangat riskan jika bantuan diberikan dalam bentuk uang. Namun demikian bukan berarti bantuan dalam bentuk barang dan bahan bangunan juga tidak ada resikonya. Jadi semua ada resikonya. Berdasar keputusan bersama di Pemda, harus bantu tunai. Untuk itu dibentuk pokja-pokja, pemantau, pengawas, pendamping, dan sebagainya.

Kelompok endependen dan mahasiswa dibentuk untuk memantau dan mendampingi pokja-pokja itu, sehingga semuanya dapat berjalan secara transparan. Jadi tidak main-main, semua itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jika barang nanti lewat kanan. Kalau mau menangani rumah sampai 60.000 rumah yang tersebar ke seluruh daerah bencana di Provinsi Bengkulu, sehingga jika dihitung sampai juga ke Lais.

Kalau yang dibantu itu memang rumahnya padat, di pinggir pantai, rusaknya total. Lewat darat satu jam masuk hutan. Dari satu desa ke desa berikutnya dipisahkan oleh hutan yang berupa kebun sawit, kebun karet dan kebun coklat. Kira–kira lamanya satu jam melintasi hutan kebun tersebut.

Waktu itu kita kurang percaya, turunkan kopasus, dibentuk team provinsi, kabupaten, mana yang lebih besar rusaknya. Mahasiswa diturunkan juga. Datanya berkisar 56 kerusakan. Beberapa kali didata jumlah kerusakannya sebanyak itu. Bahkan kemudian bertambah. Ada data susulan, yang tadinya hanya mengalami rusak kecil, retak sedikit, akhirnya menjadi berat karena selama 3 bulan itu terjadi gempa terus.

Dulu pernah diprediksi, bahwa gempa setelah tahun 2000, kemungkinan terjadi gempa lagi sekitar 40 tahun ke depan, Bahkan ada

yang mengatakan 100 tahun lagi. Ternyata baru tujuh tahun di Bengkulu digoncang gempa dahsyat. Bahkan di Padang satu tahun dua kali terjadi gempa besar.

Ada yang mengatakan ini mungkin ada pengaruh gerakan magma. Pendapat ini mengatakan bahwa karena ada lumpur lapindo yang keluar, maka ada lempengan yang kosong turun. Jika yang bergerak lempeng yang di barat, maka Sumatera menjadi goyah sehingga memicu gempa di Bengkulu dan Sumatera Barat[31]. Jika bergeraknya ke timur, maka Bima dan Dompu terjadi gempa.

Hal ini disebabkan karena kekosongan magma dan gas di bawah Pulau Jawa, sehingga ada gerakan magma di perut bumi yang mana dapat pula menggoyang di Pulau Sumatera sehingga terjadi gempa di Sumatera. Jika semburan lumpur lapindo itu berhenti, maka gempa itu akan berkurang.

2. Bantuan Rumah

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat bangunan yang roboh dan rusak berat pasca gempa di Bengkulu dan Sumatera Barat mencapai 54.451 unit. Jadi untuk memenuhi janji pemberian bantuan rehabilitasi bagi korban gempa itu, Pemerintah harus menyediakan dana Rp. 619, 89 miliar. Menurut Suprayogi Hadi, Direktur Kewilayahan Bappenas, Pemerintah sudah menjanjikan bantuan rehabilitasi rumah sebesar Rp. 15.000.000,- untuk rumah yang roboh dan Rp. 10.000.000,- untuk rumah rusak berat.

Bappenas mencatat, total jumlah bangunan yang rusak akibat gempa di kedua daerah itu mencapai 64.609 unit, terdiri dari 15.076 unit roboh, 39.375 unit rusak berat dan 7.158 unit rusak ringan. Angka tersebut belum termasuk 3.000 rumah lainnya di Kabupaten Pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat yang rusak tetapi belum diklarifikasi jenis kerusakannya. "Data yang kami himpun ini baru hasil pendataan sementara, yang terdiri

[31] Wawancara dengan Darmawan, Kasubbag Bantuan Sosial Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

atas volume kerusakan. Kami juga masih menunggu data dan satuan harga terakhir sehingga dapat diketahui laporan materialnya", ujar Suprayogo. Secara terpisah, Wakil Ketua Anggaran DPR Hafiz Zawawi menyebutkan dana yang masih tersedia untuk merehabilitasi sarana puplik akibat bencana alam tahun 2007 adalah Rp. 700 miliar.

Hingga hari keempat pasca gempa, para korban belum mendapatkan bantuan yang memadai. Sejumlah korban gempa mengungkapkan bantuan yang mereka terima masih sangat minim. Pada beberapa lokasi pengungsian di Bengkulu, korban gempa mulai kelelahan. Selain karena hidup di bawah tenda plastik dengan alas seadanya, pasokan bahan makanan dan air bersih pun sangat terbatas. Hal itu menambah tekanan psikologis bagi para korban.

"Pasokan bahan makanan sejak hari pertama gempa memang sudah diterima pengungsi, tetapi dengan jumlah seadanya", ujar Siti Khairiah, Camat Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Khairiah juga mengutarakan, fasilitas di pengungsian, seperti pasokan air bersih untuk minum dan mandi, serta ketersediaan selimut dan tikar sangat minim[32].

Di Kecamatan Lais, yang posisinya sangat dekat dengan pusat gempa berkekuatan 7,9 Skala Richter hari Rabu tanggal 12 September 2007, tercatat lima dari 22 desa mengalami kerusakan paling parah. Kelima desa itu adalah Desa Pal 30, Pasar Lais, Dusun Raja, Lubuk Lesung dan Mesikit.

Hujan yang mengguyur Sungai Penuh, mengakibatkan sebagian pasien Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen HA Thaib Sungai Penuh dimasukkan ke dalam gedung rumah sakit yang sudah mengalami kerusakan parah karena tenda darurat bocor. Direktur RSUD Mayjen HA Thaib Noviar mengemukakan, sebenarnya kondisi bangunan Unit Gawat Darurat RSUD mencemaskan pasien, tetapi tidak ada pilihan lain.

Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin yang ditemui di pos Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA)

[32] Wawancara dengan Siti Khairiah, Camat Lais Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 8 Agustus 2008

Provinsi Bengkulu mengatakan, masyarakat Bengkulu kecewa karena ada pandangan yang mengecilkan dampak gempa. Padahal, kalau dilihat lebih dekat, Bengkulu justru mengalami kerusakan parah dengan porak porandanya sejumlah perkampungan penduduk di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko.

Berdasarkan inventarisasi kebutuhan mendesak, menurut Agusrin, Satkorlak PBA Provinsi Bengkulu sampai sekarang masih membutuhkan sekitar 30.000 tenda lipat (terpal), dengan sekitar 13.000 tenda direncanakan akan didistripusikan ke Bengkulu Utara. Satkorlak PBA juga membutuhkan sekitar 6.000 tenda regu untuk rumah sakit dan sekolah serta 35.000 selimut.

Jumlah rumah yang rusak relatif banyak karena konstruksi bangunan tidak layak, tidak menggunakan besi. Semestinya izin mendirikan bangunan juga harus memperhatikan keselamatan bangunan pada warga.

3. Dapur Umum

Dapur umum itu disiapkan untuk makan para pengungsi. Pemerintah Bengkulu mempunyai beras, lauk pauk dan dimasak untuk makan mereka sehari tiga kali, pagi, siang dan sore. Kekurangan bahan makanan dari Pemda kota, akan ditambah dari Pemda provinsi. Misalnya untuk keperluan membeli minyak tanah, bumbu dapur, dan kebutuhan lain untuk keperluan memasak, akan didukung dengan BPD. Jika di Lais selama 1 bulan itu didanai APBD atau satkorlak. Dana satkorlak anggarannya di pihak Pemerintah Provinsi, bukan anggaran Pemda Kota.

Kegiatan dapur umum selama satu bulan. Kemudian juga harus membangun prasarana umum (prasum), prasarana sosial (prasos), membangun tempat ibadah, membangun sekolah, membangun tempat-tempat pelayanan masyarakat dengan melibatkan ABRI Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Waktu itu ada 200 orang lebih TNI dan Polisi yang terlibat.

Pemerintah membuka tenda selama sebulan di tempat pengungsian dan memperbaiki gedung yang rusak, sarana dan prasarana jalan sehingga

pelayanan umum dan kesehatan berjalan dengan baik. Di samping ABRI, juga melibatkan masyarakat umum. Pokoknya selama masih ada pengungsi, pemerintah daerah masih membantu. Waktu kejadian gempa, selama 14 hari masih ditambah lagi 14 hari lagi dibuka untuk pengungsi. Jika sekarang sudah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana (BPB).

Jika pusat sudah tidak ada lagi Satkornas, di daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetapi pelaksanaannya belum diurusi. Baru Perdanya disahkan. Di Kabupaten seharusnya sudah, tetapi di kota Bengkulu belum. Nanti penanganan bencana terfokus di Badan Penanganan Bencana, Badan Nasional maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Nasional, Bakornas sudah habis. Jadi perlu koordinasi, sekarang tidak operasional. Jadi Badan Nasional maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu fungsinya koordinasi, komando dan operasional, langsung bergerak semua.

Apaun mulai tanggap darurat, pelatihan sampai rekafre itu ditangani oleh Badan Nasional dan badan Daerah. Strukturnya sudah seperti Dinas juga. Jadi ada Kepala Badan, ada sekretaris, ada bidang-bidang, bidang tanggap darurat dan sebagainya. Ada SOPD baru dan perlu diundangkan. Setelah diundangkan pada 23 Juli lalu mudah-mudahan ke depan penanganan bencana ini sudah ditangani oleh Badan Bencana ini. Memang sekarang koordinasi ini serba tanggung, kadang-kadang harus menunggu. Nanti ia sudah dapat mengmbil keputusan. Pelaksanaan dapur umum itu, masaknya petugas dari Pemda, Pemerintah mempunyai tenaga, pramuka, anggota masyarakat yang sudah dilatih, kadang kelompok masyarakat yang dilatih untuk menjadi relawan dalam pelaksanaan dapur umum.

Para nelayan tidak terlalu khawatir dengan gempa, yang mereka khawatirkan hanya angin saja. Apalagi sekarang sedang musim angin kencang, gelombang besar-besar yang dapat mengakibatkan perahu terbalik atau tenggelam. Tetapi jika gempa tidak terlalu difikirkan. Kata orang, jika kita takut gempa, jangan hidup di daerah rawan gempa. Jika sudah terlanjur hidup di Bengkulu, harus akrap dengan gempa.

4. Simulasi Menghindari Tsunami

Jika terjadi tsunami harus lari sampai ketinggian 12 meter. Diperkirakan tsunami itu terjadi 20 menit setelah gempa besar terjadi, maka waktu 20 menit cukup untuk menghindari tsunami. Untuk Bengkulu ini, budaya-budaya, slogan-slogan atau simbol-simbol untuk mengantisipasi gempa belum ada. Simbol bahasa daerahnya itu, dan slogan-slogan itu seperti *smong* di Siemellue tidak ada di Bengkulu. Jika mendengar *smong*, orang di daerah Siemullue sudah lari, tetapi orang kota Bengkulu belum. Belum ada slogan-slogan yang menjadi simbol-simbol itu.

Kita dalam penanganan gempa mengarah pada budayanya, tentu ada simbol-simbol atau apalah. Jika terjadi gempa besar, pasti ada penanganan pasca gempa. Jika terjadi gempa besar, kita pasti ada trauma psikis, seperti kejadian gempa tanggal 12 September 2007. Begitu mendengar ada isu akan terjadi gempa yang lebih besar lagi semua orang sudah siap-siap. Ada pemberitaan dari Resalino yang berasal dari Brasilia bahwa pada 23 Desember 2007 akan ada gempa yang lebih besar yang disertai tsunami.

Pemerintah dan masyarakat Bengkulu merespons pemberitaan tersebut, bahkan tidak hanya masyarakat yang trauma, tetapi juga Pemerintah Daerah. Isu tersebut ditanggapi seolah-olah berita tersebut akan terjadi betul[33]. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan langsung mengadakan simulasi-simulasi untuk warga masyarakat Kota Bengkulu. Bahkan pihak Pemerintah Provinsi juga sudah memerintahkan kepada kabupaten-kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat.

Di Kota Bengkulu ini simulasi dilakukan pada 10 dan 15 Desember 2007. Pemerintah Kota segera membuat petunjuk arah evakuasi dan membuat selebaran-selebaran yang dibagi-bagikan kepada masyarakat. Masyarakat Kota Bengkulu juga mempercayai selebaran tersebut sehingga masyarakat menjadi bertambah traumanya. Pada waktu dilaksanakan

[33] Wawancara dengan Surianto, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

simulasi, helikopter terbang di atas kota dengan menyebarkan selebaran-selebaran yang meminta supaya siap-siap menghadapi kemungkinan yang terburuk.

Pada hari H (23 Desember) ternyata tidak terjadi gempa tsunami, masyarakat menjadi lega. Pemberitaan yang dinilai akurat tersebut trernyata hanya isu yang tidak benar, menyebabkan masyarakat Bengkulu menjadi tidak percaya lagi pada isu. Mereka lebih percaya pada Allah bahwa segala sesuatu yang akan terjadi hanya Allah yang tahu. Karena seringnya ada gempa, maka masyarakatpun sudah dapat merasakan sendiri dan dapat menilai apakah gempa tersebut membahayakan atau tidak. Namun keyakinan yang berlebihan juga dapat membahayakan diri sendiri. Jika terjadi gempa besar, akhirnya banyak yang lalai dan kurang waspada sehingga mengabaikan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi.

Ketika gempa pada 2007 itu, daerah-daerah lain banyak yang memberikan bantuan, seperti dari Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta dan sebagainya. Bahkan dari Yogyakarta ditanggap darurat nampak paling menonjol dalam memberikan bantuan. Mungkin hal ini dilakukan karena ada balas budi karena ketika di Yogya terjadi gempa besar tahun 2006, Bengkulu juga memberikan bantuan cukup besar. Di samping mengirimkan sembako dalam jumlah besar, juga membuatkan rumah sebanyak 400 buah rumah kepada korban di Yogya. Pasca rekafre tidak ada lagi bantuan yang diberikan[34].

Bantuan tahap pertama pada 2007 dananya 20 %. Kemudian tahap kedua diberikan sebesar 65 % pada 2008. Jadi tahap pertama dan kedua seluruhnya sudah disalurkan 85 %. Nanti tahap ketiga akan diberikan setelah Januari 2009. Diperkirakan setelah lebaran 2008 baru akan menunjuk konsultan. Yang jelas rekafre di seluruh Indonesia itu yang banyak di Kesbang. Kebijakan dari gubernur meminta didrop pembangunan, dananya cukup besar. Yang pembangunan itu di bawah

[34] Wawancara dengan M. Ridho, Kasi Bencana Kesbanglinmas di Kantor Provinsi Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

Sekda. Dalam menangani bencana, semua unsur ikut terlibat. Waktu tanggap darurat semua Dinas ikut, sesuai dengan SK Satkorlak. Ada ABRI dan Polisi.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa gempa dengan kekuatan 7, 8 skala richter yang mengguncang Bengkulu pada 12 dan 13 September 2007 menimbulkan banyak kerusakan sarana dan prasarana umum termasuk juga rumah-rumah penduduk. Ada puluhan fasilitas umum dan ribuan rumah penduduk yang rusak berat. Demikian juga kerugian yang diderita para nelayan, di samping rumahnya yang hancur, juga ada banyak kapal-kapal nelayan yang hilang atau rusak. Ada puluhan orang meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan. Jumlah orang yang luka parah dan ringan jauh lebih banyak lagi.

Banyaknya korban dan tingginya tingkat kerusakan bangunan, mengundang perhatian masyarakat Indonesia maupun luar negeri. Bantuan mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun LSM dan para sukarelawan dari berbagai daerah.

Pada beberapa lokasi pengungsian di Bengkulu Utara dan Muko-Muko, korban gempa mulai kelelahan. Selain karena hidup di bawah tenda plastik dengan alas seadanya, pasokan bahan makanan dan air bersih sangat terbatas. Hal itu menambah tekanan psikologis para korban. Sebagian pengungsi di beberapa desa yang tersebar di Kabupaten Muko-Muko dan Bengkulu Utara mulai terserang penyakit, seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, flu dan infeksi saluran pernafasan.

Luasnya wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan, menyebabkan pendataan kurang akurat. Hal ini menimbulkan masalah karena ada daerah yang dapat bantuan cukup bahkan berlebihan, tetapi di tempat-tempat terpencil atau yang kurang terdata, bantuan diharapkan tidak pernah datang atau sangat minim.

Untuk mengurangi beban derita mereka, pemerintah memang berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan dalam

berbagai macam, di antaranya bantuan pembangunan rumah yang rusak atau roboh, bantuan perbaikan kapal yang rusak, bantuan bahan makanan dan bantuan lainnya yang diperlukan.

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, bantuan yang disalurkan tidak seluruhnya sampai kepada yang berhak menerima. Ada kantong-kantong kemiskinan yang sampai sekarang masih ada dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Selanjutnya sebagai saran kepada pemerintah penulis memberikan beberapa masukan. Mengingat Bengkulu merupakan wilayah yang rawan gempa dan tsunami, maka untuk meminimalisir korban jiwa dan kerusakan bangunan, jika terjadi gempa di masa yang akan datang, maka perlu ada tindakan mitigasi, kearifan lokal dan pencegahan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut: (1) membangun rumah tahan gempa. Kita harus merancang bangunan yang lentur, ringan tetapi kuat, seperti bangunan atau rumah yang terbuat dari kayu, baja atau plastik. Rumah dari kayu dapat mencontoh kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Nias. Mereka membangun rumah memperhatikan bangunan yang diwariskan nenek moyang yang terbukti lentur terhadap gempa yang sangat dahsyat.

Untuk rumah dari batu bata, harus menggunakan beton bertulang. Sloof beton bertulang dapat digunakan di atas fondasi batu kali dengan perlengkapan kolom praktis pada jarak dinding sekitar 3 meter. Atap bangunan dibuat dari bahan yang ringan tetapi kuat, seperti seng.

Kearifan lokal *smong* yang dilakukan oleh masyarakat Simeuleu juga perlu diteladani. Dengan meneriakkan *smong*, orang harus lari ke bukit sesaat setelah terjadi gempa dahsyat. Jika air laut surut, mereka yang berada di pantai harus lari ke bukit dengan meneriakkan *smong*. Yang mendengar *smong* ikut lari ke bukit, sehingga ketika tsunami itu melanda daerah pemukiman, mereka selamat karena sudah berada di ketinggian yang tidak terjangkau tsunami.

Untuk mengurangi dampak tsunami, maka daerah sepanjang pesisir pantai, sebaiknya ditanami pohon pelindung, seperti hutan bakau, cemara

laut, waru laut dan jenis-jenis pohon pantai lainnya yang mempunyai perakaran yang kuat. Hal ini dilakukan untuk menghalangi datangnya gelombang tsunami yang akan menghantam pemukiman penduduk. Semakin lebat hutan pantai akan semakin kuat menghadapi terjangan tsunami.

Sebaiknya Pemerintah Daerah dapat menangani bencana alam dengan tuntas. Sejak sebelum bencana terjadi, penanganan pertama sesaat setelah terjadi, perbaikan fasilitas dan juga proses pendidikan pasca bencana, salah satunya membangun monumen gempa. Pembangunan monumen gempa itu perlu untuk mengingatkan agar generasi selanjutnya bisa mendapatkan pelajaran secara lengkap tentang korban gempa yang pernah terjadi di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Prasetya, Tiar, dkk. 2006. *Gempa Bumi,* Ciri dan Cara Menanggulanginya, Yogyakarta : Gitanagari.

Koran :

"Gempa Sumatera, Perlu Semakin Waspada Untuk Mitigasi Bencana" dalam *Kompas,* Jumat, 14 September 2007.

"Empat Ratus Tiga Kapal Nelayan di Muko-Muko Rusak Berat" dalam *Kompas*, Selasa, 25 September 2007.

"Gempa Sumatera, Mereka Masih Trauma dan Belum Berani Melaut" dalam *Kompas,* Minggu, 16 September 2007.

"Ribuan Rumah Rusak di Bengkulu dan Sumbar" dalam *Kompas,* Jumat, 14 September 2007.

"Gempa Sumatera, Mereka Masih Trauma dan Belum Berani Melaut" dalam *Kompas,* Minggu, 16 September 2007.

"Gempa Bengkulu, Enam Bulan Bersama Teror Tsunami" dalam *Kompas,* Kamis, 28 Februari 2008.

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Hendri, Nelayan di Pantai Pulau Baai, Kota Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan Ibu Siti Chairiyah, Camat Lais, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Agustus 2008.

Wawancara Dengan Siti Khairiah, Camat Lais, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Agustus 2008.

Wawancara dengan Siti Khairiyah, Camat Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 8 Agustus 2008.

Wawancara dengan Surianto, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan Surianto, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan Darmawan, Kasubbag Bantuan Sosial Departeman Sosial Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan M. Ridho, Kasi Bencana Kesbanglinmas di Kantor Provinsi Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan Darmawan, Kasubbag Bantuan Sosial Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan Siti Khairiah, Camat Lais Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 8 Agustus 2008

Wawancara dengan Surianto, Kepala Seksi Observasi dan Informasi Departemen Sosial Bengkulu pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan M. Ridho, Kasi Bencana Kesbanglinmas di Kantor Provinsi Bengkulu, pada tanggal 9 Agustus 2008.

Wawancara dengan Ichwan Junus, Bupati Muko-Muko tanggal 18 September 2008.

Wawancara dengan Saparuddin, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Muko-Muko, tanggal 18 September 2008.

Wawancara dengan Yanto, Nelayan di Pantai Tapak Paderi, Muko-Muko pada tanggal 18 September 2008.

Wawancara dengan Yanto, Nelayan di Pantai Tapak Paderi, Muko-Muko pada tanggal 18 September 2008.

Wawancara dengan Ichwan Junus, Bupati Muko-Muko tanggal 18 September 2008.

DUNIA MARITIM INDONESIA

Dalam Perspektif Sejarah

Secara geografis luas wilayah Indonesia, dengan jalur laut dua belas mil, adalah lima juta km2 yang terdiri atas enampuluh dua persen adalah laut dan tigapuluh delapan persen adalah darat. Jelas laut merupakan unsur utama, kemudian darat, yang membentuk wilayahnya. Itulah sebabnya Indonesia disebut Negara Maritim. Ini mengindikasikan bahwa sejarah Indonesia sejak zaman bahari berhubungan dengan laut, terutama migrasi dan interaksi penduduk antarpulau.

Artikel yang dimuat dalam buku ini adalah hasil karya peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya di Indonesia yang disampaikan dalam seminar di Makassar. Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut, melampaui apa yang telah dilakukan peneliti ini, guna menambah khasanah pengetahuan kita mengenai dunia maritim Indonesia.

Buku kumpulan tulisan ini baik dibaca untuk menambah pengetahuan kita mengenai dunia maritim Indonesia dari pendekatan kesejarahan.

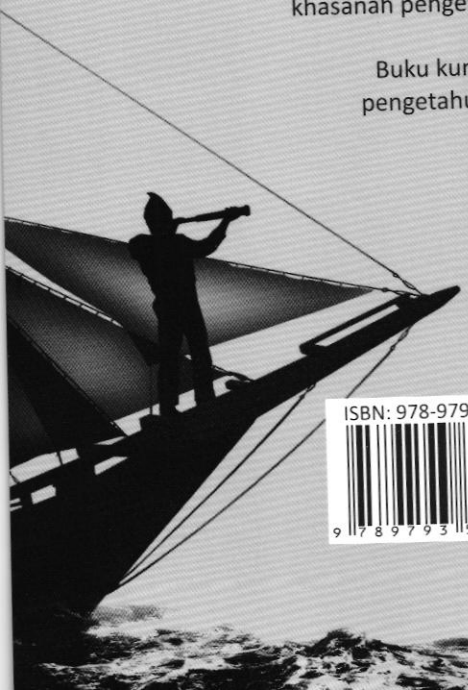

ISBN: 978-979-3570-96-9

PUSTAKA REFLEKSI

Andi Wanua Rumah Buku

Jln. Tamangapa Raya III
Perum. Tritura A5 No. 10 Makassar 90235
Telp. 0411-494086 – 5057064
Fax. 0411-494086, Hp. 081343888172
Email : refleksibooks@yahoo.co.id